



INFORMASI CERAMAH / DISKUSI MUSEUM
**PENDIDIKAN SEJARAH
DAN PERJUANGAN BANGSA**



Direktorat
dayaan

9

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA

JL. JEND. A. YANI NO. 6, YOGYAKARTA TELP. (0274) 586934, 510996
KODE POS 55121

INFORMASI CERAMAH / DISKUSI
MUSEUM

**PENDIDIKAN SEJARAH
DAN PERJUANGAN BANGSA**

370.29
PEN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA

JL. JEND. A. YANI NO. 6, YOGYAKARTA TELP. (0274) 586934, 510996
KODE POS 55121

TIM PENYUSUN

PENGUMPUL MATERI

Drs. SUHARJA
SURYANTO PAMUJI
V. AGUS SULISTYA SPd

DISAIN DAN TATA LETAK

Dra. SRI SUNARNI

PENYUNTING

Drs. BUDIHARJA

**SAMBUTAN
KEPALA MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan yang baik ini Museum Benteng Yogyakarta melalui Bagian Proyek Pembinaan Museum Benteng Yogyakarta tahun anggaran 1997/1998 diijinkan untuk yang kedua kalinya menyusun Buku Informasi Ceramah/Diskusi Museum Benteng Yogyakarta dengan judul **Pendidikan Sejarah dan Pembangunan Bangsa**.

Adapun isi buku ini adalah rangkuman berbagai makalah yang pernah dipresentasikan oleh para pelaku sejarah dan sejarawan di hadapan peserta umum di Museum Benteng Yogyakarta, baik itu dari kalangan sejarawan, budayawan, tokoh/pelaku sejarah, guru-guru, mahasiswa dan siswa sekolah. Kami berharap buku ini bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk menambah informasi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Kami yakin tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 1997

Kepala



Drs. BUDIHARJA
NIP. 131474347

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TUGAS DAN FUNGSI MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA	3
BAB III KERAJAAN MAJAPAHIT	
- Kerajaan Majapahit Dari Masa Sri Rajasanagara Sampai Girindrawardana	7
- Kerajaan Majapahit Tumbuh dan Berkembang Dalam Lintasan Sejarah Indonesia	18
BAB IV KERAJAAN MATARAM ISLAM	
- Kerajaan Mataram Islam Dari Disintegrasi ke Disintegrasi	29
- Prahara Menembus Tahta Mataram	46
BAB V SEJARAH DAN PEMBANGUNAN BANGSA	
- Sejarah dan Pembangunan Bangsa 1	60
- Sejarah dan Pembangunan Bangsa 2	67
BAB VI DEMOKRASI DI INDONESIA	
- Demokrasi Di Indonesia Sebuah Latihan	82
- Demokrasi Di Indonesia	88
BAB VII PENDIDIKAN SEJARAH	
- Pendidikan Sejarah Di Indonesia	106
- Pendidikan Sejarah Kini dan Esok	112
BAB VIII PENUTUP	121
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Ada satu pelajaran yang dapat kita petik dan kita ambil hikmahnya dari sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Cicero bahwa **"Sejarah adalah saksi dari sang waktu, obor dari kebenaran, nyawa dari ingatan, guru dari penghidupan, dan pembawa warta dari masa ke masa"**. Sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan dari suatu masyarakat. Hal itu tidak dapat kita pungkiri. Akan tetapi kita juga tidak dapat mengelak bahwa proses perjalanan sejarah suatu bangsa tidak datang begitu saja. Kondisi yang ada pada masa sekarang ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Sedang masa yang akan datang adalah hasil dari proses pembentukan yang terjadi di masa kini.

Dengan demikian antara masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang memiliki hubungan yang erat sekali. Sehingga walaupun masa lalu itu sudah terjadi, tidak berarti masa lalu itu sudah tidak berguna bagi masa sekarang. Peristiwa di masa lalu tentu memberikan pengalaman bagi kita untuk menilai apa yang harus tetap kita pertahankan dan apa yang perlu kita buang. Karena dimensi masa lalu itu memiliki sisi baik dan sisi yang buruk. Begitu pula dimensi kekinian merupakan pondasi dan akan tercatat pada lembaran sejarah di masa yang akan datang.

Adalah merupakan suatu hal yang naif bagi suatu bangsa apabila bangsa itu membuat suatu kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukannya dimasa yang lalu. Ini berarti bahwa bangsa itu tidak bisa menghargai sejarah dan tidak dapat belajar dari sejarah bangsanya. Namun juga merupakan suatu kesalahan besar apabila kita terlalu terlena dengan kebesaran-kebesaran dan kejayaan-kejayaan masa lampau tanpa mau berbuat apa-apa.

Untuk itulah diperlukan adanya keseimbangan antara yang sudah kita peroleh dan yang akan kita capai di masa yang akan datang. Keseimbangan dalam identitas dan jati diri bangsa yang selalu berkesinambungan dari masa lalu, sekarang dan yang akan datang dapat terlaksana apabila ada sarana untuk mengkaji dan menilai kejadian-kejadian dari sejarah di masa lalu. Hal itu akan bermanfaat untuk mengontrol hal yang perlu dan tidak perlu kita lakukan. Juga bermanfaat untuk menggali nilai-nilai positif dan negatif dari kejadian yang telah berlalu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka buku ini dimaksudkan untuk memperkenalkan keberadaan Museum Benteng Yogyakarta kepada masyarakat sekaligus untuk menjembatani agar tidak ada mata rantai yang terputus dalam proses

pembentukan dan pelestarian jati diri dan identitas bangsa Indonesia dari generasi pendahulu kepada generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

Buku ini memuat informasi mengenai ceramah yang pernah dilakukan oleh Museum Benteng Yogyakarta baik diadakan sendiri maupun bekerja sama dengan instansi dan organisasi kemasyarakatan/profesi. Dari isi ceramah itu kemudian kita kelompokkan ke dalam beberapa bab. Pertama Bab I merupakan Pendahuluan. Sebelum membicarakan isi ceramah terlebih dulu diawali dengan satu bab yang memaparkan tugas dan fungsi Museum Benteng Yogyakarta yang merupakan Bab II, kemudian dilanjutkan dengan Bab III berisi uraian tentang Kerajaan Mataram Islam yang terdiri dari dua makalah yaitu "Kerajaan Mataram Islam Dari Disintegrasi ke Disintegrasi" dan Prahara menghembus Tahta Mataram. Bab selanjutnya Bab IV merupakan bab yang berisi uraian kerajaan Majapahit terdiri dari dua makalah "Kerajaan Majapahit Dari Masa Sri Rajasanagara Sampai Girindra Wardana" dan "Kerajaan Majapahit Tumbuh dan Berkembang Dalam Lintasan Sejarah Indonesia". Bab V berisi dua makalah mengenai Sejarah dan Pembangunan Bangsa. Bab VI juga berisi dua makalah tentang Demokrasi Di Indonesia. Bab VII berisi makalah mengenai Pendidikan Sejarah Di Indonesia juga terdiri dari dua makalah. BAB VIII merupakan bab penutup yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan materi ceramah.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA

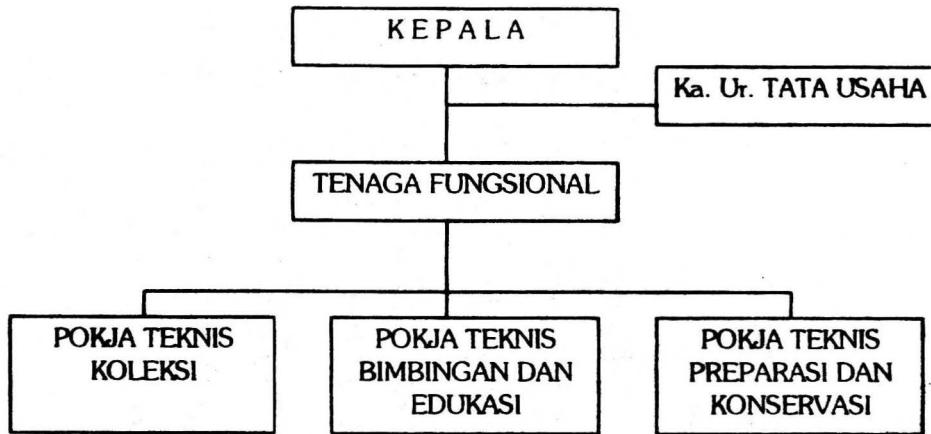
A. Arti Museum

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia kata Museum berarti Gedung yang dipergunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni dan ilmu pengetahuan : tempat menyimpan barang kuno. Akan tetapi barang kuno yang dimaksudkan adalah bukan sekedar barang kuno saja tetapi yang memiliki nilai khas, spesifik, unik dan mewakili jaman. Bukan seperti anggapan umum bahwa museum adalah sebagai tempat menyimpan barang kuno. Museum lain dengan ruang pameran kolektor barang kuno, namun lebih memiliki nilai pengetahuan yang menggambarkan proses sejarah suatu bangsa.

Museum Benteng Yogyakarta merupakan museum khusus perjuangan sehingga barang-barang yang dipamerkan (selanjutnya disebut koleksi) adalah benda-benda yang bernilai sejarah, terutama sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya Yogyakarta, dalam merintis, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.

Jadi Museum Benteng Yogyakarta mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultural tentang benda-benda yang memiliki nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merintis, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah lain yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di Yogyakarta.

B. Struktur Organisasi Museum Benteng Yogyakarta



Susunan organisasi Museum Benteng Yogyakarta terdiri dari :

1. **Kepala Museum**

Kepala Museum merupakan penanggung jawab seluruh kegiatan yang dilaksanakan Museum Benteng Yogyakarta.

2. **Kepala Urusan Tata Usaha**

Kepala Urusan Tata Usaha bersama stafnya mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, registrasi dan dokumentasi koleksi, perpustakaan dan ketertiban.

3. **Kelompok Teknis Koleksi**

Kelompok ini memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengumpulan, pendataan, inventarisasi, penelitian, dan pengolahan koleksi museum.

4. **Kelompok Teknis Preparasi dan Konservasi**

Kelompok ini adalah kelompok yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan konservasi, preparasi, restorasi, dan reproduksi serta persiapan tata pameran.

5. Kelompok Teknis Bimbingan dan Edukasi

Kelompok Teknis Bimbingan dan Edukasi merupakan kelompok yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan kegiatan dengan metode dan sistem edukatif kultural untuk pengenalan dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan penghayatan nilai sejarah koleksi Museum Benteng Yogyakarta.

C. Koleksi Museum Benteng Yogyakarta

Koleksi Museum Benteng Yogyakarta secara keseluruhan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. Koleksi Bangunan

Gedung yang berada di dalam kompleks Museum Benteng Yogyakarta merupakan bangunan yang memiliki nilai historis dan merupakan benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dipertahankan. Bangunan-bangunan itu sekaligus merupakan koleksi museum karena bangunan itu menyimpan informasi bukti tentang adanya penjajahan Belanda dan segala aktivitasnya terutama tentara yang berpusat di Benteng Vredenburg yang merupakan gedung yang dipergunakan sebagai Museum Benteng Yogyakarta. Bangunan ini mewakili peristiwa sejarah perjuangan sejak jaman merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

2. Koleksi Realia / Replika /Dokumen Sejarah

Museum Benteng Yogyakarta juga memiliki koleksi berupa realia, replika, dokumen, foto-foto tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya yang terjadi di Yogyakarta yang mampu menggambarkan sejarah perjuangan dalam merintis, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

3. Koleksi Visualisasi Peristiwa Sejarah

Koleksi ini berupa visualisasi peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak Perang Diponegoro sampai dengan gagasan perlunya pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila yang disampaikan Presiden Soeharto tahun 1974 di Universitas Gadjah Mada.

D. Program Kerja Museum Benteng Yogyakarta

Untuk merealisasikan peran dan fungsi sebuah museum tentu ada tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh karyawan sebuah museum. Oleh karena itu Museum kemudian menyusun program kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Museum Benteng Yogyakarta memiliki program kegiatan antara lain:

1. Pameran tetap
2. Pameran temporer / khusus
3. Lomba dan Festival
4. Ceramah / diskusi / sarasehan / seminar / lokakarya yang berkaitan dengan sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia
5. Pelacakan benda-benda bersejarah (survei)
6. Penelitian sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya yang terjadi di Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkaitan dengan peristiwa sejarah Yogyakarta.
7. Publikasi dan penerbitan hasil penelitian, ceramah, diskusi, seminar, lokakarya yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia
8. Bimbingan Edukatif kultural ke sekolah-sekolah mengenai koleksi Museum Benteng Yogyakarta.
9. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dan terkoordinasi dengan tugas dan fungsi museum.

BAB III

KERAJAAN MAJAPAHIT

KERAJAAN MAJAPAHIT : MASA SRI RAJASANAGARA SAMPAI GIRINDRAWARDHANA

Oleh : Timbul Haryono

PENGANTAR

Kerajaan Majapahit atau sering disebut juga dengan nama Wilmatikta merupakan kerajaan besar di Nusantara.¹ Sejak pemerintahan Sri Kertarajasa Jayawardhana tahun 1293, kerajaan Majapahit mengalami pasang surut. Hal demikian ini kiranya tidak mengherankan karena selama kurun waktu 2 abad tentu saja suatu kerajaan akan mengalami perubahan-perubahan, baik disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Namun demikian suatu kenyataan adalah bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan pada masa Hindu-Budha yang paling lama bertahan dan paling luas wilayahnya.

Peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami kerajaan Majapahit sangat bermanfaat untuk diambil hikmahnya dalam membangun dan menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia tercinta. Makalah ini berisi uraian singkat tentang sejarah timbul-tenggelamnya Majapahit sejak pemerintahan Sri Rajasanegara sampai runtuhnya Majapahit pada awal abad XVI.

HAYAM WURUK DAN PUNCAK KEBESARAN KERAJAAN MAJAPAHIT

Pada waktu pemerintahan masih berada di tangan Tribhuanattunggadewi, Hayam Wuruk telah dinobatkan menjadi raja muda (rajakumara). Dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Wisnuwarddhani atau Tribuwanattunggadewi Jayawisnuwarddhani disebutkan bahwa Dyah Hayam Wuruk menjadi penguasa di Jiwana (Jiwanarajnapratistita dyah hayam wuruk bhatara sri ra (Jasanagara) nama rajabhiseka..).² Pada tahun 1350 Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit bergelar Sri Rajasanagara³. Selama pemerintahannya yang berakhir pada tahun 1389 (ia meninggal pada tahun tersebut), kerajaan Majapahit mencapai puncak kebesaran. Hal ini tidak lepas dari peranan Patih Gajah Mada yang mendampingi sebagai Patih Hamangkubumi.

Usaha-usaha Hayam Wuruk selama pemerintahannya adalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan berbagai usaha dan tindakan nyata.

a. Perjalanan ke daerah-daerah⁴

Kakawin Negarakertagama dengan panjang lebar menguraikan perjalanan kenegaraan yang diikuti oleh para pembesar kerajaan, yaitu ke Pajang (1351), Lasem (1354), Lodaya (1357), Lamajang (1359), Balitar (1361), Simping (1363).

Negarakertagama XVII : 4,5,6,7 menguraikan sebagai berikut (Slamet Mulyana, 1979:282) :

4. Tiap bulan sehabis musim hujan beliau biasa pesiar keliling Desa Sima di sebelah selatan Jalgiri, di sebelah timur pura Ramai tak ada hentinya selama pertemuan dan upacara Girang melancong mengunjungi Wewe Pikatan setempat dengan candi Lima.
5. Pergilah beliau bersembah bakti ke hadapan Hyang Acalapati. Biasanya terus menuju Blitar, Jimur mengunjungi gunung-gunung permai. Di Daha terutama ke Polaman, ke Kuwu dan Lingga hingga desa Bangin. Jika sampai Jenggala, singgah di Surabaya, terus menuju Buwun.
6. Tahun Aksatisurya (1275) sang prabu menuju Pajang membawa banyak pengiring. Tahun Saka-angga-naga-aryama (1276) ke Lasem, melintasi pantai Samudar. Tahun Saka Pintu-gunung-mendengar-indu ke laut selatan menembus hutan. Lega menikmati pemandangan alam indah Lodaya, Tetu dan Sideman.
7. Tahun Saka seekor-naga-menelan-bulan (1281) di Badrapada. Sri Nata pesiar keliling seluruh negara menuju kota Lumajang. Naik kereta diiringi semua raja Jawa serta permaisuri dan abdi. Menteri, tanda, pendeta, pujangga, semua para pembesar ikut serta.

Dengan perjalanan keliling yang diikuti juga oleh para pejabat kerajaan dapat ditafsirkan bahwa raja Hayam Wuruk ingin melihat dari dekat kehidupan rakyatnya, kemajuan yang telah dicapai di pedesaan ataupun mengetahui seberapa jauh para pembantunya, para pejabat daerah telah melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, raja Hayam Wuruk adalah tipe pemimpin yang selalu dekat dengan rakyat. Dalam kunjungan ke daerah, raja Hayam Wuruk mendapat sambutan yang hangat dari rakyatnya. Raja banyak membagi harta kepada rakyat dan juga menerima persembahan bulu bakti melimpah ruah.

b. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah

Mengingat bahwa kekuasaan Majapahit cukup luas maka tentu saja hubungan antara pusat dengan daerah harus baik.⁵ Nagarakertagama pupuh XII:6 menjelaskan bahwa negara-negara di Nusantara dengan Caha sebagai pemuka tunduk menengadah berlindung di bawah kekuasaan Wilmatikta. Pada waktu-waktu tertentu diadakan tatap muka antara raja dengan para pejabat daerah, menteri, perwira, para arya, kepala daerah, ketua daerah, para pendeta, brahmana. Hubungan antara pusat dan daerah diibaratkan seperti sungai dan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makan.⁶ Sangat menarik untuk dicatat petunjuk Sri Nata Wengker kepada para pembesar dan Wedana :

"... tunjukkan cinta serta setya baktimu kepada Baginda Raja. Cintailah rakyat bawahanmu dan berusaha memajukan dusunmu. Jembatan, jalan raya, beringin, bangunan dan candi supaya dibina. Dataran tinggi dan basah agar tetap subur, peliharalah. Perhatikan tanah rakyat jangan sampai jatuh di tangan petani besar agar penduduk jangan sampai terusir dan mengungsi ke desa tetangga".⁷

Sebagai kerajaan agraris, Majapahit tentu saja sangat memperhatikan masalah tanah yang harus benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Agaknya masa itu ada kelompok petani-petani besar yang serius menguasai tanah rakyat sehingga terjadi penggusuran.

c. Pembangunan fisik sarana dan prasaran

Sebagaimana dikutip di atas pembangunan jalan, jembatan, bangunan-bangunan lain tampaknya menjadi perhatian. Hal ini tentu saja untuk memperlancar roda perekonomian Majapahit. Bahwa pertanian padi merupakan salah satu andalan masa Majapahit ditunjukkan oleh bukti-bukti prasasti antara lain dalam pembuatan tanggul-tanggul sungai, pembuatan waduk, dam yang berfungsi untuk meningkatkan hasil pertanian dan menanggulangi bahaya banjir.⁸ Hal ini ditunjukkan oleh prasasti Trailokyapuri 1486.⁹ Perekonomian Majapahit bukan hanya dari pertanian saja akan tetapi dari sektor perdagangan baik perdagangan antar pulau di wilayah Majapahit maupun perdagangan internasional. Untuk itu keberadaan pelabuhan merupakan sarana yang vital. Bukti-bukti prasasti menunjukkan adanya tempat-tempat penyeberangan dan kota pelabuhan di tepi aliran sungai Brantas dan sungai Solo. Di antara tempat penyeberangan tersebut : Conggu, Trung dan Surabaya.¹⁰

Untuk meningkatkan hasil bumi, Hayam Wuruk juga memerintahkan perluasan lahan pertanian dengan cara membuka hutan.

d. Perpajakan

Kerajaan Majapahit juga berusaha meningkatkan pendapatan kerajaan dari sektor pajak, di samping pemungutan upeti dan denda. Pada masa Majapahit sebelum atau sesudah pemerintahan raja Hayam Wuruk jenis dan obyek pajak yang dipungut meliputi pajak usaha, pajak tanah, pajak profesi, pajak orang asing, dan pajak atas eksploitasi sumber daya alam.¹¹

Pemungutan pajak dilaksanakan oleh dua kelompok yang di dalam prasasti-prasasti di sebut sang menak kartini dan sang mangilala drabya haji. Kelompok pertama terdiri atas tiga pejabat disebut : panokur, tawan, dan tirip, sedangkan sang mangilala drabya haji jumlah pejabatnya lebih banyak.¹²

Tidak setiap desa atau penduduk desa harus membayar pajak. Pada kasus tertentu ada penduduk desa yang dibebaskan sepenuhnya dari segala macam pungutan atau pajak seperti yang ditunjukkan oleh prasasti Selandi II. Untuk itu dikeluarkan surat keputusan raja tentang pembebasan pajak yang disebut rajamudra. Jenis pajak yang dibebaskan adalah : putajenan, ririmbaqan, paбата, titisara, rarawuhan, titiban, jajalukan, susuquhan, panqisi kendi, sosorokan, qarem, hurughuruqan dalam.¹³

Pajak yang terkumpul dialokasikan sebagian untuk para petugas, mangilala drabya haji, sebagian untuk bangunan suci (dharma), dan sebagian untuk pemeliharaan bangunan suci.

e. Kerukunan antar umat beragama

Berdasarkan sumber-sumber prasasti dan naskah sastra yang ada, ada agama Hindu, agama Buddha, dan aliran Karesian. Bahkan kitab Nagarakertagama pupuh LXXXI : 2 menyebut 4 jenis pendeta yang disebut dengan 'sang caturdwija'; wipra, resi, pendeta Suva dan pendeta Buddha. Agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan. Untuk itu ada pejabat khusus masing-masing yaitu 'dharmmadyaksa ring kasaewan' yang mengurus agama Hindu (Suva) dan 'dharmmadyaksa ring kasogatan' yang mengurus agama Buddha.

Selain itu ada juga percampuran dua agama yang sering diistilahkan dengan sinkretisme, koalisi. Pada candi Panataran ada relief cerita Gagang Aking dan Bubuksah menjadi petunjuk adanya percampuran dua agama ini. Di

dalam agama Hindu sendiri ada aliran Wisnu, aliran Siwa, dan aliran Karesian. Ketiga aliran tersebut di dalam masyarakat Majapahit juga dapat hidup berdampingan dengan damai. Aliran karesian diurus oleh 'nenteri herhaji'.¹⁴

Masing-masing dharmadyaksa dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan atau dharmma upapati dengan sebutan Sang Pamegat (Samgat). Dalam masa Hayam Wuruk dikenal adanya 7 upapatti ada juga yang mengurus sekte-sekte tertentu seperti Bhairawapaksa, Saurapaksa, dan Siddantapaksa.

Pemerintah pusat kerajaan sangat menaruh perhatian terhadap tempat ibadah di wilayah kerajaan Majapahit. Bangunan-bangunan suci yang rusak dipugar kembali. Dalam perjalanannya ke daerah, Hayam Wuruk selalu menyempatkan diri mengunjungi candi-candi peninggalan leluhurnya baik yang bersifat Siwa ataupun Budha sejak jaman Singasari.¹⁵

Nagarakertagama LXIII: 2 menjelaskan :

"Candi makam serta bangunan para leluhur sejak jaman dulu kala
Yang belum siap diselesaikan, dijaga dan dibina dengan seksama
Yang belum punya prasasti, disuruh buat piagam pada ahli sastra
Agar kelak jangan sampai timbul perselisihan"

Aktivitas keagamaan yang sangat penting pada masa Hayam Wuruk adalah penyelenggaraan upacara Sraddha untuk memperingati 12 tahun wafatnya Rajapatni. Upacara Sraddha diselenggarakan dengan meriah dan khidmat pada bulan Badrapada tahun 1362 atas perintah ibunda raja Tribhuwanattunggadewi.¹⁶

f. Penegakan Hukum dan Perundang-undangan

Nagarakertagama pupuh LXIII memberitahukan bahwa dalam soal pengadilan, Raja Hayam Wuruk tidak bertindak serampangan tetapi patuh mengikuti undang-undang. Semua keputusan yang diambil membuat puas semua pihak. Pada masa itu sudah ada kitab hukum yang disebut Kutara Manawa (disebutkan dalam prasasti Bendasari dan prasasti Trowulan 1358).¹⁷

Dalam soal pengadilan, raja dibantu dua orang dharmadyaksa (kasawan dan kasogatan). Mereka dibantu oleh upapati yang jumlahnya 7 terdiri dari 5 upapati agama Siwa dan 2 upapati agama Buddha, dengan sebut 'sang pamegat' (=sang pemutus). Menurut prasasti Trowulan 1358, tujuh orang upapati tersebut adalah : Sang Pamegat

Tirwan, Sang Pamegat Kandamuhi, Sang Pamegat Manghuri, Sang Pamegat Jambi, Sang Pamegat Pamotan, Sang Pamegat Tuha, Sang Pamegat Rare.¹⁸

g. Struktur Pemerintahan dan Birokrasi

Kerajaan Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang teratur. Dikatakan bahwa struktur dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci dengan berlandaskan konsepsi kosmologis. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika jagad raya, raja disamakan dengan dewa tertinggi, wilayah kerajaan sebagai kerajaan-kerajaan kecil disamakan sebagai tempat tinggal para dewa Lokapala.¹⁹

Karena Raja merupakan penjelmaan dewa di dunia, maka ia menduduki puncak hierarki dan memegang otoritas politik tertinggi. Namun demikian sebelum mengambil keputusan yang penting, raja Hayam Wuruk mengadakan musyawarah dengan para kerabat yang merupakan Dewan Pertimbangan Kerajaan. Di contohkan misalnya, ketika Patih Gajah Mada meninggal (1286 S = 1363 M), Raja Hayam Wuruk mengadakan pertemuan dengan kerabat untuk mencari calon pengganti Gajah Mada (Nag LXXI: 1 dan 2).

Di dalam kitab Nagarakertagama, Dewan Pertimbangan tersebut dikenal sebagai 'Pahom Narendra' sedang di dalam Kidung Sundayana disebut 'Saptaprabhu'. Para pejabat di bawah raja adalah 'Rakryan Mahamantri Katrini' yang biasanya dijabat oleh putra raja. Jabatan tersebut: Rakryan Mahamantri i Hino, Rkryan Mahamantri i Halu, dan Rakryan Mahamantri i Sirikan.

Pejabat berikutnya adalah para Rakryan Mantri ri pakira-kiran yang biasanya terdiri dari lima orang pejabat yaitu : (1)rakryan mapatih atau Patih Hamengkubhumi, (2)rakryan tumenggung, (3)rakryan demung, (4)rakryan rangga, (5)rakryan kanuruhan. Karena jumlahnya yang lima tersebut, maka dikenal sebagai 'Sang Panca ring Wilwatikta'. Di antara kelima pejabat tersebut rakryan mapatih adalah yang terpenting atau mungkin tertinggi. Oleh karena itulah ia disebut Apatih ring Tiktawilwadhika.²⁰

Pejabat Tinggi di bidang keagamaan adalah dhramadyaksa ring kasawan dan dharmadhyaksa ring kasogatan dan para upapatti.

Dengan birokrasi pemerintahan yang teratur dan didukung oleh pelaksana yang disiplin maka menjadikan kerajaan yang kuat.

KEMUNDURAN DAN KERUNTUHAN MAJAPAHIT

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejayaan kerajaan Majapahit tidak dapat dilepaskan dari peran Patih Gajah Mada yang sejak pemerintahan Tribhuwanattunggadewi telah bersumpah tidak akan amukti palapa sebelum ia dapat menundukkan wilayah Nusantara.²¹

Kitab Pararaton menyebutkan :

"Lamun huwus kalah nusantara isun mukti palapa, amun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, semana isun amukti palapa"

Sesudah Gajah Mada wafat dan terlebih lagi sesudah raja Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit menampakkan tanda-tanda kemunduran. Di antara para keluarga mulai terjadi pertentangan mengenai hak waris atas tahta kerajaan dan perebutan kekuasaan. Pertentangan antar keluarga pertama kali muncul dalam pemerintahan Wikramawarddhana antara Wikramawarddhana dengan Bhre Wirabhumi. Dalam Pararaton, pertentangan keluarga tersebut disebut "paregreg", yaitu peperangan antara 'kedaton kulon' dan 'kedaton wetan', pada tahun S 1323 pertentangan keluarga raja-raja Majapahit terus berlarut-larut sehingga melemahkan kedudukan raja-raja di pusat maupun di daerah.

Situasi tersebut sesuai dengan berita Cina dalam sejarah Dinasti Ming yang menyebutkan bahwa kaisar Ching-tsu setelah bertahta tahun 1403 mengadakan hubungan diplomatik dengan Jawa. Ia mengirimkan utusan-utusan kepada raja "bagian barat", tu-ma-pan, dan raja "bagian timur", Put-ling-ta-hah. Pada tahun 1405 Laksamana Cheng-ho memimpin armada utusan ke Jawa, dan pada tahun berikutnya kedua raja di Jawa saling berperang berakhir kekalahan raja bagian timur.

Berita tradisi menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit runtuh pada tahun Saka 1400 yang dinyatakan dengan candrasengkala : "sirna-ilang-kertaning-bhumi karena serangan dari Demak. Akan tetapi berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, pada waktu itu kerajaan Majapahit masih ada. Perlu dicatat bahwa pada tahun Saka 1400 terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya terhadap Bhre Kertabumi. Dalam peperangan tersebut Bhre Kertabumi gugur sehingga Ranawijaya menduduki tahta kerajaan."²²

Prasasti-prasasti dari Girindrawarddhana tahun Saka 1408 masih menyebutkan bahwa ia masih sebagai "Sri Maharaja ri Wilwatikta". Hal ini berarti bahwa pada tahun 1486 M kerajaan Majapahit masih berdiri. Kerajaan baru runtuh pada sekitar tahun 1519 M pada masa Pati Unus dari Demak menaklukkan Majapahit. Perlu dijelaskan bahwa keruntuhan Majapahit

terutama sekali disebabkan karena sudah lemahnya kerajaan akibat pertentangan, perpecahan antara keluarga raja-raja dalam perebutan kekuasaan. Sementara itu ketika itu ada perkembangan politik dan ekonomi di Asia Tenggara yang mempengaruhi daerah pesisir Utara Jawa yang disertai oleh perkembangan Islam yang sangat kuat pada awal abad XVI.

Dari uraian tentang masa kekuasaan dan kemunduran kerajaan Majapahit dapatlah dirangkum untuk diambil sebagai hikmahnya, bahwa:

a. Kejayaan Majapahit

Kejayaan Majapahit disebabkan oleh berbagai faktor yang satu sama lain saling berkaitan. Persatuan dan kesatuan antara penguasa dan rakyat untuk menuju pada kemakmuran dan keadilan telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang kuat. Sebagai kerajaan agraris maritim yang mempunyai wilayah seluruh Nusantara mustahil dapat kuat jika antara pusat dan daerah terjadi pertentangan.

Persatuan dan kesatuan di wilayah Majapahit terlihat di dalam sektor sosial, ekonomi, politik dan keagamaan. Landasan perekonomian Majapahit terletak pada sektor pertanian, pajak dan perdagangan. Dari data-data yang ada tergambar adanya usaha-usaha penguasa kerajaan untuk memajukan kehidupan rakyatnya.

Sistem pemerintahan dan birokrasi yang teratur dengan tidak meninggalkan asas musyawarah telah pula menjadi faktor pendukung yang memajukan kehidupan rakyatnya. Tidak dapat diabaikan pula adalah peranan kehidupan keagamaan dan kerukunan antar agama ketika itu.

b. Keruntuhan Majapahit

Dari data yang ada faktor yang mendorong melemahnya kerajaan Majapahit dan akhirnya membawa pada keruntuhannya adalah adanya disintegrasi. Perebutan kekuasaan dan pertentangan antar keluarga raja-raja Majapahit demi kepentingan sendiri-sendiri menyebabkan makin lemahnya kerajaan. Boleh dikatakan bahwa pada masa-masa akhir kerajaan Majapahit rasa persatuan dan kesatuan diantara keluarga kerajaan telah berkurang.

Sebagai penutup perlu dikemukakan bahwa peristiwa sejarah timbul tenggelamnya Majapahit dapat diambil hikmahnya untuk membangun dan menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia. Belajar sejarah masa lampau sangat diperlukan untuk membangun kehidupan di masa yang akan datang.

CATATAN

1. Riwayat pendirian Majapahit diuraikan panjang lebar dalam kitab Pararaton. Pada mulanya berupa hutan Terik : "ya ta mulaning anaruka alasih wong trik. Duk mahu tinaruka dening Madura, hana alapa kurang sangunipun ababad, amangan maja, kapahiten, sama dipun buncal antukipun araru maja punika. kasub yan wonten jaja dahat apahit rasanipun, singgih ta ingaran ing Majapahit". Artinya : "Inilah asal mula orang mendirikan desa di hutan Trik. Ketika desa dibuat oleh orang-orang Madura. ada orang yang lapar karena kurang bekalnya pada waktu ia menebang hutan, ia makan buah maja, merasa pahit, semua dibuanglah buah maja yang diambilnya itu. terkenal ada buah maja pahit rasanya, tempat itu lalu diberi nama Majapahit (Padmapuspita, 1966:32.76).
2. OJO LXXXIV. nagarakertagama pupuh I ;4 menyatakan bahwa Hayam Wuruk lahir pada tahun Saka 1256 (=1334 Masehi).
"Tahun Saka masa memanah surya (1256) beliau lahir untuk jadi narpati
Selama dalam kandungan di Kahuripan, telah tampak tanda keluhuran
Gempa bumi, kepul asap. hujan debu, guruh halilintar menyambar-nyambar
Gunung kampud gemuruh membunuh durjana, penjahat musnah dari negara"
Pararaton menyatakan bahwa Hayam Wuruk juga bernama Raden Tetep dan masih ada beberapa nama lain :
"Bhreng Kahuripan aputra titiga, mijil bhatara prabhu, kasirkasirira sri hayam Wuruk, Raden Tetep, jujulukira yen anapuk sira dalong Tritaraju, lamun amadoni sira Pager antimun, lamun awayang banol sira Gagak katawang, yen ring kasewan sira mpu janeswara, bhisekanira Sri Rajasanagara ..."
Artinya : "Sri Ratu di Kahuripan itu mempunyai tiga orang anak. ialah : batara prabu panggilannya Sri hayam Wuruk, raden Tetep. Sebutannya jika ia bermain kedok (topeng) dalang Tritaraju, jika ia bermain wayang dan melawak : Gagak Ketawang, di kalangan pemeluk agama Siwa : Mpu Janeswara, nama nobatannya Sri rajasanagara ..."
3. Periksa Sejarah Nasional Indonesia jilid II, 1984 : 435. Slamet Mulyana (1979) berpendapat bahwa penobatan Hayam Wuruk sebagai raja Majapahit, berlangsung pada tahun 1351 karena berdasarkan prasasti Singasari yang berangka tahun 1351 M pada waktu itu yang menjadi raja Majapahit masih Tribhuwanatunggadewi Maharajasa jayawisnuwardhani. Periksa juga J.L.A. Beschrij-ving van Tjandi Singasari en de wolkentooneelen van Panataran. 's-Grovenhage, 1909, hal, 38.

4. Perjalanan keliling raja Hayam Wuruk diuraikan dalam Nagarakertanegara pupuh XVII-LV. Sangat menarik dari uraian tersebut adalah penyebutan nama-nama desa yang dikunjungi seperti ; Wewe, Pikatan, Blitar, Jimur, Polaman, Kuwu, Lingga, Bangin, Surabaya, Buuren, Pajang, Lodaya, Tetu, Sideman, Lumajang, Japan, Kapulungan, Waru, Hering, Eatukiken, Matanjung, Ermanik, Kuker, Batang, Baya, Lempes, Wringin Tiga, Lo Pandak, Ranu Kuning, Balerah, Barebare, Dawuhan, dan masih banyak lagi.
5. Wilayah kekuasaan Majapahit yang luas diuraikan dalam Nagarakertagama pupuh XII-XIV. Pupuh XV menguraikan negara asing yang menjalani hubungan baik dengan Majapahit yaitu : Siam, Darmanagari, Marutma, Rajapura, Singanagari, Campa, Kamboja, Yawana, Syangka.
6. Nagarakertagama LXXXIX : 2.
7. Nagarakertagama LXXXVIII : 2,3. Periksa Slamet Mulyana, Nagarakertagama dan tafsir sejarahnya, Jakarta : Bhatara, 1979, hal. 317.
8. Ph. Subroto, "Sektor pertanian sebagai penyangga kehidupan perekonomian Majapahit", dalam Sartono Kartodirdjo dkk. 700 Tahun Majapahit (1293-1993) Suatu bunga Rampai. Surabaya : Diparda Prop. Jawa Timur, 1992, hal. 158.
9. OJO XCIV-XCV.
10. Misalnya prasasti Canggal 1280 S (=1358). Periksa OJO CXIX, *Piegaud, Java in the 14 Century : A Study in Cultural History*. Vol I. 1960, hal. 108-112; Boechari. *Prasasti Koleksi Museum Nasional I*. Jakarta : Proyek Pengembangan Museum Nasional, 1985/86, hal. 116-117; Machi Suhadi, *Tanah Sima dalam Masyarakat Majapahit*. Disertasi, Jakarta, 1993, hal. 582-590.
11. Djoko Dwiyanto dkk. *Pungutan Pajak dan Pembatasan Usaha di Jawa pada abad IX-XV Masehi*. Yogyakarta : Laporan Penelitian DPPM. UGM, 2002; juga Djoko Dwiyanto, Perpajakan pada masa Majapahit, dalam Sartono Kartodirdjo, dkk. *700 Tahun Majapahit (1293-1993) : Suatu Bunga Rampai*, 1993 : Hal 217-234.
12. Istilah mangilala drabya haji atau mangilala drwya haji dapat diartikan sebagai orang yang mengambil nafkah dari harta raja. (periksa Sedyawati) *Pengarcaan Ganesa Masa Kadiri dan Singasari*. Disertasi. 1985 : 343-347.

13. Putajenan diperkirakan 'kerja bakti' ; niribangan (=pajak pembuatan/penjualan bata), rarawuhan diartikan sebagai iuran perbaikan jalan. Periksa Machi Suhadi. 1993 : 43-
14. Nagarakertagama LXXV.
15. Bangunan candi peninggalan leluhur Hayam wuruk disebut dengan istilah 'Dharmma', 'suddharmma'. atau dhamma haji dan disebut ada 27 jumlahnya.
16. Tentang pelaksanaan upacara sradha ini diuraikan panjang lebar dalam kitab Nagarakertagama pupuh LXII : 2 sampai pupuh LXVII. Upacara Srada diselenggarakan selama 7 hari 7 malam.
17. Kitab hukum Kutara Manawa pernah diterbitkan oleh Dr. J.G.G. Jonker pada tahun 1885 dan disebut agama. Isinya terutama menyangkut Tindak Pidana. Lebih lanjut periksa Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta : Bhratara, 1967.
18. Periksa prasasti Canggal.
19. Periksa *Sejarah Nasional Indonesia II*. Dalam prasasti Tuhuanaru (1323 M) kerajaan Majapahit diumpamakan sebagai prasada dengan raja Jayanagara sebagai Wisnuwatara dan Rake Mapatih sebagai pranala, seluruh mondala Jawa dianggap sebagai punpunan, pulau Madura dan Tanjungpura dianggap sebagai ongsa-nya.
20. Dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk yang menjabat rakryan Mapatih amangkubhumi adalah Gajah Mada. Di dalam Nawanatya disebutkan tugas-tugas : rakryan tumenggung bertugas sebagai pengatur rumah tangga kerajaan, rakryan kanuruhan sebagai penghubung dan tugas protokoler, rakryan rangga sebagai pembantu panglima. Periksa Hasan Djafar, *Girindrawardhana : Beberapa Masalah Majapahit Akhir*. 1978, hL. 42-44.
21. Sumpah ini kemudian terkenal dengan 'sumpah palapa'. Dalam pararaton disebutkan bahwa setelah peristiwa Bubat Gajah Mada kemudian 'mukti palapa' yang diartikan sebagai 'menikmati istirahat'.
22. Berbagai pendapat telah disampaikan oleh para ahli berkenaan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Lebih lanjut periksa Hasan Jafar. 1978, hal. 91-95.

KERAJAAN MAJAPAHIT

TUMBUH DAN BERKEMBANG DALAM LINTASAN SEJARAH INDONESIA

Oleh : S. Pinardi

PENDAHULUAN

Kebesaran dan kejayaan Majapahit telah tercatat dalam perjalanan panjang sejarah peradaban bangsa Indonesia. Kerajaan tersebut mencapai puncaknya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan raja Hayam Wuruk. Saat itu kekuasaannya sangat besar dan berpengaruh luas di Nusantara, bahkan berpengaruh pula terhadap negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.

Sejarah mencatat bahwa setelah kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk, ternyata harus diakhiri dengan rapuh dan runtuhnya kerajaan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh sebab itu dalam tulisan ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya kerajaan Majapahit.

Seperti kerajaan-kerjaan sebelumnya, kerajaan Majapahit berdiri tidak secara kebetulan, tetapi dilatari oleh serangkaian peristiwa sejak gugurnya raja Krtanagara dan runtuhnya kerajaan Singhasari karena serangan Jayakatwang dari Glang-glang. Peristiwa-peristiwa tersebut dimuat dalam beberapa sumber antara lain di dalam prasasti Kudadu, prasasti Sukamrta, Kitab Pararaton, Kakawin Nagarakartagama, Kidung Panji Wijayakrama, Kidung Harsa-Wijaya, dan berita Cina dari dinasti Yuan.

Secara genealogis pendiri kerajaan Majapahit yang dikenal dengan nama Wijaya, masih mempunyai pertalian darah dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Wijaya adalah anak Dyah Lembu Tal, cucu Mahisa Campaka (Narasinghamurti), buyut Mahisa Wongateleng dan piut (canggah) Ken Arok-Ken Dedes. Perjalanan kariernya diawali dengan mengabdikan kepada raja Krtanagara sebagai komandan prajurit Singhasari yang dibuktikan dengan tugasnya saat menghadapi pasukan Jayakatwang saat menyerang Singhasari. Meskipun pasukannya mengalami kekalahan namun dia berhasil menyelamatkan keempat putri Krtanagara yang kemudian diambil sebagai istrinya. Keempat putri tersebut adalah cucu Wisnuwardhana, buyut Anusapati dan piut Tunggal Ametung-Ken Dedes. Dengan demikian baik Wijaya maupun keempat putri Krtanagara merupakan keturunan Ken Dedes.

Rupa-rupanya perkawinan semacam itu sering terjadi dalam sejarah Jawa Kuno. Salah satu faktor penyebabnya adalah untuk memperkokoh kedudukan raja. Perkawinan Wijaya dengan empat putri Krtanagara dapat diistilahkan "ngumpulke balung pisah" dan sekaligus dapat menghapus pertentangan batin antara keturunan Tunggul Ametung dan keturunan Ken Arok. Ternyata faktor asal usul dan perkawinannya dengan keempat putri Krtanagara sangat mendukung kelancaran kenaikan tahtanya, disamping keperkasannya menghadapi lawan-lawannya dan keberhasilannya membangun kerajaan Majapahit.

Mengenai nama Majapahit sebetulnya hanya dijumpai dalam Kitab Pararaton dan Sastra Kidung, kadang kala untuk menyesuaikan ikatan tembangnya disebut Wilwatikta atau Tiktawilwa. Dalam Nagarakrtagama tidak pernah disebut nama Majapahit. Nama yang disebut dalam kitab tersebut adalah Wilwatikta dan variasinya, yaitu Tiktawilwa, Tikta Cripkala (Nag.12.6), Cripkhalatikta (Nag.17:1), Tiktamalura (Nag.12:6). Berita Cina menyebut Majapahit dengan lafal Cina dari Fukien, yaitu Moa-tsia-pahl (groeneveldt.1960:46). Pada masa Hayam Wuruk (1350-1389) baik Wilwatikta maupun Majapahit dipakai bersama-sama.

Dalam kitab Pararaton dikisahkan bahwa nama Majapahit diambil dari peristiwa pada saat orang-orang Madura yang membantu Wijaya membuka hutan di Trik, mereka lapar dan dahaga, kemudian memakan buah maja yang ternyata rasanya pahit. Dari peristiwa itulah kemudian diabadikan menjadi nama Majapahit.

WIJAYA RAJA PERTAMA MAJAPAHIT

Prasasti Kudadu yang berangka tahun Saka 1216 (11 September 1294) dikeluarkan oleh Sri Maharaja Krtarajasa Jayawardhana (nama Wijaya setelah dinobatkan sebagai raja) berisi tentang penetapan desa Kudadu menjadi sima swatantra, sebagai anugerah sri maharaja kepada para rama di Kudadu. Penetapan tersebut didasarkan atas jasa-jasa yang diberikan oleh para rama di Kudadu kepada sri maharaja tatkala mereka melindungi sri maharaja dari kejaran musuh. Saat itu Wijaya belum menjadi raja, dan bernama Nararyya Sanggramawijaya.

Prasasti lain yang juga mengisahkan perjuangan Wijaya sebelum menjadi raja ialah prasasti Sukamrta yang berangka tahun Saka 1218 (29 Oktober 1296). Isi pokok prasasti tersebut adalah untuk memperingati penetapan daerah Sukamrta menjadi sima atas permohonan Panji Patipati Pu Kapat. Permohonan tersebut dikabulkan oleh raja Krtarajasa Jayawardhana karena Panji Patipati Pu Kapat telah memperlihatkan kesetiaan dan kebaktiannya yang luar biasa kepada raja, dengan ikut mengalami derita pada saat baginda raja harus mengungsi, melarikan diri dari kejaran musuh, masuk hutan, naik gunung, dan menyeberang sungai dan laut. Panji Patipati tidak berpisah dari sisinya, menjalankan perintah. Pada saat sri baginda

menyerang kembali musuhnya (Jayakatwang). Panji Patipati ikut juga. Itulah sebabnya sri baginda menganugerahkan sima kepada desa Sukamrta.

Sumber lain yang mengisahkan riwayat perjalanan hidup Wijaya adalah Kitab Pararaton, Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsa-Wijaya. Sumber-sumber tersebut secara panjang lebar menguraikan kisah Wijaya, meskipun dalam versi yang agak berbeda (Brandes,1920:Ber,1930 dan 1931).

Pararaton lebih lanjut menguraikan perjalanan Wijaya menyeberang ke Madura untuk meminta bantuan Arya Wiraraja. Kedatangan Wijaya ini disambut baik oleh Wiraraja, meskipun pada masa sebelumnya ia pernah dimutasikan oleh Krtanagara menjadi adipati di Sumenep Madura. Atas jaminan dan nasehat Wiraraja, maka Wijaya diberi daerah baru membuka hutan di Trik dengan bantuan orang-orang Madura. Dari sinilah Wijaya mempersiapkan diri untuk menyerang Jayakatwang. Atas nasehat Wiraraja, usaha penyerangan tersebut ditangguhkan sambil menunggu saat yang baik. Bersamaan waktunya, saat itu datanglah pasukan dari Mongolia (pasukannya Kubilai Khan) untuk menghukum raja Krtanagara yang telah menciderai utusannya. Pasukan tersebut dipimpin oleh Shih-pi, Ike Mese, dan Kau hsing. Mereka tidak tahu bahwa raja Krtanegara telah terbunuh karena serangan Jayakatwang. Atas nasehat Wiraraja, Wijaya bersekutu dengan tentara Mongolia untuk menghancurkan Jayakatwang (Groeneveldt,1960:20-30).

Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, kini giliran Wijaya untuk mengusir tentara Mongolia. Dengan berbagai tipu muslihat pasukan Mongolia dapat dihancurkan sehingga banyak yang terbunuh dan yang selamat dapat kembali ke negaranya.

Setelah mengalami berbagai proses perjuangan akhirnya Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Krtarajasa Jayawardhana. Beberapa sumber menyebut tentang penobatan tersebut namun terdapat sedikit perbedaan waktunya. Setelah melalui perhitungan dan penanggalan yang cermat maka para ahli berpendapat bahwa penobatan Wijaya sebagai raja Majapahit terjadi pada hari ke-15 bulan Kartika, tahun 1215 Saka atau sama dengan hari ke-12 bulan ke-11 tahun 1293 Masehi (Sartono,K..dkk,1993).

Setelah dinobatkan sebagai raja, ternyata Krtarajasa Jayawardhana memerintah penuh dengan perjuangan. Beberapa teman setianya waktu menghadapi Jayakatwang dan tentara Kubilai Khan ada yang tidak puas akan anugerah dan jabatan yang mereka terima. Ranggalawe yang direncanakan diangkat menjadi patih gagal dan akhirnya melawan (1295). Peristiwa tersebut dalam beberapa sumber disebut Paranggalawe. Wiraraja yang sedianya mendapat seperdua dari tanah Jawa, akhirnya tidak mau bekerjasama dengan Wijaya lagi. Tiga tahun setelah Paranggalawe terjadi Pasora. Dua tahun kemudian

terjadi Pajurudemung, dan masih ada peristiwa-peristiwa kecil yang menggoyahkan kekuasaan Krtarajasa Jayawardhana. Namun semua peristiwa tersebut dapat diselesaikan oleh Krtarajasa dan pengikut-pengikut setianya.

Meskipun Wijaya naik tahtanya secara genealogis cukup kuat, namun untuk memperkokoh kedudukannya, gelar yang disandangnya juga mencerminkan nama atau gelar pendahulu-pendahulunya. Gelar Krtarajasa Jayawardhana mengingatkan kita pada raja Krtanagara, Rajasa mengingatkan kita pada gelar Ken Arok yaitu Sri Ranggalah Rajasa Sang Amurwabhumi, Jaya mengingatkan kita pada Tohjaya, dan Wardhana mengingatkan kita pada Wisnuwardhana ayah Krtanagara. Hal semacam ini sering dilakukan oleh raja-raja Jawa Kuno.

Meskipun Krtarajasa Jayawardhana cukup lama memerintah (1293-1309 M), namun sampai saat ini baru empat buah prasastinya yang kita temukan. Pertama prasasti Kudadu 1216 Saka, kedua prasasti Sukamrta 1218 Saka. Ketiga prasasti Balawi 1227 Saka (Poerbatjaraka,1936), dan terakhir prasasti Adanadan 1223 Saka. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1992 (Soekarto.K.A.,1994)

Kitab Pararaton menyebut tahun kematian Krtarajasa 1267 Saka=1345 M dan didharmakan di Antapura, sedangkan Nagarakrtagama memberitakan Krtarajasa meninggal tahun 1231 Saka=1309 M didharmakan di Simping dengan sifat Siwaistis dan di Antapuran dengan sifat Budhistis (Nag.47:3).

MAJAPAHIT SEPENINGGAL WIJAYA

Pengganti Krtarajasa Jayawardhana adalah Jayanagara. Mengenai tokoh ini ada dua versi tentang asal usulnya. Dalam Nagarakrtagama pupuh:47 disebutkan bahwa Jayanagara adalah putra dari Indreswari dan telah diangkat menjadi yuwaraja (raja muda) di Kadiri tahun 1295. Sedangkan prasasti berangka tahun 1305 M memberitakan bahwa Jayanagara diangkat sebagai Tarunaraja di Dahanapura. Versi kedua menyebutkan bahwa Jayanagara yang dalam Pararaton disebut Kalagemet adalah anak Dara Petak, putri dari Malayu yang dibawa oleh pasukan Kertanagara sewaktu mengirinkan ekspedisi ke Malayu. Dalam Kidung Panji Wijayakrama disebutkan bahwa 10 hari setelah pengusiran tentara Mongolia, Hamisa Anabrang membawa pulang dua orang putri, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak. Lebih lanjut disebutkan "...Sanganwam inapti "(=yang muda di peristri (baginda)... Dara Jingga sira alaki dewa ..." (=Dara Jingga ia dikawini orang (yang bergelar) dewa". Kidung Panji Wijayakrama dan Pararaton juga menyebutkan "...dyah dara petak stri tinuheng pura...".

Dari beberapa sumber yang ada Kertarajasa Jayawardhana meninggalkan 1 orang anak putra dan 2 orang anak putri, yaitu Jayanagara, Tribhuwanatunggadewi dan Dyah Wiyah Rajadewi. Kedua putri tersebut keturunan dari Gayatri atau

Rajapatni. Pada saat Jayanagara dinobatkan sebagai raja tahun 1309 M. saat itu baru berusia sekitar 15 tahun. Putri Tribhuwanatunggadewi dan Dyah Wiyah Rajadewi tidak diizinkan berhubungan dengan pria lain karena Jayanagara bermaksud mengawininya. Jayanagara tewas setelah menjalani suatu "operasi" yang dilakukan oleh tabib kerajaan yang bernama Tanca (1328 M). Jayanagara diperkirakan mengeluarkan dua buah prasasti, yaitu prasasti yang tanpa angka tahun, menyebutkan tentang penumpasan pemberontakan di Blambangan tahun ± 1316 M yaitu pemberontakan Nambi. Prasasti kedua adalah prasasti Sidateka 1245 Saka = 1323 M, yang menyebut nama Cri Sundarapandyadewa yang ditafsirkan sebagai Jayanegara.

Setelah peristiwa Tanca (terbunuhnya Jayanagara) Tribhuwanatunggadewi kawin dengan Krtawardhana putra Cakradara. Dyah Wiyah Rajadewi kawin dengan raja Wengker, yaitu Wijayarajasa. Krtawardhana adalah keturunan Wisnuwardhana atau Panji Sminingrat dari Singhasari. Dengan demikian Tribhuwanatunggadewi dan Krtawardhana sama-sama keturunan Wisnuwardhana.

Menurut prasasti Brumbung 1329 M, Tribhuwanatunggadewi naik tahta setelah Jayanagara wafat, dengan gelar Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani. Dalam Nagarakrtagama pupuh:5 disebutkan bahwa Tribhuwanatunggadewi dan Wikramawardhana mempunyai tiga orang anak, yaitu Bhre Lasem dan Bhre Pajang, sedangkan satu-satunya anak laki-laki adalah Hayam Wuruk. Segera Hayam Wuruk dinobatkan sebagai raja dengan Tribhuwanatunggadewi sebagai "pengembannya". Dalam sebuah prasasti yang tidak diketahui angka tahunnya dan diperkirakan dari masa Tribhuwanatunggadewi, disebutkan bahwa Hayam Wuruk dinobatkan sebagai raja di Kahuripan (Jiwanarajyapratistha) dengan abhiseka Bhatara Cri Rajasanagara. Pada masa Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Rupa-rupanya hal ini tidak hanya berkat kekuatan yang dimiliki Hayam Wuruk tetapi telah dirintis sejak masa sebelumnya, serta peranan Mahapatih Gajah Mada yang sangat besar. Gagasan wawasan Nusantara yang dirintis raja-raja sebelumnya dapat terrealisasi pada masa itu. Pengaruh kekuasaan dan kerja sama Majapahit meluas sampai ke luar Nusantara. Kerja sama tersebut dilakukan dengan kerajaan-kerajaan kecil di Malaya, Siam, Ayuthia, Lagor, Singapura, Campa, Kamboja, Anam, India dan Cina.

PUNCAK KEJAYAAN MAJAPAHIT

Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada berhasil mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Kebesaran dan kejayaan suatu kerajaan sebenarnya merupakan dambaan setiap raja dan rakyatnya. Di daerah tropis umumnya dan Asia

Tenggara khususnya. di masa lampau dikenal adanya kepercayaan tentang kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos. antara jagat raya dan dunia manusia. Menurut konsep itu kemanusiaan itu senantiasa berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin dan pada bintang-bintang dan planet-planet. Tenaga-tenaga tersebut mungkin menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan atau berbuat kehancuran, bergantung pada dapat tidaknya individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat, terutama sekali negara, berhasil dalam menyelaraskan kehidupan dan kegiatan mereka dengan jagat raya. Keselarasan antara kerajaan dan jagat raya tadi, sebagai sebuah jagat raya dalam bentuk kecil (Geldem, 1982).

Hubungan antara kerajaan (negara) dengan jagat raya dapat dijumpai dalam berbagai sumber misalnya karya sastra kuno, prasasti, dalam gelar-gelar raja, permaisuri dan pejabat-pejabat, dalam jumlah "kosmis" dari permaisuri-permaisuri, menteri-menteri, dalam bagan susunan ibukota, dan candi-candi. Dalam konsep kosmogonis khususnya masa Jawa Kuno, keserasian dan kesejajaran antara mikrokosmos dan makrokosmos akan menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan. Dunia manusia harus diserasikan dengan dunia dewa. Oleh Sebab itu setiap raja selalu berusaha menyesuaikan susunan kerajaannya dengan susunan tempat dewa. Konsep tentang para dewa yang tinggal di puncak gunung atau meru, dan dipuncak tersebut bertahta dewa Indra sebagai pemimpin para dewa. Kota para dewa tersebut di setiap penjuru mata angin dijaga oleh dewa Lokapala atau dewa penjaga mata angin. Hal semacam ini tampaknya dilakukan pula dalam susunan suatu kerajaan. Kraton merupakan inti suatu kerajaan. Di kraton terdapat "kedaton" yang merupakan tempat tinggal yang sakral, sebagai inti dari kraton. Raja bertahta di tempat itu sebagaimana halnya dewa Indra bertahta di puncak Gunung Meru. Di sekitar kraton adalah tempat tinggal para keluarga raja, para rakai, para pamgat, dan para petawai kraton lainnya. Mereka tinggal tersebar di seluruh penjuru mata angin, seolah-olah penjaga mata angin kraton.

Seorang putra atau putri mahkota sebagai pengganti raja apabila raja mengundurkan diri atau meninggal, merupakan konsep raja yang ideal. Dengan demikian dalam sistem pemerintahan yang bersifat kerajaan, calon pengganti raja sudah tampak sebelumnya. Dalam sejarah Majapahit hal semacam itu juga telah dilakukan. Semasa pemerintahan Krtarajasa Jayawardhana, putranya yaitu Jayanagara telah dinobatkan sebagai Yuwaraja dalam tahun 1295 M. Demikian halnya Hayam Wuruk yang diembani oleh Tribhuwanantunggadewi. Dalam negara atau kerajaan yang bersifat kosmis menganut konsep yang sangat kuat tentang kedudukan raja yang dipercayai bersifat dewa. Dalam Nagarakrtagama disebutkan bahwa semua adalah titisan dewa. Lebih khusus disebutkan bahwa raja Hayam Wuruk atau Rajasanagara, sebagai dibuktikan dengan

berbagai pertanda di saat kelahirannya, antara lain dengan peristiwa letusan Gunung Kampud (Kelud), adalah titisan Bhatara Girinatha, yaitu dewa Ciwa sebagai "raja gunung".

Raja sebagai gambaran dari konsepsi kosmologis sering dianggap sebagai titisan dewa. Teori tentang penitisan dewa di masa lampau dapat dipakai tidak saja sebagai alat untuk meninggikan posisi dari raja yang syah, tetapi juga sebagai pembenaran atau pengesahan dalam merampas tahta kerajaan. Hal semacam inilah yang sangat berpengaruh terhadap proses-proses suksesi di masa Jawa Kuno (Pinardi,1995). Di masa-masa berikutnya khususnya di Jawa, kedudukan raja sering diabsahkan dengan membuktikan "kesinambungan". Hubungan entah darah, entah pengalaman yang serupa dengan seorang raja pendahulu yang agung, memungkinkan seorang seseorang ikut tersinari oleh "aurora" (=sinar keagungan). Disamping itu yang lebih penting dan merupakan mata rantai adalah: "trahing kusuma, rembesing madu, wijining tapa, tedaking andana warih" (=turunan bunga, tirisan madu, benih petapa, turunan mulia), adalah ciri-ciri turunan leluhur yang agung dan tak bemoda (Moertono,1985). Ciri-ciri tersebut tampaknya juga dimiliki oleh Hayam Wuruk dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dari segi institusi kerajaan, raja adalah pemegang kekuasaan yang dilembagakan. Dengan demikian raja berhak mengeluarkan perintah, membuat peraturan, serta rakyat hendaknya patuh terhadap segala hal yang dilakukan raja. Di samping itu raja juga mempunyai wewenang tradisional dan kharismatik. Di sisi lain raja juga dituntut bersikap dan bertindak adil dan bijaksana. Seorang raja akan mendapat kepercayaan dari rakyatnya bila raja berwibawa, raja titisan dewa, dan raja melaksanakan dharmanya. Kewibawaan seorang raja lebih ditentukan oleh sikap dan tindakannya yang adil dan bijaksana. Nagarakrtagama pupuh:73 disebutkan bahwa prabhu Hayam Wuruk berusaha keras untuk dapat bertindak dengan bijaksana. Dalam menjalankan pengadilan orang tidak boleh bertindak sembarangan, harus patuh mengikuti segala apa yang telah dinyatakan dalam kitab perundang-undangan yang berlaku. Para pelaksana pengadilan tidak boleh berpihak, harus bertindak secara adil. Hanya dengan jalan demikian maka kesejahteraan rakyat akan tercapai. Itulah sebabnya seorang pemuda perkasa yang kemudian lebih dikenal dengan nama Gajah Mada sepenuh hatinya mengabdikan dirinya kepada raja Hayam Wuruk.

Berbicara tentang kejayaan Majapahit, orang selalu ingat nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Sayangnya mengenai tokoh yang satu ini masih misterius asal usulnya. Muhammad Yamin dalam bukunya Gajah Mada mengatakan: "ahli sejarah tidak dapat menyusun hari lahirnya dengan pasti; ibu bapa dan keluarga tidak mendapat perhatian kenang-kenangan riwayat, begitu juga nama desa tempat dia dilahirkan dilupakan saja oleh penulis keropak zaman dahulu. Asal usul Gajah Mada semuanya dilupakan dengan lalim oleh sejarah" (M. Yamin,1986).

Awal dari karier Gajah Mada adalah menjadi kepala prajurit. Dalam tahun 1319 di istana Majapahit Gajah Mada menduduki jabatan Bayangkara di saat pemerintahan Jayanagara. Ia berhasil memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Wijaya yang kurang puas terhadap Wijaya. Keberhasilan Gajah Mada menumpas pemberontakan di samping keperkasaannya juga didorong rasa bakti dan pengabdiaannya terhadap negara dan rajanya. Pada tahun 1313 M, Gajah Mada menjadi patih mangkubumi Majapahit. Mulai saat itu Gajah Mada mengembangkan sayapnya dan membeberkan haluan politiknya. Wilayah kerajaan Majapahit meluas tidak hanya meliputi pulau Jawa. Namun dalam kenyataannya tidak semua usaha Gajah Mada berhasil gemilang. Sekurang-kurangnya peristiwa Pabubat merupakan pukulan yang hebat bagi dirinya. Namun semangat mempersatukan Nusantara tidak kunjung padam, sehingga muncul sumpahnya yang lebih dikenal dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Banyak penafsiran arti kata Palapa ini, tetapi yang jelas ini merupakan suatu tekad Gajah Mada untuk mencapai cita-citanya mempersatukan Nusantara di bawah panji-panji Majapahit. Sebenarnya gagasan penyatuan wilayah ini telah dirintis oleh raja-raja sebelumnya, misalnya Krtanagara dari Singhasari dengan usaha-usahanya mengirimkan ekspedisinya ke Pamalayu, Bali dan sebagainya. Secara konseptual tindakan tersebut merupakan penjabaran dari konsep kosmogonis yang telah diuraikan di atas.

Kitab Nagarakrtagama banyak membeberkan daerah-daerah atau wilayah yang ada di bawah panji-panji Majapahit, membentang dari Lamuri di Aceh hingga Seram di Irian Jaya, dari Buruneng (Brunei) hingga Timur di Pulau Timor. Begitu banyak dan luasnya wilayah tersebut menimbulkan keraguan di kalangan beberapa ahli, bahkan kebesaran Majapahit itu dianggap sebagai suatu mitos (C. Berg, 1951). Di sisi lain daerah-daerah yang disebut dalam pupuh: 13 dan 14 Nagarakrtagama tersebut diterima sebagai fakta historis, termasuk negara-negara yang disebut sebagai "Mitraka satata". Penelitian-penelitian baik dari segi kebahasaan maupun arkeologis akan mendukung pendapat tersebut.

Kebesaran Majapahit ternyata mengilhami para pemimpin pergerakan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa yang pada akhirnya mendorong cita-cita politik untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Majapahit seperti yang dipaparkan dalam Nagarakrtagama, meliputi wilayah atau teritori yang luas. Wilayah tersebut disebut Nusantara, Dwipantara, Desantara, yang terdiri atas delapan satuan Mandala. Secara sederhana kedelapan Mandala tersebut adalah : (1)Jawa, (2)Sumatra, (3)Kalimanta, (4)Semenajung Malayu, (5)Nusa Tenggara, (6)Sulawesi, (7)Maluku. (8)Irian Jaya (H. Mustopo, 1993).

Hal yang lebih penting dalam mengidentifikasi daerah-daerah tersebut bukan benar dan tidaknya nama daerah di mana Majapahit melaksanakan pemerintahan secara intensif. melainkan daftar suatu daerah di bawah penguasa setempat yang mengakui keadulatan Majapahit.

Mengenai penggunaan istilah Nusantara dalam beberapa sumber tertulis memang tidak perlu disangsikan lagi. Beberapa prasasti dari masa sebelum Majapahit sudah menyebutnya. Istilah Nusantara digunakan berdampingan dengan istilah Dwipantara dan Desantara. Prasasti Kamalagyan dari masa raja Airlangga menyebutkan bahwa dengan dibangunnya bendungan Wringin Sapta, maka senanglah hati para pedagang, para nahkoda kapal dari Dwipantara (antar pulau) pergi ke hulu mengambil barang dagangan dengan perahu ke Hujung Galuh suatu pelabuhan sungai waktu itu.

Nusantara sebagai istilah satuan kepulauan terdapat juga dalam kitab Pararaton, yang berhubungan dengan Sumpah Amukti Palapa Mahapatih Gajah Mada. Sumpah Palapa yang menyiratkan aspek politik tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah dan bahasa, khususnya mengenai penafsiran arti kata amukti palapa tersebut.

Cukup menarik kiranya untuk dikenang bahwa para penggerak kemerdekaan di abad XX ini dengan sadar menggunakan sejarah kerajaan Majapahit sebagai wahana untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan patriotisme. Bahkan sekitar tahun dua puluhan sejumlah tokoh pergerakan nasional merujuk kepada kebesaran wilayah Majapahit untuk membangun cita-cita persatuan Indonesia.

Sejarah telah mencatat bahwa kebesaran Majapahit akhirnya berangsur-angsur pudar seolah-olah mengikuti lenyapnya tokoh penyatuan wilayah Mahapatih Gajah Mada. Meskipun demikian perlu dicatat bahwa surutnya Majapahit tidak hanya faktor meninggalnya Gajah Mada, tetapi faktor-faktor lain ikut berperan khususnya perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan.

Raja Hayam Wuruk telah menyadari bahwa tidak mudah mencari tokoh pengganti Gajah Mada. Ada satu langkah yang ditempuhnya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan dibentuknya suatu lembaga semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang lebih dikenal dengan Pahom Narendra atau Sapta Prabhu, yang sebenarnya dewan beranggotakan lima orang kerabat kerajaan termasuk raja. Pada masa Hayam Wuruk anggota dewan tersebut berkembang menjadi tujuh orang. Bahkan dalam Nagarakrtagama pupuh:71-72 : anggota dewan tersebut bertambah menjadi sembilan orang.

Langkah yang ditempuh Hayam Wuruk ini sekaligus sebagai bukti bahwa ia seorang raja yang bijaksana sekaligus demokratis, karena semua keputusan tidak lagi menjadi monopoli raja. Sayang sekali kejayaan Majapahit yang begitu besar akhirnya berangsur pudar dengan diwarnai perang saudara yang berkepanjangan.

Sebagai penutup dari tulisan ini, perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat Jawa Kuno tidak menghendaki adanya konflik, baik konflik terselubung maupun terbuka. Terlebih lagi penjabaran konsep kosmologis dalam suatu pemerintahan yang berlandaskan kesejajaran dan kesejajaran antara mikro dan makrokosmos, antara raja dan kerajaan, dan antara raja dengan rakyat. Seorang raja dituntut berlaku adil dan bijaksana sesuai dengan dharmanya, begitu pula rakyat dituntut untuk mampu melaksanakan segala keputusan raja sebagai manifestasi dari konsep kesejajaran tersebut. Kalau dalam kenyataan kehidupan ini sering terjadi konflik atau pemberontakan, kemungkinan diakibatkan adanya pertimbangan kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merapuhkan persatuan dan kesatuan.

Mari kita ambil hikmah dari sejarah Majapahit ini untuk memupuk rasa cinta tanah air, rasa persatuan dan kesatuan untuk menuju ke masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, C.C. 1951. "De Sadeng Oorlog en de mythe van groot Majapahit. Indonesia. 5. hlm.385-442.
- Brandes,J.L.A. 1920, Pararaton (Ken Arok) Het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit, VBG. 49.
- Gelderen,R.von Heine. 1982, Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara, terjemahan Deliar Noer, Jakarta:C.V.Rajawali.
- Moertono Soemarsaid,1985, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, seri terjemahan, Jakarta:Yayasan Obor.
- Mustopo Habib,M. 1993, "Teritori Majapahit Raya", Simposium Peringatan 700 Tahun Majapahit, Mojokerto.
- Pegeaud,Th.G.Th. 1960, Java in the Fourteenth Century, vol:1-2.
- Pinardi Slamet. 1990/1991. Posisi Wanita Jawa Kuno Dalam Suksesi Abad X-XV Masehi, Laporan Penelitian, Fakultas Sastra UGM.
- , 1992/1993, Wanita Dalam Pandangan Hukum Majapahit, Laporan Penelitian, Fakultas Sastra UGM.
- , 1994/1995, Ungkapan dan Kiasan Dalam Masyarakat Jawa Kuno Tinjauan Dari Segi Sejarah Politik, Seni Sastra, dan Simbolisnya. Laporan Penelitian, Fakultas Sastra UGM.
- , 1995. Bayang-bayang Konsep Kepemimpinan Jawa Kuno. Makalah Seminar Bulanan Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan sosial UGM.
- Slamet Muljana. 1979. Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta:Balai Pustaka.
- Suryo, Djoko (edt). 1995. Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Pulau Jawa Abad VIII-XX, Diparda Prop. Jatim-Fakultas Sastra UGM.
- Yamin, Muhammad. 1986, Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, Jakarta:Balai Pustaka, cetakan:X.

BAB IV
KERAJAAN MATARAM ISLAM

KERAJAAN MATARAM ISLAM
DARI DISINTEGRASI KE DISINTEGRASI

Oleh : G. Moedjanto

PENGANTAR

Makalah ini mencoba membahas integrasi pada jaman Mataram. Mengingat integrasi pada jaman itu terutama diciptakan oleh Sultan Agung, maka pembahasan perihal integrasi akan difokuskan pada jaman Sultan Agung memerintah (1613-1646). Persoalan yang menjadi fokus pembicaraan adalah corak integrasi yang berhasil diciptakan oleh Sultan Agung dan makna dari integrasi itu bagi integrasi nasional pada jaman sekarang.

Akan tetapi, demi jelas dan utuhnya uraian, maka dalam makalah ini akan disoroti juga beberapa hal lain yang saya pandang relevan. Maka dari itu, hal-hal yang akan diuraikan dalam makalah ini adalah :

1. Pengertian konsep integrasi;
2. Konsep kekuasaan raja menurut budaya Mataram;
3. Tekad Sultan Agung;
4. Pertumbuhan Mataram dari hutan menjadi kemaharajaan;
5. Ekspansi Mataram pada jaman Sultan Agung;
6. Corak integrasi mataram pada jaman Sultan Agung;
7. Cara Mataram memelihara integrasi;
8. Kegagalan Mataram memelihara integrasi;
9. Makna integrasi pada jaman Mataram bagi integrasi nasional pada jaman sekarang.

Untuk mengawali uraian, baiklah kita bicarakan dulu pengertian konsep integrasi.

PENGERTIAN INTEGRASI

Konsep yang populer pada jaman sekarang adalah integrasi nasional. Tetapi sebenarnya dikenal juga integrasi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di samping itu dikenal pula integrasi vertikal (elite-massa) dan horisontal (teritorial), integrasi statis dan integrasi dinamis.

Untuk tidak terperangkap dalam kebingungan istilah, baiklah kita tinjau makna integrasi terlebih dahulu, bertumpu pada uraian D. Hendropuspito OC dalam bukunya *Sosiologi Sistematis*¹. Menurut Hendro integrasi berasal dari kata latin *integrare*, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata itu turunlah kata :

- a. integritas, yang berarti keutuhan atau kebulatan;
- b. integrasi yang berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
- c. integrasi sosial, yang berarti membuat masyarakat menjadi keseluruhan yang bulat dan utuh.

Istilah integrasi sosial sering disinonimkan dengan kohesi sosial, solidaritas sosial, keharmonisan sosial dan keseimbangan sosial.

Muatan esensial dari integrasi ada dua, yaitu :

- a. unsur Material;
- b. unsur Formal.

Adapun unsur material adalah :

1. Adanya sejumlah kelompok etnis dan/atau kelompok kepentingan yang berlainan, yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang relatif berdekatan.
2. Adanya sejumlah satuan sosio-budaya yang heterogen. Heterogenitas itu tidak dapat dipisahkan dengan heterogenitas etnis tersebut di atas, baik dari segi kualitas rasial maupun kualitas kemajuannya. Kategori sosio-budaya ini meliputi unsur-unsur terpenting bahasa, agama dan ideologi.
3. Adanya kesamaan dalam heterogenitas yang terjadi karena faktor pengalaman historis, atau karena kesamaan faktor geografis, flora dan fauna, terutama pengalaman nasib yang sama, misalnya penjajahan yang mereka alami bersama pada masa lampau.

¹ Tinjauan sosiologis tentang integrasi dapat dibaca pada d. Hendro Puspito OC. *Sosiologi Sistematis*. Kanisius. Yogyakarta 1989. p. 375 - 396.

Sedangkan unsur formalnya adalah :

1. Kerangka (struktur) penempatan nilai-nilai sosio-budaya secara garis besar, sehingga kebutuhan kultural semua pihak yang bersangkutan diharapkan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
2. Pembagian hak dan kewajiban (wewenang dan beban) secara garis besar dalam peraturan umum kesatuan baru tersebut sehingga semua pihak dapat mengetahui dengan jelas batas-batas kompetensi masing-masing dan bagian hasil yang dapat diharapkan dari kerjasama itu.
3. Konsensus tentang kesempatan untuk ikut ambil bagian secara *de jure* dan *de facto* dalam kegiatan (fungsi) masyarakat besar yang dibangun bersama.
4. Dalam masyarakat hasil integrasi yang terdiri dari suku-suku (ras) yang berbeda warna kulit, perlu adanya konsensus yang mengatur pemberian hak yang sama kepada semua suku untuk berperan serta dalam kegiatan umum non-pemerintahan.

Menurut Hendro, ada faktor pendukung dan penghambat integrasi. Faktor pendukung integrasi adalah :

1. Pembinaan akan kesadaran dan partisipasi.
2. Pelaksanaan asas keadilan sosial dan asas subsidiaritas.
3. Pengawasan sosial secara intensif dan persuasif.
4. Tekanan dari luar.
5. Bahasa persatuan.
6. Lambang kesatuan.

Sedangkan faktor penghambat integrasi adalah :

1. Kesombongan rasial.
2. Kesombongan kultural.
3. Fanatisme agama.
4. Semangat kedaerahan atau daerahisme (propinsialisme).
5. Ketidakserasian hubungan mayoritas-minoritas.

Kecuali konsep integrasi terdapat dalam sosiologi, konsep itu juga terdapat dalam disiplin politik. Uraian tentang integrasi dalam disiplin politik bertumpu pada buku *Integrasi Politik di Indonesia*² karya Nazaruddin Sjamsuddin. Menurut Nazar, integrasi politik berdimensi : vertikal dan horisontal. Integrasi vertikal bila proses pembersatupaduan itu bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elite dan massa dalam rangka suatu proses pembangunan politik terpadu dan masyarakat yang berpartisipasi. Sedangkan integrasi horisontal, yang disebut juga teritorial, adalah proses pembersatupaduan dengan tujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen.

Dalam integrasi politik, maka yang diintegrasikan perbedaan-perbedaan yang ada pada kelompok yang berpengaruh dan yang dipengaruhi. Dalam integrasi teritorial, wilayahlah yang dipersatukan.

Integrasi politik memunculkan dua masalah :

1. Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara?
2. Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, strategi yang mungkin adalah :

1. Asimilasi;
2. Persatuan dalam keanekaragaman.

Yang dimaksudkan dengan strategi asimilasi adalah dijadikannya kebudayaan suku yang dominan dalam suatu negara sebagai kebudayaan nasional, sehingga identitas golongan minoritas ditundukkan dibawah identitas atau kebudayaan golongan yang dominan itu. Sedangkan strategi persatuan dalam keanekaragaman mengisyaratkan bahwa pembentukan kesetiaan nasional dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas.

KONSEP KEKUASAAN RAJA MENURUT BUDAYA MATARAM

Untuk memahami masalah integrasi pada jaman Mataram perlulah kiranya kita ingat kembali konsep kekuasaan raja Mataram yang pernah saya populerkan sebagai konsep kekuasaan Jawa atau doktrin keagungbinataran³. Menurut doktrin

² Tinjauan politis tentang integrasi dapat dibaca pada Nazarudin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*. Gramedia, Jakarta, 1989, p. 1-8

³ Silakan membaca G. Moedjanto. *The Concept of Power in Javanese Culture*, Gadjahmada University Press. Yogyakarta 1993, p. 102-108. Juga G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Kanisius, Yogyakarta, 1994, terutama p. 77-100

itu kekuasaan raja Mataram begitu besar. sehingga rakyat mengakui raja sebagai pemilik segala sesuatu, baik yang berupa benda maupun hidup manusia. Karena itu terhadap kemauan raja, rakyat hanya dapat *dherek karsa dalem* (terserah kepada kehendak raja). Kalau sekarang ada kedaulatan rakyat, maka di Mataram dikenal daulat tuanku (kedaulatan raja). Kekuasaan raja yang demikian besar itu dikatakan *wenang wisesa ing sanegari* (berwenang tertinggi di seluruh negeri). Dalam pewayangan wewenang yang besar itu biasanya disebut *gung binathara, bau dhendha nyakrawati* (sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia).

Tetapi itulah baru separo muatan konsep kekuasaan Jawa. Budaya Mataram mengajarkan bahwa terhadap kekuasaan raja yang besar itu terletak pula kewajiban dan tanggungjawab yang besar. Itulah yang termuat dalam kalimat yang berbunyi *ber budi bawa leksana, ambeg adil para marta* (meluap budi luhur mulia dan sifat adilnya terhadap yang hidup).

Menurut budaya Mataram raja yang baik adalah raja yang sanggup menjalankan kekuasaannya dalam keseimbangan antara kewenangannya yang besar dengan kewajibannya yang besar pula. Kekuasaannya yang besar dan kewajibannya yang seimbang merupakan isi dari konsep kekuasaan Jawa atau konsep kekuasaan menurut budaya Mataram. Itulah yang dinamakan doktrin keagungbinatharaan.

Menyebutkan konsep kekuasaan hanya sepotong yang di depan dapat menyesatkan, karena orang dapat melupakan kelanjutannya yang esensial, yaitu *ber budi bawa leksana ambeg adil para marta*. Sifat itu tidak mengurangi besarnya kekuasaan raja, melainkan mengimbangnya. Raja tidak hanya berhak menghukum, tetapi juga wajib memberi ganjaran. Kecuali itu raja juga menjalankan sebagai salah satu tanggungjawabnya, *nyjaga tata tentreming praja* (menjaga keteraturan dan ketentraman hidup rakyat).

Jikalau kekuasaan raja itu besar, apa yang menjadi tolok ukurnya? Dapat dikemukakan sebagai tanda kekuasaan raja yang besar adalah sebagai berikut :

1. Wilayah kerajaan yang sangat luas;
2. Wilayah jajahannya yang sangat luas;
3. Kesetiaan para bupati dan pembesar lain seperti nampak dalam paseban (audiensi);
4. Kecemerlangan upacara kenegaraan;
5. Banyaknya prajurit yang dimiliki lengkap dengan persenjataannya;
6. Gelar-gelar yang disandang dan kemashurannya ke seluruh jagad;
7. Seluruh kekuasaan negara ada ditangannya.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa raja yang mempunyai keunggulan dapat menjadi yang besar.

TEKAD SULTAN AGUNG

Untuk mengetahui betapa besar tekad Sultan Agung untuk menjadi raja dengan kekuasaan besar, kita dapat menyimak sejak kenaikannya di atas tahta. Menurut Babad Susuhunan Anyakrawati mempersiapkan R.R. Wuryah atau Martapura menjadi penggantinya. Jadi dialah yang sebenarnya diangkat menjadi putera mahkota. Tetapi setelah Anyakrawati mangkat, bukan Wuryah yang menggantikannya di atas tahta, melainkan R.M. Jetmika atau Rangsang yang bergelar Susuhunan Anyakrakusuma, dan terkenal dengan sebutan Sultan Agung⁴. Meski demikian, kita dapat memperoleh petunjuk kalau Anyakrawati berusaha menepati janjinya dengan mengangkat Wuryah sebagai raja untuk waktu yang sangat sebentar, dan kemudian meletakkan jabatan serta mengundurkan diri untuk menjadi panembahan saja. Mengapa Anyakrawati mengatur demikian? Babad menceritakan bahwa ia menerima wangsit (firman) kalau Jetmika ditakdirkan menjadi raja besar.

Untuk menjaga agar pendukung Wuryah tidak melawan keputusan itu, maka sesepuh Mataram yang memaklumkan penobatan Jetmika menjadi raja, menantang mereka yang hendak melawan.

Berita dari Babad memancing pertanyaan, benarkah Anyakrawati memutuskan untuk mengubah hak warisnya? Saya cenderung untuk menyatakan bahwa Sultan Agung memang merebut tahta dari saudaranya. Bagaimana hal itu dijelaskan? Pada waktu Anyakrawati mangkat pada tahun 1613 Jetmika berusia 20 tahun, sedangkan Wuryah 8 tahun. Usia 20 tahun merupakan usia yang masak bagi seorang pangeran untuk menjadi raja. Dalam usia itu Jetmika pasti sudah banyak belajar dan berpengalaman. Karena itu ketika ayahnya mangkat, ia dipastikan sudah memikirkan kemungkinan untuk merebut tahta dari saudaranya yang baru berusia 8 tahun. Demi kejayaan Mataram klim (*claim*)-nya atas tahta Mataram mendukungnya. Apa lagi hukum adat waris dinasti Mataram yang keturunan petani itu belum mapan. Ia dapat meyakinkan warga dinasti Mataram bahwa ia mempunyai hak yang sama untuk menjadi raja, maka dialah yang menggantikan ayahnya.

Namun agar rasa keadilan masyarakat tidak terganggu, maka suatu tindakan untuk legitimasi harus direkayasa. Legitimasi itu antara lain dilakukan dengan memanfaatkan pujangga kraton. Satu diantaranya adalah dengan mengarang cerita bahwa kenaikannya di atas tahta bukanlah kehendaknya, melainkan karena ayahnya. Dengan perkataan lain para

⁴ Tentang kenaikan Sultan Agung di atas tahta yang mengisyaratkan untuk menjadi raja besar, periksa G. Moedjanto. *Konsep* p. 30-31. Juga H.J. de Graaf. *Puncak Kekuasaan Mataram Politik Ekspansi Sultan Agung*. Grafitipers. Jakarta. 1986. p. 27 - 28.

pujangga kraton merekayasa sebuah kisah bahwa Anyakrawati meninggalkan testamen politik yang menetapkan bahwa Jetmikalah yang dapat membangun Mataram menjadi kerajaan besar.

Untuk lebih meyakinkan rakyat bahwa dirinyalah yang pantas menjadi raja, maka diumumkanlah bahwa Wuryah sakit ingatan. Mataram tidak pantas diperintah oleh raja gila. Sebaliknya, Mataram memerlukan orang kuat yang siap memikul tanggungjawab pemerintah. Itulah Jetmika yang lebih dikenal sebagai Sultan Agung.

Pada waktu Sultan Agung naik tahta, Mataram memang menghadapi banyak tantangan. Diantaranya adalah perlawanan para bupati yang pada jaman Pajang berkedudukan sama dengan petinggi Mataram, yaitu sebagai bawahan atau vassal dari kerajaan Pajang. Tantangan lain yang tidak kalah beratnya adalah VOC yang sedang mengembangkan kekuasaannya di Indonesia.

Masih ada satu faktor lagi yang membuat Jetmika lebih layak untuk menjadi raja, yaitu silsilahnya. Jetmika adalah putra Anyakrawati dilahirkan Ratu Tulung Ayu dari Panaraga. Dalam pandangan Mataram, Jetmika lebih memenuhi *trahing kusuma rembesing madu* dari pada Wuryah. Bagi dinasti Mataram trah Pajang dinilai lebih berbobot dari pada trah Demak.

Dari petikan kenaikan Sultan Agung dapat kita simak betapa ia mempunyai ambisi untuk menjadi raja besar. Gambaran raja besar seperti terpotret pada konsep kekuasaan Jawa pasti berpengaruh dalam dirinya. Dengan perkataan lain, sejak awal nampaklah Sultan Agung sudah mengarahkan langkahnya untuk menjadi raja yang *gung binathara*. Wangsit yang diterima ayahnya bahwa dialah yang harus menggantikannya karena ia akan menjadi raja besar hanyalah rekayasa yang menunjukkan ambisinya. Suatu keberuntungan bahwa ia memang berhasil mengembangkan Mataram menjadi kerajaan besar.

PERTUMBUHAN KERAJAAN MATARAM

Awal kerajaan Mataram dapat diruntut pada awal kerajaan Pajang. Dalam perjuangannya menghadapi pesaingnya, Arya Penangsang yang bupati Jipang, Adiwijaya memerlukan bantuan Pemanahan dan Penjawi. Dengan siasat yang cerdas Penangsang dapat dikalahkan. Dengan begitu Pajang beralih status dari kadipaten bawahan Demak menjadi kerajaan yang membawahkan Demak. Menghargai jasa Pemanahan dan Penjawi, Adiwijaya menghadiahkan daerah Mataram, yang kala itu telah kembali menjadi hutan sesudah lama menjadi pusat kerajaan Mataram Hindu, dan Pati yang sudah berupa negeri

(kadipaten). Pemanahan membangun Mataram dengan *babad alas* (membuka hutan) untuk mengubahnya menjadi pedukuhan (pemukiman) yang kemudian berkembang menjadi sebuah kadipaten⁵.

Selama Pemanahan masih hidup Mataram menjadi kadipaten bawahan Pajang. Pemanahan menunjukkan sikap setianya kepada Adiwijaya. Akan tetapi setelah Pemanahan meninggal pada tahun 1586, Mataram mulai memperlihatkan sikap *mbalela* (memberontak). Senapati yang menggantikan Pemanahan memperkuat kratonnya di Kotagede dengan benteng dari bata. Ia menghimpun para bupati dari daerah barat : Bagelen, Purwareja, Kedu, dan Banyumas untuk menjadi bawahannya. Senapati berhasil memaksa bupati-bupati daerah barat untuk tidak menghadap Adiwijaya dan menyerahkan upeti kepadanya, melainkan kepada dirinya. Senapati sendiri kemudian tidak mau menghadap Adiwijaya. Maka terjadilah perang antara Mataram melawan Pajang, dan yang tersebut akhir kalah. Demi tidak mengganggu rasa keadilan rakyat, maka direkayasa cerita bahwa yang mengalahkan pasukan Pajang bukan Mataram, melainkan pasukan makhluk halus yang dikirimkan Ratu Kidul untuk membantu Senapati, yang menurut babad telah berhasil menjadikannya istri.¹

Dengan jatuhnya Pajang, maka berubahlah status Mataram. Semula adalah kadipaten bawahan Pajang, maka kini ia membawahkan Pajang. Perubahan status itu tidak dengan sendirinya diterima oleh para bupati dari daerah yang dahulu bawahan Pajang. Pusat-pusat kekuasaan itu menganggap Mataram tidak lebih dari kadipaten-kadipaten seperti pada masa Pajang. Karena itu hanya dengan memerangi mereka Mataram dapat diterima sebagai negara yang membawahkannya. Bahkan diantara mereka terdapat daerah Mangir di Bantul yang boleh disebut desa, melawan Mataram di bawah Ki Ageng Mangir. Hanya dengan tipu muslihat Senapati dapat mengalahkan Mangir.⁷

Para bupati melakukan perlawanan terhadap Senapati juga karena ia merebut kekuasaan dari Pajang dengan kekerasan. Maka mereka berpikir haknya pulalah untuk melawan dengan kekerasan.

EKSPANSI MATARAM PADA JAMAN SULTAN AGUNG

Dalam sejarahnya Mataram selalu terlibat dalam perang melawan kabupaten-kabupaten yang mencoba mempertahankan kebebasan. Kadang kabupaten yang sudah berhasil ditundukkan Mataram mencoba untuk melepaskan diri

⁵ Tentang pembangunan Mataram oleh Pemanahan, periksa H.J. de Graaf. *Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati*, terjemahan, Grafitipers. Jakarta. 1985, p. 38-54

⁶ Tentang jatuhnya Pajang periksa *Ibid.*, p. 80-89. Juga H.J. Meinsma (ed.). *Babad Tanah Djawi*, s Gravanhage, 1941, p. 87.

⁷ Tentang jatuhnya Mangir, periksa G. Moedjanto. *The Concept* p. 151

kalau mereka melihat sedikit peluang saja. misalnya kenaikan tahta yang baru. Tidak terlewatkan kenaikan tahta Sultan Agung pun diramaikan dengan perang. Para bupati dari daerah timur nampaknya ingin menguji keteguhan Sultan Agung. Mereka membentuk persekutuan dibawah pimpinan bupati Surabaya. Dalam tahun 1615 mereka mencoba menyerbu Mataram. tetapi dapat dipukul mundur.

Mulai tahun 1615 itu Sultan Agung harus terus berperang untuk menaklukkan kembali para bupati yang dahulu pernah tunduk di bawah Mataram. atau ia harus mengadakan ekspedisi baru untuk menaklukkan bupati yang belum tunduk kepada Mataram. Ia pun mencoba untuk menanamkan kekuasaan atau setidaknya-tidaknya di berbagai daerah luar Jawa, seperti Palembang, Jambi, Sukadana, Banjarmasin dan Makasar. Doktrin keagungbinatharaan tidak memperkenankan adanya pesaing. Maka Sultan Agung pun berusaha untuk menundukkan Banten dan VOC di Jakarta yang ternyata tidak berhasil.

Ekspansi Mataram di bawah Sultan Agung dapat dibaca seluruhnya dalam buku *Puncak Kekuasaan Mataram Politik Ekspansi Sultan Agung* terjemahan dan buku *De Regering van Sultan Agung. Vorst van Mataram. 1613-1645* karya H.J. de Graaf.⁸ Lewat berbagai ekspedisi, Mataram berhasil menguasai daerah yang sangat luas.

Tidak semua daerah dapat ditundukkan dengan mudah dan tidak sekali serbu suatu kabupaten menyerah. Penaklukan Surabaya. misalnya, memerlukan serbuan 6 kali dari tahun 1620 sampai 1625. Kesibukan tentara Mataram menyerbu Surabaya membuat bupati Pragola dari Pati memberontak pada tahun 1624 dan Mataram baru dapat memadamkannya pada tahun 1627. Raja Pendeta Giri juga tidak mau tunduk kepada Mataram begitu saja. Untuk itu pasukan Mataram dikirim ke sana dalam tahun 1635-1636, dengan memanfaatkan Pangeran Pekik yang sudah takut untuk memimpin serbuan.

Menarik perhatian juga adalah ekspedisi Mataram untuk menundukkan Balambangan. Usaha untuk menundukkan Balambangan sudah dimulai pada tahun 1625. tetapi belum membawa hasil. Mungkin disebabkan kesibukan Mataram menghadapi Pati dan kemudian VOC di Batavia. Ekspedisi kedua secara besar-besaran diselenggarakan dalam tahun 1635 yang juga belum berhasil. Ekspedisi dikirim beberapa kali sesudahnya dan baru berhasil menundukkan Balambangan pada tahun 1640.

Ekspedisi besar-besaran lainnya dikirim oleh Mataram adalah ke Batavia dalam tahun 1628 dan diulang tahun 1629 yang keduanya mengalami kegagalan.

Secara keseluruhan dapat kita periksa sejauh mana Mataram berhasil menanamkan kekuasaannya di Jawa. Jelas seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah dapat ditundukkan oleh Mataram. Sebagian Jawa Barat yang disebut Pasundan, Ukur,

⁸ Graaf. Puncak terutama bab IV. VII. XII. XVI

Galuh, Sumedang dan Karawang tunduk kepada Mataram. yang luput dari jangkauan Mataram adalah Batavia dan Banten. Sedangkan luar Jawa, seperti sudah disinggung di depan, Mataram mempunyai pengaruh di Jambi, Palembang, Sukadana, Banjarmasin dan mungkin juga Makasar.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah : Bagaimana corak integrasi pada jaman Mataram tersebut ?

CORAK INTEGRASI MATARAM PADA JAMAN SULTAN AGUNG

Kalau konsep integrasi seperti dikemukakan oleh Hendropuspito dan Nazaruddin diterapkan untuk mengkaji integrasi pada jaman Mataram (Sultan Agung) nampaknya cukup sulit. Konsep integrasi yang mereka kemukakan menyangkut masalah sekarang. Karena itu konsep mereka hanya dapat dipakai untuk mengkaji integrasi pada jaman Mataram dengan sejumlah modifikasi. Bahkan istilah integrasi saja mungkin perlu ditaruh dalam tanda kutip menjadi "integrasi".

Jikalau Mataram dapat dipandang sebagai suatu kelompok kepentingan berhadapan dengan kabupaten-kabupaten sebagai kelompok kepentingan yang lain, maka kita dapat mencoba untuk memeriksa esensi material dan formal dari kelompok-kelompok kepentingan itu.

Kita mulai dengan memeriksa esensi material dari "integrasi" pada jaman Mataram sebagai berikut :

1. Di Jawa memang terdapat beberapa kelompok etnis, yaitu Madura, Jawa, Sunda serta sedikit kelompok Arab, Cina dan Keling. Bila konsep kelompok kepentingan yang dipakai, dan bukan kelompok etnis, maka etnis Jawa masih dapat dibagi menjadi lebih banyak kelompok, misalnya Mataram, Pajang, Pati, Surabaya, Madiun dan Balambangan. Dengan demikian tuntutan adanya heterogenitas kepentingan kelompok dan juga etnis terpenuhi.
2. Dengan memperhatikan heterogenitas dalam butir satu, maka didapati juga heterogenitas sosio-budaya. Kita dapat menarik garis pemisah yang tajam dalam konsep budaya maritim-pesisir berhadapan dengan budaya agraris-pedalaman, yang tersebut di depan cenderung pada Islam murni, sedang yang tersebut kemudian cenderung pada Islam Jawa.
3. Berbagai kelompok kepentingan di luar Mataram memiliki kesamaan heterogenitas mereka, karena sama-sama menjadi "vassal" dari kelompok kepentingan Mataram. Hubungan Mataram dengan kabupaten bawahan bersifat subordinatif-feodalistik (antara Sultan dan bupati ada semacam kontrak feodal : Sultan mengangkat bupati sebagai vassal, bupati

memberikan upeti dan bantuan militer yang diperlukan). Dengan demikian kesamaan hanya ada pada bupati-bupati bawahan Mataram. Dan Mataram merupakan kelompok kepentingan yang berada di atas kabupaten-kabupaten.

Bagaimana halnya dengan esensi formalnya? Dapat dicoba memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Kerangka penempatan nilai-nilai sosio-budaya tentu diarahkan untuk melayani kepentingan Mataram, bukan untuk memenuhi kebutuhan kultural semua pihak secara sama dan sebangun.
2. Pembagian hak dan kewajiban antar berbagai kelompok kepentingan tetap didasarkan atas kepentingan Mataram.
3. Konsensus tentang kepentingan bersama tidak ada. Keputusan diambil oleh Mataram sebagai kelompok kepentingan dominan, sementara kabupaten-kabupaten sebagai kelompok kepentingan yang wajib menaatinya.
4. Konsensus yang menetapkan pemberian hak yang sama kepada semua kelompok kepentingan untuk berperan serta dalam kegiatan non-pemerintahan tidak terberitakan.

Dari keterangan di atas nampaklah bahwa tidak semua unsur esensial integrasi sosiologis terpenuhi baik secara formal maupun material. Tetapi sebagian tuntutan esensi integrasi memang terlihat pada relasi antara Mataram sebagai suatu kelompok kepentingan dominan dengan kabupaten-kabupaten sebagai kelompok kepentingan bawahan. Dengan kata lain sampai derajat tertentu integrasi pada jaman Mataram memang ada.

Bagaimana corak integrasi Mataram dipandang dari segi politik? Bila integrasi dimaksudkan sebagai sarana untuk menjembatani elite dan massa, maka pada jaman Mataram integrasi politik corak itu tidak ada. Dalam lingkup Mataram aslipun integrasi derajat itu tidak ada. Lain halnya dengan integrasi teritorial. Mataram berusaha untuk mempersatupadukan daerah-daerah, istimewa di Jawa, menjadi suatu kemaharajaan atau kekaisaran. Sebuah sumber Belanda memberitakan sebutan *de Keyser van Mataram*⁹ untuk Sultan Agung.

Bagaimana Mataram membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara? Dalam budaya politik kiranya Mataram menggunakan strategi asimilasi menurut Nazaruddin, yaitu dijadikannya kebudayaan kelompok kepentingan dominan menjadi kebudayaan seluruh kelompok kepentingan. Akan tetapi dalam hal budaya politik nampaknya ada kesamaan antara Mataram dan kabupaten-kabupaten, karena sama-sama mewarisi atau meniru budaya politik dari kerajaan-kerajaan pendahulu, yaitu Pajang, Demak dan Majapahit. Dan memang ada tanda bahwa kabupaten merupakan *replica* atau *duplicaat* dari kerajaan atasan. Sesuai dengan doktrin keagungbinatharaan, maka konsensus tidak ada. Peran serta anggota

⁹ Ibid p. 32. 102 dan 121

masyarakat, yang dalam masa Mataram disebut *kawulo dalem* (abdi raja), mengikuti perintah raja, karena raja adalah perwujudan konkret dari negara.

Dengan gambaran di atas secara politik dapat dikatakan bahwa pada jaman Mataram, sampai tingkat tertentu, ada integrasi yang tentunya berbeda dengan derajat integrasi pada jaman sekarang.

Persoalan yang kemudian muncul : bagaimana Mataram memelihara integrasi?

BAGAIMANA MATARAM MEMELIHARA INTEGRASI ?

Seberapa pun derajat atau corak integrasi dapat dicapai oleh kerajaan Mataram pada jaman Sultan Agung, pastilah integrasi itu pantas dipelihara. Ada sejumlah cara yang dapat dikemukakan untuk memelihara integrasi itu.

Pertama, pengembangan birokrasi.¹⁰ Betapapun sederhana Mataram telah mengembangkan suatu birokrasi yang cukup rumit. Pada tingkat pusat kita dapati berbagai macam jabatan dengan urusannya, seperti patih, wedana, bupati. Di bawahnya masih terdapat sekitar 150 macam jabatan yang lebih rendah, menyangkut kepamongpraajaan, keprajuritan, pengadilan, keuangan, perlengkapan, kesenian, keagamaan. Dalam kaitan dengan integrasi daerah, besarlah peranan patih dan wedana jawi.

Kedua, lewat sejenis kontrak feodal di Eropa. Dengan cara itu Sultan Agung menetapkan seseorang menjadi bupati di suatu daerah, dan sebaliknya, bupati itu mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu kepada Sultan Agung, misalnya pembayaran upeti, keikutsertaan dalam ekspedisi militer. Contohnya bila Mataram menyerbu ke arah timur, maka bupati-bupati dari daerah timur dengan tentaranya wajib bergabung dengan tentara Mataram.¹¹

Ketiga, dengan politik perkawinan atau perkawinan politik.¹² Untuk mengikat bupati-bupati Sultan Agung memberikan *triman* kepada mereka, mungkin berupa adik perempuan atau putrinya. Contoh yang terkenal adalah perkawinan Ratu Pandansari, adik Sultan Agung, dengan Pangeran Pekik, bupati Surabaya. Puteri yang diterimakan dapat sekaligus memata-matai suaminya.

¹⁰ Tentang birokrasi Mataram periksa Moedjanto. Konsep p. 111-117. Juga Sutrisno Kutoyo dkk., Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek Depdikbud, Jakarta. 1976/77, p. 89-98.

¹¹ Contoh jelas dari masa pemerintahan Sultang Agung adalah penugasan Pangeran Pekik untuk memimpin ekspedisi penaklukan atas Giri pada tahun 1635 - 1636. Periksa Graaf, Puncak p. 220-224. Penyerbuan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 - dan 1629 menyertakan pasukan dari kabupaten-kabupaten pesisir kulon dan Jawa Barat, seperti Ukur dan Sumedang. Periksa Ibid, terutama p. 1150-160.

¹² Tentang perkawinan politik, periksa Moedjanto. The Concept p. 128-129, dan Konsep p. 129-145

Keempat, penempatan bupati-bupati penting di Mataram.¹³ Pangeran Pekik termasuk yang harus tinggal di Mataram. Begitu juga bupati Madura, Cakraningrat. Alasan resminya adalah sebagai "staf" ahli yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya. Tetapi diperkirakan juga untuk mengawasi gerak-geriknya.

Kelima, dinas rahasia, yang disebut *telik sandi* atau *abdi kajineman*.¹⁴ Mereka bertugas memata-matai gerak-gerik para pembesar di Mataram sendiri maupun para bupati di daerah-daerah.

Keenam, pengembangan etika¹⁵. Dalam bahasa Jawa kita kenal *piwulang* atau ajaran perilaku, misalnya setia kepada raja.

Ketujuh, agama Islam sebagai media integrasi. Prabu Anyakrakusuma mengirim utusan ke Mekkah untuk memperoleh gelar Sultan (1639-1641). Hal itu dilakukan untuk mempertinggi martabatnya di kalangan para bupati yang juga beragama Islam.¹⁶

Kedelapan, ekspedisi militer.¹⁷ Untuk menjaga integrasi wilayah, Sultan Agung mengirinkan ekspedisi militer untuk menindak bupati yang *mbalela*.

Demikianlah berbagai cara untuk memelihara integrasi pada jaman Mataram. Ancaman terhadap integrasi itu begitu sering, sehingga sejarah Mataram penuh dengan peperangan. Karena itu memberi kesan orang Jawa itu suka perang. Ricklefs menyebut orang Jawa itu *martial in spirit* alias manusia berjiwa (penggemar) perang.¹⁸

Selama Sultan Agung, raja terbesar Mataram berkuasa, integrasi itu dapat dipertahankan, tetapi belum dapat tumbuh secara alamiah. Maka sepeeninggal Sultan Agung disintegrasi segera menyusul.

¹³ Keberadaan Pekik, bupati Surabaya, dan Cakraningrat, bupati Sampang (Madura) di Mataram, periksa Graaf, Puncak p. 220 dan 92.

¹⁴ Tentang penugasan telik sandi atau kajineman, periksa kecepatan Amangkurat I membongkar komplotan Pangeran Alit untuk menjatuhkannya, periksa Ibid p. 27-34.

¹⁵ Soal piwulang, periksa Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, misalnya p. 49-52.

¹⁶ Tentang pemakaian gelar Sultan untuk meninggikan kewibawaan Sultan Agung di kalangan masyarakat Islam, periksa Graaf, Puncak p. 272-276. Juga Moedjanto, The Concept p. 130-131.

¹⁷ Contohnya ekspedisi ke Pati, 1627, periksa Graaf, Puncak p. 139-147. Buku-buku de Graaf tentang Sultan Agung dan Amangkurat I bercerita banyak tentang ekspedisi militer. Kekuatan militer memang merupakan dasar politik kemaharajaan (basis of imperial politics) seperti ditulis M.C. Ricklefs dalam War, Culture and Economy in Jawa, 1677-1726, Allen & Unwin, Sydney, 1993, p. 13.

¹⁸ Ricklefs, op. cit., p. 8.

DISINTEGRASI MATARAM

Sultan Agung mangkat. menurut de Graaf. mungkin awal Pebruari 1646 (dalam berbagai buku sejarah tercatat tahun 1645). Putera dan penggantinya adalah R.M. Sayidin yang sebagai raja bergelar Amangkurat I. Sudah sejak awal pemerintahannya proses disintegrasi itu mulai.¹⁹

Peristiwa pertama dari proses itu yang penting adalah pertikaianya dengan adiknya sendiri, Pangeran Alit. Oleh karena hasutan sekelompok punggawa yang tidak senang atas Amangkurat I, Pangeran Alit mencoba merebut tahta dari tangan kakaknya. Alit dan pendukungnya dibunuh.

Amangkurat I menduga keberanian Alit melawan didukung oleh para ulama, karena itu raja kemudian membunuh sekitar 5 sampai 6 ribu ulama yang dicurigai.

Suatu hal yang mungkin luar biasa adalah seringkali terjadinya pembunuhan atas punggawa kerajaan baik yang ada di lingkungan kraton maupun para bupati. Kadang-kadang yang dibunuh masih famili dekat Amangkurat I sendiri atau mertuanya.

Berbagai pembunuhan itu tentu melemahkan Mataram dan berpengaruh atas integrasi kerajaan yang dengan susah payah dibangun oleh ayahnya, Sultan Agung. Ketidaksetiaan para bupati, misalnya, nampak dari perilaku 4 bupati pesisir terkemuka : Semarang, Demak, Pati dan Jepara. Perilaku mereka tidak dapat dikontrol oleh Sunan. Dan perilaku 4 bupati itu kemudian ditiru oleh banyak bupati lain.

Suatu hal yang luar biasa pula bahwa Sunan Mangkurat I terlibat pertentangan dengan puteranya sendiri, Pangeran Rahmat atau Adipati Anom, calon Amangkurat II. Pertentangan itu berkaitan dengan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Raja atas Pangeran Pekik dan istrinya Ratu Pandan, adik Sultan Agung (jadi bibi raja). Dalam penentangannya Pangeran Adipati Anom bersekutu dengan Pangeran atau Panembahan Kajoran, mertua Trunajaya. Karena Kajoran merasa sudah tua, ia tidak mampu membantu Pangeran Adipati Anom. Diseyogyakakan agar ia bekerjasama dengan menantunya itu. Trunajaya menerima tawaran Adipati Anom. Akan tetapi ternyata Trunajaya bergerak melawan Sunan bukan untuk mendukung niat Adipati Anom, melainkan untuk kepentingannya sendiri. Maka meletuslah pergolakan, yang dalam pandangan Mataram, disebut pemberontakan Trunajaya. Pemberontakan itu begitu hebat, sehingga seluruh keluarga Mataram, termasuk Sunan sendiri harus mengungsi ke barat, maksudnya untuk mendapatkan bantuan VOC. Dalam pengungsian itu Sunan mangkat.

¹⁹ Disintegrasi Mataram dibawah Amangkurat I. periksa Graaf. Disintegrasi dan Runtuhnya Juga Ricklefs. op. cit.. p. 30-44

Untuk menghadapi Trunajaya Amangkurat I memerintahkan Adipati Anom kembali untuk merebut kraton. Tetapi ia menolak. Puger, adiknya menyanggupi. Sebelum merebut Mataram, di Jenar ia menobatkan diri menjadi raja dengan sebutan Susuhunan Ing Ngalaga. Ia dengan pendukungnya berhasil merebut Plered dan bertahta sementara di situ.

Adipati Anom semula tidak ingin menjadi raja. Akan tetapi niat itu kemudian berubah. Ia memutuskan untuk mengalahkan Trunajaya dan menjadi raja dengan dukungan VOC. Untuk itu terpaksa ia menandatangani perjanjian Jepara, 1667, yang mengurangi kedaulatan dan wilayah Mataram, suatu bagian dari proses disintegrasi Mataram pula. Trunajaya memang berhasil dikalahkan, begitu pula Puger dapat dipersatukan. Akan tetapi Mataram terlanjur makin lemah.

Kelemahan itu berlanjut terus pada masa-masa kemudian, karena setiap pergantian tahta selalu diancam oleh perang saudara. Atau seringkali terjadi pemberontakan yang dilancarkan oleh bupati yang tidak puas dengan penguasa Mataram. Setiap kali menghadapi pergolakan Mataram selalu memerlukan bantuan VOC, dan untuk memperoleh bantuan itu Mataram harus membayar dengan perjanjian-perjanjian yang merugikan. Serentetan perjanjian itu adalah : Perjanjian Semarang 1705 (Puger atau Paku Buwono I), Kartasura 1743 dan 1746 (Paku Buwono II), 1749 (Paku Buwono II), serta perjanjian Ganti (1755) dan Salatiga (1757).²⁰ Lewat berbagai proses disintegrasi itu bukan saja daerah Mataram menjadi terpecah-belah, tetapi statusnya pun berubah dari kerajaan berdaulat menjadi kerajaan bawahan VOC.

MAKNA INTEGRASI PADA JAMAN MATARAM BAGI INTEGRASI NASIONAL PADA JAMAN SEKARANG

Paragraf terakhir dari makalah ini mencoba mempersoalkan apa makna integrasi pada jaman Mataram untuk integrasi nasional pada jaman sekarang. Untuk menjawab persoalan itu perlu kita ingat kembali bahwa sejarah adalah mata rantai proses yang berkesinambungan. Atau proses yang terdiri dari begitu banyak mata rantai yang berkesinambungan.

Integrasi pada jaman Mataram merupakan hasil dari ekspansi Mataram yang sebagian besar diperoleh dengan kekuatan memaksa. Selama Mataram memiliki kekuatan itu, selama itu integrasi terpelihara. Jadi integrasi Mataram itu sebenarnya berawal dari kondisi disintegrasi. Akan tetapi dalam kenyataannya berlanjut atau berakhir dengan disintegrasi pula.

²⁰ Disintegrasi Mataram sampai 1755, periksa Moedjanto, *The Concept* p. 36-51. Juga Sutrisno Kutoyo, *op. cit.*, p. 89

Namun demikian dalam kurun waktu integrasi itu telah terjadi pendekatan berbagai daerah yang menyatu karena dibawahkan oleh Mataram dan itu membantu integrasi pada masa kemudian. Pendekatan daerah berdampak terjadinya pendekatan sosio-kultural. Berbagai kelompok kepentingan dan kebudayaan lokal mendekat secara kohesif.²¹

Bagaimana kaitannya dengan negara bangsa Indonesia pada jaman sekarang? Negara bangsa Indonesia merupakan hasil proses integrasi orang Indonesia dari berbagai suku dan daerah serta begitu banyak kelompok kepentingan yang makan waktu lama dan melewati berbagai batu ujian yang sulit.

Integrasi pada jaman Mataram merupakan salah satu mata rantai dari proses integrasi bangsa Indonesia tersebut di atas. Lewat peranan sejarahnya pada masa lampau, bukan saja terjadi pendekatan sosial, politik, ekonomi dan kultural, tetapi juga teritorial.

Menurut penilaian saya integrasi pada jaman Mataram itu memainkan peranan positif, betapapun kecilnya, bagi proses integrasi nasional pada jaman sekarang.

²¹ Sartono menyebut ada dampak integrasi sosio-kultural dalam jangka panjang. periksa bukunya. op. cit., p. 129. Juga de Graaf menyebut adanya infiltrasi kultural dari Surabaya ke pedalaman berkat jasa Pangeran Pekik. periksa Graaf. Puncak p. 219.

KEPUSTAKAAN

- Graaf. H.J. de. *Awal Kebangkitan Mataram* (Terjemahan). Grafitipers, Jakarta. 1985.
- , *Puncak Kekuasaan Mataram Politik Ekspansi Sultan Agung*, (Terjemahan), Grafitipers, Jakarta. 1986.
- , *Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I*, (Terjemahan), Grafitipers, Jakarta. 1987.
- , *Runtuhnya Istana Mataram* (Terjemahan), Grafitipers, Jakarta, 1987.
- Hendropuspito, OC.D, *Sosiologi Sistematis*. Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Meinsma, J.H. (ed.), *Babad Tanah Djawi*. s Gravenhage. 1941
- Moedjanto, G., *The Concept of Power in Javanese Culture*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1993.
- , *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Kanisius. Yogyakarta, 1994.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Gramedia. Jakarta, 1989.
- Ricklefs, M.C., *War, Culture and Economy in Java, 1677-1726*. Allen & Unwin, Sydney, 1993.
- Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, I. Gramedia, Jakarta. 1987.
- Soemarsaid Moertono. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sutrisno Kutoyo dkk.. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Proyek Depdikbud., Jakarta. 1976/77.

PRAHARA MENEMBUS TAHTA MATARAM

Oleh : Ahmad Adaby Darban

Prahara menghembus Tahta Mataram adalah sebuah studi sejarah lokal¹ yang berusaha mengungkapkan adanya konflik antara Ulama dengan Raja, pada zaman Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Amangkurat I, tahun 1645-1677. Permasalahan yang muncul dalam konflik itu bermula dari adanya perubahan kebijaksanaan di dalam pemerintahan Mataram. Perubahan kebijaksanaan dalam kendali kekuasaan dari Sultan Agung, kepada kekuasaan pemerintahan Sunan Amangkurat I. Di dalam perubahan kebijaksanaan pemerintahan itu ternyata membawa dampak di dalam beberapa bidang, antara lain : bidang keagamaan; bidang hubungan luar negeri dengan pihak VOC; dan bidang hubungan dalam negeri, termasuk dengan kerabat keraton dan pola pemerintahannya.

Khusus dalam makalah ini dibicarakan tentang perubahan kebijaksanaan pemerintah Mataram sejak dipegang oleh Amangkurat I terhadap bidang keagamaan. Namun, tidaklah dapat dihindarkan adanya dampak dari bidang lain masuk di dalamnya sebagai ilustrasi dan memperjelas permasalahannya. Sebelum Mataram di bawah pemerintahan Amangkurat I, kedudukan Ulama mendapat tempat di dalam birokrasi kerajaan, yang berfungsi sebagai penasihat raja dan menangani masalah-masalah keagamaan. Hubungan Ulama dan Raja terjalin harmonis, para Ulama menunjukkan loyalitas yang baik, sebaliknya raja menghargai para ulama sebagai orang yang mempunyai moral yang tinggi dan pengetahuan agama yang mumpuni. Namun, setelah Mataram diperintah oleh Amangkurat I, kedudukan dan fungsi ulama dihapuskan, perkembangan agama Islam dibatasi. Di samping itu pada pemerintahan Amangkurat I dengan tegas melarang campur tangan agama di dalam kerajaan Mataram.

Adanya kebijaksanaan Amangkurat I di atas terhadap agama Islam, serta penghapusan kedudukan dan fungsi para ulama di dalam birokrasi kerajaan Mataram, maka menimbulkan hubungan yang tidak harmonis lagi antara raja dan ulama. Hubungan yang tidak harmonis itu ternyata meningkat menjadi suatu permusuhan. Dengan adanya dukungan pihak lain yang

¹ Mengenai penulisan sejarah lokal ini penulis mempergunakan pedoman dari : Taufik Abdullah; Sejarah Lokal di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjahmada University Press: 1979), h. 1-28. F.A. Sutjipto. "Beberapa Tinjauan Singkat Tentang Konsep Sedjarah Lokal". Soeri Soeroto. "Penulisan Sejarah Lokal": Pemikiran Tentang Kemungkinan Pelaksanaannya. H.P.R. Finberg & V.H.T. Skipp. Lokal History: Obyektive and Pursuit. (Newton Abbot: David Charles. 1973), h. 25-44.

juga bermusuhan dengan raja itu. maka terjadilah meningkat menjadi perlawanan fisik ulama terhadap raja. Di dalam perlawanan itu, tahta kerajaan Mataram sempat digoyahkan oleh pasukan Kyai Kajoran dan sekutunya, Amangkurat I terpaksa turun tahta, melarikan diri minta bantuan VOC. namun meninggal dunia di perjalanan.

Bentuk studi sejarah yang diuraikan dalam makalah ini adalah bentuk studi sejarah sosial², yaitu berusaha dengan menggunakan pendekatan sosiologis, untuk mengungkap hubungan ulama dengan raja, baik dalam struktur birokrasi kerajaan, maupun dalam bidang keagamaan. Disamping itu berusaha pula melihat hubungan ulama dengan masyarakat pada umumnya, yang selanjutnya melihat fungsi ulama sebagai key person serta informal leader bagi masyarakat. Dengan demikian, maka terjadinya perlawanan ulama kepada raja yang didukung oleh masyarakat pada waktu itu dapat terungkap sebab-sebabnya.

Dalam penulisan makalah ini disamping menggunakan pendekatan sosiologis, juga menggunakan metode sejarah kritis³, yaitu dengan melaksanakan seleksi dan kritik sumber. Dengan melakukan seleksi dan kritik terhadap sumber itu, diharapkan penulisan ini akan dapat mempergunakan sumber-sumber yang tergolong autentik dan kredibel.

Ruang lingkup penulisan makalah ini meliputi dua segi, pertama ialah ruang lingkup spasial, yaitu meliputi wilayah kerajaan Mataram, disebagian Pulau Jawa. Yang kedua ruang lingkup temporal, yaitu sejak tahun 1645 sampai dengan tahun 1677, atau lebih dikenal zaman Mataram di bawah pemerintahan Amangkurat I.

Walaupun permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah termasuk kategori sejarah lokal, namun mempunyai arti di dalam sejarah nasional. Hubungan peristiwa yang dibahas dalam makalah ini dengan sejarah nasional adalah :

1. Perlawanan Ulama terhadap Raja merupakan suatu pergerakan sosial yang membawa dampak nasional, sebagaimana pergerakan-pergerakan sosial di daerah lain seluruh kawasan Indonesia.
2. Peristiwa yang dibahas dalam makalah ini, pada akhirnya berakibat terbukanya hubungan persahabatan antara Mataram dan VOC, yang lebih lanjut masuknya ekspansi VOC di wilayah kerajaan Mataram.

² Robert K. Merton. "Structural Analysis in Sociology" dan James S Coleman. "Social Structure and Theory of Action". dalam Peter M Blau (ed.). Approaches to the Study of Social Structure. (London: Open Books Publishing Ltd., 1978), h. 21-35 & 76-94. W.F. Wertheim. "Sociological Approach". dalam Soedjatmoko (ed.). An Introduction to Indonesian Historiography. (New York: Cornell University Press, 1965). h. 344-358.. Harry J Benda: "The Structure of South East Asia History". dalam Journal of South East Asia History. No. III. 1962: Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif. (Jakarta: PT. Gramedia, 1982). h. 72-74.

³ Louis Gottschalk. Mengerti Sejarah. Pengantar Metode Sejarah. terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), h. 103-113.

Dan persoalan di atas mainstream yang mengkaitkan peristiwa Prahara Menghembus Tahta Mataram yang dibahas dalam makalah ini. dengan Sejarah Nasional.

Untuk memudahkan uraian dalam makalah ini. maka penulis menyusun secara sistimatis dalam bagian-bagian seperti di bawah ini.

Bagian I. adalah Pendahuluan. yang berisikan permasalahan; lingkup penulisan; pendekatan yang dipergunakan dan metode. Pada bagaian II, diuraikan tentang selintas birokrasi Mataram; dan hubungan raja dengan Ulama di kerajaan Mataram. Bagian III. diuraikan gambaran pemerintahan Amangkurat I, termasuk di dalamnya ada kebijaksanaan yang dijalankannya. Bagaian IV, adalah membicarakan perlawanan Kyai Kajoran terhadap Amangkurat I, termasuk di dalamnya adalah perlawanan sekutu Kyai Kajoran. Pada bagain V, adalah kesimpulan.

HUBUNGAN RAJA DAN ULAMA DI KERAJAAN MATARAM

Di dalam lingkungan kerajaan Mataram, raja sebagai kepala pemerintahan, mempunyai status rangkap juga sebagai pemuka agama Islam. Bahkan raja Mataram menganggap dirinya sebagai makhluk yang derajatnya di atas manusia biasa⁴, hal ini dapat ditilik adanya gelar Kalifatullah, yang artinya wakil Tuhan di dunia. Namun dalam pelaksanaan kekuasaannya, raja lebih banyak bertindak sebagai pemimpin birokrasi pemerintahan, sedangkan yang banyak menangani bidang keagamaan adalah para ulama.

Ada tiga type ulama yang hidup pada zaman kerajaan Mataram, yaitu pertama, type ulama yang masih berdarah bangsawan; kedua. type ulama yang berkedudukan sebagai alat birokrasi (abdi dalem); dan ketiga ulama pedesaan yang tidak menjadi alat birokrasi.⁵ Pada type pertama yaitu ulama yang masih berdarah bangsawan ini terjadi adanya perkawinan antara golongan ulama dengan puteri bangsawan, atau seorang bangsawan dengan puteri ulama. Hal ini memungkinkan adanya ulama dengan gelar bangsawan. Termasuk type ini ialah Raden Kajoran, keluarga Kajoran yang pertama yaitu Pangeran Raden Ing Kajoran telah kawin dengan Raden Ayu Wangsacipto (puteri dari Panembahan Senopati). Dari

⁴ L.W.C. Van den Berg. "De Mohammedaansche Voosten in Nederlandsch India" dalam BKI, LIII (1901), h. 5

⁵ F.A. Sutjipto, Pemimpin Agama di Wilayah Kerajaan Mataram. (Naskah Proyek Penelitian Lembaga Research Kebudayaan Nasional), h. 21-25.

perkawinan ini tujuh orang anak. anak yang ketiga ialah Pangeran Kajoran Ambalik (Panembahan Rama)⁶ . yang nantinya dibicarakan dalam makalah ini sebagai lawan dari Amangkurat I.

Type kedua, yaitu ulama yang berkedudukan sebagai alat birokrasi kerajaan Mataram, ialah para ulama yang menjadi abdi dalem. bertugas mengurus soal-soal yang berhubungan dengan agama di lingkungan kerajaan. Abdi dalem ulama ini disebut sebagai abdi dalem Pamethakan, dengan pangkat tertinggi Penghulu.

Type yang ketiga, adalah para ulama yang hidup di pedesaan-pedesaan. Ulama type ini biasanya bertempat tinggal di pelosok desa. Kadar kepandaian ulama pedesaan ini tidak kalah dengan para ulama lainnya, ia sengaja menyingkir dari keramaian dan berda'wah atas kemauan sendiri, oleh karena itu lebih independen. Termasuk dalam type ini antara lain juga para ulama pengembara untuk menyiarkan agama, dengan diikuti oleh para santrinya. Bagi penduduk pedesaan, ulama pedesaan ini adalah elite religious yang dihormati, dan mempunyai kharisma yang tinggi.

Dari ketiga type ulama di atas, hanyalah type ulama yang kedua atau abdi dalem pamethakan yang tunduk patuh pada raja. Walaupun raja menyimpang dari kaidah agama, mereka sebagai pegawai kerajaan selalu loyal terhadap raja. Ulama Type pertama dan ketiga, merupakan ulama yang berani menentang raja, apabila raja bertindak menyimpang dari kaidah agama. Meskipun ada type ulama yang digolongkan menjadi tiga itu, namun para ulama dari berbagai type yang berbeda itu mempunyai hubungan komunikasi ukhuwah yang baik.⁷ Hubungan itu tampak pada upacara-upacara keagamaan, penentuan atau memutuskan masalah keagamaan dengan musyawarah. Para ulama yang menjadi alat birokrasi yang tersebar dalam struktur kerajaan, misalnya : Ulama Kutagara, negara Agung, Mancanegara dan Pesisiran. Dalam kedudukannya sebagai alat birokrasi itu sering mengundang para ulama pedesaan atau ulama berdarah bangsawan yang biasanya mengepalai daerah perdikan, untuk pertemuan membahas da'wah, hukum-hukum agama dan tukar pikiran mengenai pemahaman aqidah.

Di kerajaan Mataram, hubungan raja dan ulama terjalin harmonis. Pada zaman pemerintahan sultan Agung Hanyokrokusumo para ulama menunjukkan loyalitas yang baik terhadap raja, dan sebaliknya raja menghargai ulama sebagai tokoh yang dianggap mempunyai moral dan ilmu pengetahuan yang tinggi.⁸ Realisasi dari hubungan yang harmonis, dan penghormatan raja terhadap ulama ini dapat dibuktikan, bahwa para ulama mendapat kedudukan sebagai penasihat raja dan

⁶ Termuat dalam Serta Tjandra Kanta, yang telah dikutip dalam tulisan H.J. de Graaf. "Het Kadjoran Vraagstuk", majalah Djawa, jilid XX (1940), h. 326

F.A. Sutjipto. Pemimpin Agama di Wilayah Keradjaan Mataram. Op. Cit. h. 26

⁸ F.A. Sutjipto. "Pengaruh Ulama Dalam Bidang Politik dan Militer di Kerajaan Mataram", dalam Bacaan Sejarah, No 9, Maret, 1980, h. 3

menduduki birokrasi kerajaan di zaman Sultan Agung. Para ulama diangkat sebagai penasehat tidak hanya di bidang agama, namun juga dalam bidang pemerintahan dan militer. Sultan apabila akan membuat kebijaksanaan selalu meminta nasehat dan pertimbangan pejabat tinggi kraton, seperti Ratu Eyang, Ratu Ibu, Patih Dalem, Wedono Lebet yang kesemuanya adalah sentono dalem, kemudian ditambah dengan Pengulu Kraton.

Di dalam bidang kemiliteran para ulama juga ikut ambil bagian, baik sebagai penasehat rohani, maupun juga ikut mengangkat senjata bersama para santrinya sebagai prajurit non profesi yang bila suatu saat diperlukan oleh kerajaan Mataram. Latihan bela diri yang disebut pencak merupakan mata pelajaran di pesantren, yang tidak langsung merupakan latihan pisik bila menghadapi tugas perang. Ulama pedesaan sebagai informal leaders ternyata mempunyai pengaruh yang besar pada masyarakat desa, bila kerajaan Mataram membutuhkan pengerahan tenaga untuk perang, biasanya tampil para ulama memimpin masyarakat desa sebagai laskar bantuan bagi kerajaan. Ketika Sultan Agung mempersiapkan penyerbuan ke Surabaya, pada tahun 1624, telah menyiapkan 30.000 prajurit yang terdiri dari prajurit kraton dan pengerahan tenaga Wiratani, di dalamnya terdapat 7.000 orang-orang kebal.⁹ Laskar Wiratani dan orang kebal senjata yaitu biasanya binaan dari ulama pedesaan.

Hubungan yang harmonis antara raja dan Ulama ini berjalan apabila dalam keadaan yang biasa, yaitu raja memerintah dengan wajar. Keadaan yang wajar itu ialah selama raja tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku menurut ajaran agama Islam. Raja sebagai penguasa kerajaan Islam Mataram, melaksanakan norma-norma Islam dalam pemerintahannya. Namun hubungan yang harmonis itu dapat retak, apabila raja yang sedang memerintah menyimpang dari norma-norma agama.¹⁰ Bila raja berkuasa sewenang-wenang, maka para ulama memutuskan loyalitasnya kepada raja, kemudian menyingkir atau bahkan melakukan perlawanan.¹¹ Situasi ketidak harmonisan hubungan raja dan ulama ini terjadi pada zaman Mataram diperintah oleh Amangkurat I, yang kemudian akan dibahas dalam makalah ini.

⁹ B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies II, (Bandung: W. Van Hoeve Ltd., 1959), h. 131

¹⁰ F.A. Sutjipto, Pemimpin Agama di Wilayah Kerajaan Mataram, Op. Cit., h. 29.

¹¹ Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java, a Study of The Ieter Mataram Period, 16th to 19th Century, (NewYork; Asian Studies Cornell University, 1963), h. 29

PEMERINTAHAN SUSUHUNAN AMANGKURAT I DI MATARAM

Pengalaman masa kecil Amangkurat I ikut menentukan perkembangan pribadinya di dalam mengendalikan pemerintahan Mataram. Mas Sayidin, demikian nama kecil dari Amangkurat I, ia dilahirkan pada tahun 1619, putera Sultan Agung dengan Ratu Kulon.¹² Setelah diangkat menjadi putera mahkota, mendapatkan nama Arya Mataram.¹³ Pada masa kanak-kanak, mas Sayidin tidak begitu kuat mendapatkan pelajaran ilmu agama Islam, hal ini dikarenakan ia memang tidak mempunyai minat yang kuat untuk mempelajari agama Islam.¹⁴ Di samping itu, masa kecilnya lebih suka bermain di tempat orang-orang Belanda di tawan, ditempat ini ia banyak bergaul dengan orang Belanda dan suka bermain dengan mainan yang dibuat oleh para tahanan. Menurut teori psikologi, masa kanak-kanak seseorang itu akan membawa pengaruh dalam mengukir jiwanya kelak dimasa dewasa, seperti lingkungan bergaul dan pendidikan masa kecil ikut menentukan juga jiwanya pada masa dewasa.¹⁵ Pada masa remajanya belum tampak jiwa kepemimpinannya, dan dinilai oleh orang-orang Belanda termasuk orang yang lemah, tidak seperti ayahnya. Namun pengaruh psikologis kejayaan dan keberanian Sultan Agung, mendorong Amangkurat I membuat kebijaksanaan sendiri dalam pemerintahannya kelak sebagai kompensasi dari kelemahan, baik di bidang kepemimpinan dan agama.

Pertama, bila pada zaman Sultan Agung menempatkan lembaga keagamaan dalam pemerintahannya, dan ulama dijadikan penasehat Sultan, maka pada pemerintahan Amangkurat I, lembaga keagamaan tidak difungsikan, dan berusaha menghapuskan serta menyingkirkan para ulama. Demikian pula perkembangan Islam dibatasi, kehidupan agama tidak boleh mencampuri kenegaraan, dan menghapuskan mahkamah syari'ah yang telah dibentuk oleh Sultan Agung.¹⁶

Kedua, bila Sultan Agung selalu berusaha melawan setiap bentuk penjajahan yang dilakukan oleh VOC, sebaliknya Amangkurat I pada awal periode pemerintahannya (1646), mengadakan perjanjian kerjasama dengan VOC. Dalam perjanjian itu antara lain Mataram menyerahkan hasil berasnya di pesisir utara Jawa kepada VOC, sebaliknya VOC setiap tahun menyerahkan hadiah kepada Amangkurat I, sesuai dengan pesannya.¹⁷

¹² T.G. Th. Pigeaud, "Islamic States in Jawa 1500-1700", dalam *VKI*, No. 70. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963), h. 54

¹³ *Babad Tanah Djawi*, W.L. Olthof., (S Gravenhage: M. Nijhoff, 1941), h. 141

¹⁴ B.H.M. Vlekke, *Nusantara A History of Indonesia*, (s Gravenhage: van Hoeve, 1959), h. 175

¹⁵ Alan O. Ross, *Psychological Disorders of Children*, (Tokyo. Mc. Graw-Hill Kogakusha Ltd., 1974), h. 9 dan 179.

¹⁶ B.H.M. Vlekke, *Op. Cit.*, h. 176

¹⁷ B.H.M. Vlekke, *Op. Cit.*, h. 175

Ketiga, bila pada zaman Sultan Agung terdapat semacam lembaga penasehat raja, yang terdiri dari para sentono yang menjabat patih lebet, wedana lebet dan Penghulu (Ulama), maka pada waktu Amangkurat I berkuasa, semuanya itu dihapuskan, ia ingin berkuasa mutlak menurut kehendaknya.

Melihat ketiga perbedaan di atas, maka tampak jelas pola yang dijalankan oleh Amangkurat I dalam pemerintahannya. Di samping itu, masih terdapat sifat yang kejam dipunyai Amangkurat I, apabila menghadapi hambatan yang tidak mendukung kehendaknya. Sifat kepribadian yang demikian itu merupakan cerminan kompensasi dari kelemahannya¹⁸ dalam bidang kepemimpinan dan keagamaan, kemungkinan ia ingin kecemerlangan dan kejayaan Sultan Agung.

Kekejaman Amangkurat I banyak dikisahkan dalam sumber kompeni, yaitu laporan utusan VOC Rijklof Volckretsz dan laporan perjalanan Van Goens.¹⁹ Di samping itu terdapat pula dalam sumber Babad Tanah Jawi.²⁰ Peristiwa yang terjadi menunjukkan kekejaman Amangkurat I, seperti : Kasus Pangeran Alit (1647); Kasus Ratu Malang (1667); Kasus Roro Oyi (1668); Kasus Pembunuhan Ulama (1670) dan Kasus Pembunuhan Wiramenggala.

Pangeran Alit adik Amangkurat I, orang yang pertama kali mengadakan perlawanan kepada Amangkurat I, pada tahun 1647. Latar belakang pemberontakannya adalah adanya rasa ketidak puasan atas pemerintahan kakaknya. Rasa ketidakpuasan itu mungkin dikarenakan adanya perjanjian persahabatan dengan VOC, disamping itu kemungkinan juga adanya keinginan untuk berkuasa. Namun menilik dekatnya tahun pemberontakan itu dengan perjanjian persahabatan pada VOC, lebih kuat dapat disimpulkan bahwa pemberontakan P. Alit itu merupakan cerminan melawan persahabatan dengan pihak VOC, seperti halnya Sultan Agung melawan VOC. Walaupun pemberontakan itu dapat dipadamkan, dan P. Alit terbunuh, namun peristiwa ini merupakan bibit keresahan di lingkungan istana.

Kasus Ratu Malang, ialah peristiwa wafatnya Ratu Malang secara mendadak (tahun 1667), ia adalah isteri Amangkurat I yang sangat disayangi, hal ini menyebabkan kemarahan raja. Tuduhan yang membuat kematian itu adalah isteri-isterinya, sehingga Amangkurat I menghukum mati 43 orang isterinya, dengan jalan mengurung dalam satu rumah terkunci tanpa diberi makan dan minum sampai meninggal dunia.

Kasus Roro Oyi, sebagai penyebab adanya pertentangan antara putera mahkota Adipati Anom melawan ayahnya, yaitu Amangkurat I. Roro Oyi adalah wanita cantik sengkeran Amangkurat I, namun sengkeran itu sebelum dinikmati, sudah

¹⁸ Benyamin B. Wolman (ed.). The Psychoanalytic Interpretation of History. dalam buku ini terdapat karangan Robert Waelder, "Psychoanalysis and History" Application of Psychoanalysis to Historiography". (New York: Harper & Row Publishers, 1973), h. 12

¹⁹ H.J. De Graff, "De Regering van Sunan Amangkurat II Tegal Wangi, Vorst van Mataram 1646-1677", dalam VKI, deel 33, I, 1961.

²⁰ Babad Tanah Djawi, Op. Cit., 141-160

terlebih dahulu dinikah oleh Adipati Anom. Pemikahan itu dilaksanakan di rumah Pangeran Pekik di Surabaya. Mendengar adanya pernikahan Adipati Anom dengan Roro Oyi, Amangkurat I bangkit kemarahannya, kompleks Kadipaten dibakar, P. Pekik yang juga sebagai mertuanya dibunuh beserta keluarganya. Adipati Anom dan Roro Oyi ditangkap, kemudian Adipati Anom diharuskan membunuh Roro Oyi hingga tewas. Setelah itu Adipati Anom diasingkan ke Lipura, di pantai Selatan.

Dalam rangka untuk membatasi perkembangan Islam dan menghapuskan peranan Ulama di kawasan Mataram, maka Amangkurat I yang tidak menyukai para ulama itu, selalu mengkambing hitamkan para ulama sebagai penyebab keresahan dalam masyarakat untuk menentang raja. Kemungkinan memang para ulama yang pada waktu itu disingkirkan peranannya dalam negara, melihat kebijaksanaan dan tindakan raja dalam memerintah dianggap sudah menyimpang dari norma-norma agama. Maka para ulama sering mengadakan reaksi, baik berupa peringatan atau nasehat kepada raja, namun hal ini dinilai oleh raja sebagai tindakan yang berani menentangnya. Oleh karena itulah, maka pada tahun 1670 raja mengumpulkan ulama dan keluarganya di Alun-alun Pleret, kemudian para ulama itu dibunuhnya. Menurut Babad Tanah Djawi, jumlah ulama dan keluarganya yang dibunuh oleh tentara Amangkurat I itu ribuan, namun lebih jelas lagi laporan Van Goens, mengatakan bahwa ada 6000 ulama dan keluarganya yang tewas dibunuh di Alun-alun Pleret itu.²¹

Pola pemerintahan Amangkurat I yang dicerminkan dalam kebijaksanaan dan pelaksanaannya itu, ternyata mengundang keresahan dalam masyarakat. Keresahan itu kemudian meningkat menjadi perlawanan kepada Amangkurat I, beberapa perlawanan itu mempunyai motif dasar yang berbeda. Seperti perlawanan Adipati Anom mempunyai motif dasar perebutan wanita; Perlawanan Trunojoyo bermotif dasar politik dan Raden Kajoran mempunyai motif dasar moral keagamaan. Walaupun ada perbedaan motif dasar dari ketiga unsur perlawanan itu, namun mereka mengadakan sekutu taktik untuk mengalahkan Amangkurat I.

Dalam bagian lain akan diuraikan lebih khusus perlawanan Raden Kajoran sebagai seorang Ulama yang menentang raja. Namun tidaklah dapat ditinggalkan unsur-unsur perlawanan Trunojoyo sebagai menantu Raden Kajoran dan yang banyak mendukung secara fisik dalam peperangan.

²¹ Lihat dalam H.J. De Graaf, dari Rijckloff Volchertsz van Goens, De Carriere van een Diplomaat, 1619-1655, (Utrecht, 1954). Dalam B.H.M. Vlekke, Op. Cit. h. 174.

PERLAWANAN RADEN KAJORAN DAN SEKUTUNYA TERHADAP AMANGKURAT I

Sebelum membicarakan perlawanan Raden Kajoran terhadap Amangkurat I. perlu diketahui dahulu tentang Raden Kajoran sebagai tokoh ulama. Raden Kajoran adalah ulama yang tergolong masih berdarah bangsawan, dalam Serat Tjandrakanta disebutkan bahwa Raden Kajoran adalah keturunan Sayid Kalkum (Pangeran Wotgaleh). Pangeran Wotgaleh adalah saudara Ki Ageng Pandan Aran (Sunan Tembayat).²² Disamping itu Ayah Kadjoran, yang bernama Pangeran Raden ing Kadjoran. kawin dengan Raden Ayu Wangsacipta anak dari Panembahan Senopati.

Walaupun R. Kajoran adalah ulama yang berdarah bangsawan, namun ia lebih suka tinggal di pedesaan, sebagai Kyai di pesantren desa Kajoran. Kealiman dan kekeramatan R. Kajoran pada waktu itu terkenal, sehingga Amangkurat I pernah minta tolong untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Ketinggian ilmu agama dan prestasi spiritualnya itu, oleh masyarakat disebut juga dengan nama Panembahan Rama. Gelar Panembahan menunjukkan juga adanya fungsi terhormat bagi R. Kajoran, karena mempunyai otoritas spiritual, yang sering pengaruhnya melebihi fungsionaris politik.²³ Dalam Babad Tanah Djawi disebutkan bahwa R. Kajoran adalah orang sekti dan pertapa²⁴. Cornelis Speelman menyebutnya sebagai "*duyveljager of waarzegger*". atau penujum dan pengusir setan.²⁵

Pengaruh R. Kajoran dalam masyarakat pedesaan cukup besar, ia sebagai ulama desa mempunyai identitas yang sama dengan petani, sehingga lebih banyak mempunyai alat komunikasi dengan rakyat. Adanya pengetahuan agama yang mendalam, moralitas yang tinggi, dan banyak berkomunikasi dengan masyarakat, maka ulama mempunyai otoritas kharismatis sebagai religious elite yang dapat memimpin dan menggerakkan masyarakat. Maka sering terjadi ikut sertanya ulama di dalam percaturan politik, dengan mempergunakan pertimbangan moral keagamaan. Apabila seorang penguasa tinggi (raja) bertindak melanggar ukuran-ukuran moral yang baik, akan mendapatkan tantangan-tantangan.²⁶ Demikian halnya dengan R. Kajoran, ia seorang ulama yang mempunyai pengikut banyak, setelah melihat tindakan kekuasaan Amangkurat I yang sudah dianggap melanggar nilai-nilai moral dan kemanusiaan, maka ia kecewa. Kekecewaan itu kemudian meningkat setelah raja membunuh banyak ulama, sehingga menimbulkan kebencian pada raja.

²² H.J. De Graaf. "Het Kadjoran Vraagstuk". dalam Djawa Op. Cit. lampiran I, h. 326

²³ F.A. Sutjipto. "Panembahan Dalam Sistem Titulatur Tradisionil". dalam Buletin Fakultas Sastra & Kebudayaan, Kirsada No. 1. 1969., h. 86.

²⁴ Babad Tanah Djawi. Op. Cit., h. 154

²⁵ H.H. De Graaf. "De Opkomst van Raden Troenodjojo" dalam Djawa, XX (1940), h. 60

²⁶ F.A. Sutjipto. "Panembahan dalam Sistem Titulatur Tradisionil". Op. Cit., h. 85

Tindakan sewenang-wenang raja membunuh Wira Menggala seorang menantu R. Kajoran, menimbulkan sikap menentang kepada raja secara langsung. Amangkurat I dianggap sudah melanggar ajaran Islam dalam memerintah, maka sampai pada kesimpulan bahwa raja harus diturunkan dari tahta. R. Kajoran kemudian menyusun pasukan, yang terdiri para santrinya dan rakyat pedesaan. Rencana R. Kajoran ini rupanya diketahui oleh Adipati Anom, maka iapun minta bantuan R. Kajoran untuk menumbangkan kekuasaan ayahnya.

Trunojoyo seorang anak bangsawan Madura, cucu Cakraningrat I, mempunyai dendam pribadi dan politik terhadap Amangkurat I. Dendam itu akibat dari, pertama kematian kakeknya sebagai korban pengabdian pada Amangkurat I. Kedua kematian ayahnya yang mempunyai hak syah atas tahta Madura, kemudian dibunuh oleh Amangkurat I, dan hak tahta Madura dilimpahkan kepada pamannya Cakraningrat II. Ketiga adanya kekecewaan Trunojoyo dan rakyat Madura atas pemerintahan Cakraningrat II yang menyengsarakan rakyat Madura, dan hanya suka berada di Mataram. Atas dukungan dan dorongan para bangsawan dan rakyat Madura, Trunojoyo berniat akan mengadakan perlawanan kepada Amangkurat I di Mataram. Namun niat itu belum berani dicetuskan, sebelum memperoleh dukungan kekuatan spiritual dan pisik dari masyarakat sekitar kraton Mataram. Oleh karena itu setelah mendengar bahwa Raden Kajoran bersikap menentang dan akan mengadakan pemberontakan kepada raja, maka Trunojoyo berusaha menemui dan mohon bantuan serta dukungannya. Raden Kajoran menyambut baik maksud Trunojoyo dan bersedia berjuang melawan Amangkurat I. Sebagai ikatan persekutuan itu, Raden Kajoran mengawinkan seorang anaknya dengan Trunojoyo.²⁷

Raden Kajoran, Trunojoyo dan Adipati Anom telah sepakat mengadakan perlawanan kepada Amangkurat I. Kemudian diatur rencana perlawanan, yaitu Trunojoyo memulai dari Jawa Timur, untuk mematahkan para bupati yang memihak raja dan bantuan kompeni dari Surabaya. Raden Kajoran dibantu oleh Adipati Anom mengadakan perlawanan di Jawa Tengah, termasuk ke kraton Pleret. Setelah kesepakatan dan rencana gerakan perlawanan itu diatur, Trunojoyo kemudian kembali ke Madura untuk menyusun pasukannya. Kembalinya Trunojoyo ke Madura disambut oleh para bangsawan dan rakyatnya yang tidak menyukai Cakraningrat II. Pada tahun 1674, Trunojoyo beserta pasukannya mulai bergerak, dengan mudah menangkap Cakraningrat II, maka Madura sudah dikuasai. Datangnya pengembaraan Galengsung ke Madura, telah mengadakan kesepakatan dengan Trunojoyo untuk melawan Amangkurat I dan Kompeni. Kesepakatan itu dicapai pada bulan Februari 1674, hal ini memperkuat pasukan Trunojoyo yang bergerak dari arah timur.

²⁷ T.G. Th. Pigeaud. *Op. Cit.* VKI. h. 67

Raden Kajoran dengan mudah mengumpulkan pasukan, yang terdiri para santri, rakyat pedesaan pengikutnya, ditambah dengan sebageian prajurit yang setia dengan Adipati Anom. Ketidak puasan masyarakat terhadap raja berhasil dihimpun oleh Raden Kajoran untuk melawan raja, elite birokrasi pribumi yang bekerja sama dengan kompeni dipandang kafir, dan dianggap hina oleh masyarakat.²⁸ Perang melawan kafir inilah yang digunakan sebagai pendorong pasukan Raden Kajoran. Namun konsolidasi pasukan Raden Kajoran di Taji belum siap betul, sudah tercium oleh raja. Maka raja memerintahkan prajuritnya yang dipersenjatai lengkap untuk menghancurkan persiapan pasukan musuh di Taji, dan Kajoran supaya ditangkap. Serbuan prajurit Mataram itu ternyata tidak berhasil ditahan oleh Raden Kajoran, akhirnya ia mengundurkan pasukannya ke Surabaya, untuk bergabung dengan Trunojoyo. Prajurit Mataram tidak berhasil menangkap Raden kajoran, sebagai pelampiasannya, pondok pesantren Kajoran dibakar habis. kejadian itu pada bulan Januari 1677.

Pada bulan Maret 1677, Raden Kajoran dan Trunojoyo telah sepakat untuk bersama-sama bergerak menggempur pusat kerajaan Mataram di Pleret. Namun yang sangat mengecewakan keduanya adalah ingkarnya Adipati Anom dalam persekutuan itu, hal ini disebabkan ia telah diampuni oleh ayahnya dan telah dipersiapkan untuk pengganti raja bila wafat. Di samping itu Adipati Anom telah terang-terangan memusuhi Raden Kajoran dan Trunojoyo, hal itu dibuktikan dengan adanya perjanjian antara Kompeni dan Amangkurat I, tanggal 12-20 Maret 1677. Isi perjanjian itu ialah Kompeni diberi mandat untuk menyerang pemberontakan R. Kajoran dan Trunojoyo. Sebagai saksi dan wakil Amangkurat I dalam perjanjian itu ialah Adipati Anom dan ketiga putera raja lainnya.²⁹

Walaupun adanya perjanjian antara Mataram dengan Kompeni, yang melibatkan pasukan Kompeni ikut melawan R. Kajoran, namun tekad R. Kajoran dan Trunojoyo untuk menyerbu Ibukota Kerajaan Mataram dilanjutkan. Pada akhir bulan Maret dan awal April, pasukan pemberontak berhasil menduduki Rembang dan Semarang, hal ini merupakan kemenangannya, sebab Pusat Mataram jadi terputus dengan bantuan kompeni. Akibat terputusnya bantuan kompeni, Mataram menjadi lemah, dan hanya memusatkan pertahanannya di sekitar Kraton Pleret. Sebagai langkah penyerangan lebih lanjut, disusunlah strategi penyerangan dua arah, pertama dari arah Utara dilakukan oleh pasukan Madura dan Makasar yang dihimpun oleh Trunojoyo, sedangkan penyerangan dari selatan dilakukan oleh laskar Raden Kajoran. Kedua arah penyerangan itu direncanakan bertemu di Kraton Mataram Pleret.

²⁸ Sartono Kartodirdjo, Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia, (Yogyakarta: BPA-UGM, 1974), h. 16-17.

²⁹ H.J. De Graff, "De Regering Van Sunan Mangkurat I Tegal Wangi, Vorst Van Mataram 1646-1677" dalam VKI, Deel 39 (a Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1962), h. 158-161

Penyerbuan dari dua arah itu ternyata berjalan dengan lancar, pada bulan Juni 1677. kedua pasukan itu telah mengepung Kutagara Mataram. Akibat pengepungan ini prajurit Amangkurat I kedudukannya semakin sulit. bahkan kemudian sebagian prajurit kraton yang dipimpin oleh Pangeran Purbaya menyeberang berpihak kepada Raden Kajoran. Sebagai klimaksnya, pada akhir bulan Juni tahun 1677. kraton Pleret sebagai pusat Kerajaan Mataram dapat direbut oleh pasukan Raden Kajoran dan Trunojoyo. Sunan Amangkurat I tidak berhasil ditangkap, ia berhasil meloloskan diri pada tanggal 2 Juli 1677, dan lari menuju Batavia bermaksud minta bantuan Kompeni. Perjalanannya dikawal oleh para puteranya antara lain Pangeran Adipati Anom. Pada saat itulah terjadi sebuah prahara di atas tahta Mataram, raja turun tahta, dan sementara kosong tidak ada penggantinya.

Dalam pelariannya Sunan Amangkurat I menderita kesakitan, maka sebelum meninggal ia mengangkat Pangeran Adipati Anom menjadi penggantinya. dengan gelar Amangkurat II. Amangkurat I yang menderita sakit di perjalannya itu, akhirnya wafat di hutan Wanayasa. kemudian dimakamkan di Tegal Wangi. Adipati Anom yang sudah menjadi raja Mataram bergelar Amangkurat II kemudian mengadakan perjalanan ke Jepara untuk menemui Cornelis Speelman komandan pasukan kompeni. Sunan Amangkurat II menyampaikan maksudnya minta bantuan pada Speelman, agar pasukan Kompeni dapat membantu niatnya untuk merebut kembali tahta Mataram, dan menghancurkan perlawanan Raden Kajoran dan Trunojoyo. Speelman menyanggupi untuk membantu Amangkurat II. namun Amangkurat II harus menyetujui permintaan Kompeni yang dituangkan dalam perjanjian Jepara. Perjanjian Jepara itu ditandatangani oleh Amangkurat II, pada tanggal 20 Oktober 1677, isinya antara lain: Pertama, daerah sebelah timur Krawang hingga sungai Pamanukan diserahkan kepada VOC. Kedua, Amangkurat II mengakui berhutang kepada VOC berupa. 250.000 real Spanyol, 3000 koyan beras, mengganti biaya perang kepada VOC sebanyak 20.000 rel setiap bulannya. Ketiga daerah ujung timur pantai utara Jawa hingga sampai Krawang menjadi daerah pengawasan VOC. Dan yang keempat, segala import kain cita dan candu di daerah Jawa (kekuasaan Mataram), dimonopoli VOC.³⁰ Perjanjian yang merugikan Mataram dan memberatkan Amangkurat II itu ditandatangani, demi usaha untuk meraih kembali tahta kerajaan Mataram yang telah hilang, dan jatuh ke tangan Trunojoyo.

Raden Kajoran dan Trunojoyo setelah dapat menguasai Mataram, maka keduanya mempunyai maksud yang berbeda tentang bagaimana Mataram selanjutnya. Trunojoyo yang sejak semula mempunyai motif dasar politis, ia lebih cenderung menginginkan kekuasaan Mataram berada pada dirinya, yang mengaku punya hak syah sebagai keturunan Majapahit. Oleh

³⁰ F.A. Sutjipto. "Perang Trunojoyo". dalam Sartono Kartodirjo (ed.), Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme. (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI - Dep. Hankam, 1973). h. 19

karena itulah maka ia segera memindahkan kekayaan kraton Mataram di Pleret ke Kediri, yang dipersiapkan sebagai ibukota kerajaannya. Gelar yang dipakainya ialah Pangeran Maduretno.

Lain halnya dengan Raden Kajoran atau Panembahan Rama, sejak semula yang menjadi motive dasar perlawanannya adalah moral dan keagamaan, maka setelah berhasil mengalahkan raja Amangkurat I, ia kembali ke Kajoran untuk membangun pesantrennya. Di samping itu juga, ia bersama pasukannya kadang-kadang tetap bertempur melawan sisa-sisa kekuasaan kompeni di pantai utara Jawa.

Adanya perjanjian 20 Oktober 1677, antara Kompeni dan Amangkurat II, maka dilanjutkan dengan penyerangan besar-besaran baik dari laut dan darat, untuk merebut kembali kraton Mataram. Adanya serbuan Amangkurat II yang dibantu Kompeni itu mengakibatkan pengikut Trunojoyo yang berada di Mataram mengundurkan diri ke Jawa Timur, dan pengikut Raden Kajoran mundur ke Gunung Kidul. Serbuan besar-besaran dari pasukan Kompeni dan Amangkurat II itu ternyata berhasil mempersempit gerakan Raden Kajoran di Gunung Kidul. Maka tiada berapa lama pasukan Kompeni di bawah pimpinan J.A. Soot berhasil menangkap Raden Kajoran dan membunuhnya pada tanggal 14 September 1679.

Penyerangan terhadap kubu pertahanan Trunojoyo di Jawa Timur dipimpin oleh Konker. Melalui pertempuran demi pertempuran dengan pasukan Kompeni yang jumlahnya lebih besar itu, akhirnya Trunojoyo tertangkap di lereng utara Gunung Kelud, pada tanggal 25 Desember 1679. Pada tanggal 2 Januari 1680 Trunojoyo dibunuh oleh Amangkurat II. Dengan demikian maka tahta kerajaan Mataram berhasil diraih kembali oleh Amangkurat II, dengan berkat bantuan Kompeni Belanda. Dalam pemerintahan Amangkurat II ini, berusaha dikembalikannya peranan Ulama dalam kerajaan Mataram, kerjasama dengan ulama dipulihkan kembali. Rupanya Amangkurat II mempelajari pengalaman pahit yang dilakukan oleh ayahnya (Amangkurat I), sehingga agar jangan terulang adanya benturan Ulama dengan Raja, maka fungsi ulama di kerajaan Mataram dihidupkan lagi, sebagai pendukung dan penasehat kerajaan. Hal ini kemudian dilanjutkan dalam tradisi raja-raja Mataram selanjutnya.

KESIMPULAN

Meskipun dalam kerajaan Mataram dikenal dengan adanya konsep kepemimpinan *Agung Binathara*, yaitu raja mempunyai kekuasaan mutlak, namun diiring konsep kepemimpinan yang lain yaitu *Berbudi Bawa Laksana*, yang artinya harus berbudi pekerti baik kepada rakyat dan berwibawa karena kebaikannya. Selain itu, raja dengan gelar Kalifatullah, atau wakil Tuhan Alloh, merupakan cerminan dari tindakan yang mengandung sakral. Oleh karena itu, seorang raja yang dihormati

dan mendapat loyalitas dari rakyatnya, adalah raja yang menjalankan pemerintahan dengan baik moralnya dan bijaksana tindakannya, serta tidak menyimpang dari ajaran agama.

Bila raja hanya menggunakan kekuasaan mutlak, tanpa diikuti dengan kebijaksanaan dan moral yang baik, maka hal ini akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Keresahan ini timbul karena hubungan yang harmonis antara Kawula dan Gusti tidak terwujud. Ketidakharmonisan itu timbul, akibat raja menyimpang dari tradisi moral yang ada, sehingga loyalitas rakyat, terutama golongan agamawan (Ulama), terhenti. Bila loyalitas itu sudah tidak ada, maka akan mempermudah munculnya sikap menentang kepada raja, yang selanjutnya dapat berkembang menjadi perang perlawanan terhadap raja. Seperti halnya dialami Amangkurat I, ia hanya menggunakan kekuasaannya yang mutlak, tanpa mengindahkan nilai moral dan bijaksana dalam tindakannya. Oleh karena itu loyalitas terputus, dan kaum agamawan beserta rakyat berani mengadakan perlawanan pada raja. Amangkurat I harus menebus kekejamannya dengan akibat yang pahit yang menimpa dirinya. Terpaksa ia harus melepaskan tahta kerajaan Mataram, karena kekalahannya melawan rakyat yang dipimpin oleh Raden Kajoran dan sekutunya.

Kejadian yang diuraikan dalam makalah ini, memberikan gambaran sejarah runtuhnya kekuasaan mutlak, yang kejam dan tidak bijaksana. Dari keruntuhan itu membawa akibat bagi Mataram untuk periode selanjutnya, yaitu masuknya peranan VOC mempengaruhi urusan dalam negeri Mataram. Hal ini merupakan awal dari proses jatuhnya Mataram ke tangan Kompeni Belanda.

Kisah Prahara Menghembus Tahta Mataram, merupakan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pelajaran yang perlu diperhatikan ialah :

Pertama, diperlukan hubungan yang harmonis antara Ulama dan Umari (Ulama dan Pemerintah).

Kedua, hubungan yang harmonis itu dimunculkan dari dua belah pihak sebagai mitra yang akrab dalam membangun negara.

Ketiga, mencegah rasa saling curiga dan segera memadamkan benih-benih konflik, dengan saling pengertian dan silaturahmi.

BAB V

SEJARAH DAN PEMBANGUNAN BANGSA

SEJARAH DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Oleh : H. T. Ibrahim Alfian

Sejarah sebagai pertulisan atau pernyataan mengenai apa yang telah terjadi di masa yang lampau dapat disajikan oleh siapa saja. Berbagai hal mengenai peristiwa yang terjadi di masa yang lampau dapat dikomunikasikan, misalnya antara lain oleh para guru yang mendapat pendidikan kesejarahan, oleh para sejarawan profesional atau amatiran, para wartawan, para politisi, oleh para pejabat sipil dan militer, dan para pemuka agama, yang secara singkat dapat dikategorikan sebagai penyampai sejarah.

Bukti-bukti sajarah (historical evidences) seyogianya telah harus nyata keberadaannya sebelum terkonstruksi dalam pikiran para penyampai sejarah, sebelum dikomunikasikan oleh mereka kepada khalayak, baik secara lisan maupun melalui tulisan. Bukti-bukti sejarah ini dapat dijaring secara tepat dan benar bila diterapkan kaidah-kaidah sejarah dalam Metode Sejarah. Patut ditambahkan bahwa bukti-bukti sajarah itu dapat dilacak sendiri oleh peneliti atau pengamat sejarah atau dapat juga diperoleh mereka dari interpretasi-interpretasi terdahulu yang terdapat dalam berbagai karya sejarah yang manusabah.

Amat diperlukan upaya dan langkah-langkah serta cara-cara penyampaian yang efektif agar apa yang terdapat dalam pikiran para penyampai sejarah dapat diserap oleh alam pikiran khalayak sehingga tergerak hati mereka baik sebagai individu maupun secara kolektif menghayati, meyakini, dan melaksanakan isi yang terkandung dalam pesan-pesan para penyampai sejarah komponen penyampai sejarah dan pesan-pesan yang hendak disampaikan mempunyai pertalian yang erat sekali. Sejalan dengan tema sejarah dan Pembangunan Bangsa dalam Seminar satu Hari yang diadakan oleh masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Yogyakarta, Fakultas Sastra Universitas Gadjah mada, Museum Benteng Yogyakarta, dan Balai Pengkajian sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, (1996). Maka isi pesan adalah perihal Pembangunan Bangsa.

Masalah Pembangunan Bangsa sungguh amat luas dan sungguh amat kompleks. dan oleh karena itu kita harus mencari landasan berpijak, yang dapat diterima oleh segala pihak. Landasan ini tiada lain adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang untuk jelasnya perlu dikutip, meskipun hanya sebagian, sebagai berikut ini.

..... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jelaslah, bahwa tujuan untuk mendirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Rasanya tidak ada di antara kita yang tidak merasa betapa pentingnya masalah Pembangunan Bangsa itu, yang menyangkut hari depan bangsa dan keturunan kita di masa yang akan datang. Pembangunan Bangsa yang dilaksanakan secara terus menerus, tidak hanya semenjak Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan sampai kepada masa kini, akan tetapi jauh sebelum itu, ketika para pejuang pergerakan nasional melihat Pembangunan Bangsa dengan memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia dalam masa penjajahan sesuai dengan interpretasi situasi mereka pada masa itu untuk mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan.

Dalam meneruskan pembangunan bangsa di era pembangunan dewasa ini tidak dibantah, bahwa kita telah banyak mencapai sukses-sukses serta kemajuan-kemajuan yang sangat berarti melalui Pelita (Pembangunan Lima Tahun) demi Pelita, akan tetapi seperti diakui sendiri oleh Presiden kita, masih lagi terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki terus menerus serta hambatan-hambatan yang perlu dihilangkan, seperti yang dapat kita perhatikan sendiri melalui berbagai media cetak dan elektronik.

Salah satu diantara beragam hal yang dapat menjadi kendala Pembangunan Nasional yang sepatutnya menjadi perhatian bersama dalam era pembangunan ini adalah masalah integrasi nasional. Lebih dari dua tahun yang lalu, pada tanggal 28 April 1994 di Manado, Letjen Muthoyib yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) mengemukakan bahwa semangat dan wawasan kebangsaan sedang menghadapi ancaman serius, terutama dengan adanya pola pikir serta sikap terlalu mengagung-agungkan fanatisme primordial. Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (Golkar) bersama dengan Lemhannas dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman dan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pada tanggal 9 Mei 1994 di Jakarta mengadakan Sarasehan Nasional untuk suatu dialog dengan tujuan meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan.

Belum sampai dua minggu setelah sarasehan Golkar para mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) mengadakan diskusi pada tanggal 18 Mei 1994 di Jakarta (Kompas, 19 Mei 1994) dengan tema "Identitas Kultural dan Masa Depan Negara Kebangsaan Indonesia", dengan menampilkan anggota Dewan Pertimbangan Agung Harsudiyono Hartas sebagai salah seorang pembicara. Sehari setelah itu, yakni pada tanggal 19 Mei 1994 sekitar 1200 alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Semarang dalam satu seminar untuk memperbincangkan semangat kebangsaan dengan tema Peningkatan Semangat Kebangsaan dan Pelestarian Masyarakat Bhineka Tunggal Ika (Republika, 19 Mei 1994).

Menghadapi masalah integrasi nasional seperti ini sumbangan apakah yang dapat diberikan oleh para penyampai sejarah sebagai tanda kecintaan mereka terhadap tanah air dan bangsanya? Sejarah dapat memberikan panduan untuk mencapai tujuan yang diidam-idamkan di masa depan, dengan mengatur langkah-langkah berdasarkan pengenalan situasi masa kini, berlandaskan pengalaman-pengalaman masa lampau.

Sebagai sekedar contoh bagaimana memanfaatkan pengetahuan sejarah telah ditunjukkan oleh Bung Karno, ketika ia telah mengucapkan pidato pembelaan di muka hakim kolonial di Bandung pada tahun 1930. Berkata Bung Karno :¹

Sonder nasionalisme tiada kemajuan, sonder nasionalisme tiada bangsa.

..... "Nasionalisme adalah milik yang berharga yang memberi kepada suatu negara tenaga untuk mengejar kemajuan dan memberi kepada suatu bangsa tenaga untuk mempertahankan hidupnya", begitulah Dr. Sun Yat Sen berkata.

Membangkitkan nasionalisme. Hari dulu, hari sekarang, hari kemudian.

Dan caranya menyuburkan nasionalisme itu? Jalannya menghidupkannya ? Jalannya adalah tiga : Pertama, kami menunjukkan kepada rakyat, bahwa ia punya hari dulu, adalah hari dulu yang indah. Kedua, kami menambah keinsafan

rakyat, bahwa ia punya hari sekarang. adalah hari sekarang yang gelap. Ketiga, kami memperlihatkan kepada rakyat sinarnya hari kemudian yang berseri-seri dan terang cuaca, beserta cara-caranya mendatangkan hari kemudian yang penuh dengan janji-janji itu.

Selanjutnya Bung Kamo berkata :

Kami punya hari dulu yang indah, kami punya masa silam yang gemilang! Ah tuan-tuan hakim, siapakah orang Indonesia yang tidak mengeluh hatinya, kalau mendengarkan cerita tentang keindahan itu, siapakah yang tidak menyesalkan hilangnya kebesaran-kebesarannya! Siapakah orang Indonesia yang tidak hidup semangat nasionalnya, kalau mendengarkan riwayat tentang kebesaran tentang kerajaan Malayu dan Sriwijaya, tentang kebesaran Mataram yang pertama, kebesaran jaman Sendok dan Airlangga, dan Kediri, dan Singasari dan Majapahit dan Pajajaran, kebesaran pula dari Bintara, Banten dan Mataram Kedua di bawah Sultan Agung! Siapakah orang Indonesia yang tidak mengeluh hatinya kalau ia ingat akan benderanya yang dulu ditemukan dan dihormati orang sampai Madagaskar, di Persia dan di Tiongkok! Tetapi sebaliknya, siapakah tidak hidup harapannya dan kepercayaannya bahwa rakyat yang demikian kebesarannya hari dulu itu, pasti cukup untuk mendatangkan hari kemudian yang indah pula, pasti masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan menaik lagi di atas tingkat kebesaran dikelak kemudian hari? Siapakah yang tidak seolah-olah mendapat nyawa baru dan tenaga baru kalau ia membaca riwayat jaman dulu itu! Begitulah pula rakyat, dengan mengetahui kebesaran hari dulu itu lantas hiduplah rasa nasionalnya, lantas menyala lagilah api harapan di dalam hatinya, dan lantas mendapat lagilah rakyat itu nyawa baru dan tenaga baru oleh karenanya.

Demikianlah fenomena sejarah 66 tahun yang lalu telah digunakan oleh Bung Kamo untuk menatap masa depan. Salah satu diantara beberapa kegunaan sejarah adalah kegunaannya yang berasas manfaat yang lebih khusus, yaitu pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lalu, yaitu akumulasi pengalaman praktis yang harus diterapkan atau sebaliknya harus dihindari. Bukankah dalam kitab-kitab suci semua agama terdapat banyak kisah yang berisi pelajaran yang harus dipetik oleh umat manusia. Di dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 82, misalnya Allah berfirman : "Apakah mereka tidak mengembara di muka bumi dan memperhatikan bagaimana kesudahannya orang-orang yang sebelum mereka? Mereka lebih banyak jumlahnya, lebih kuat dan lebih banyak bekas-bekas peninggalan mereka di muka bumi. Maka apa yang mereka usahakan tidak dapat menolong mereka."

Di samping itu berbagai teori para pakar dapat pula diseleksi oleh para penyampai sejarah untuk diramu dalam memberikan arah pencapaian nilai-nilai di masa depan.

Salah satu contoh yang dipilih di sini dalam permasalahan integrasi nasional, sebagai mana pernah saya kemukakan pada suatu kesempatan lain, adalah paradigma yang dikemukakan oleh Christine Drake (1989) melalui suatu pendekatan yang dinamakan pendekatan eklektik.² Ia mengemukakan bahwa terwujudnya suatu integrasi nasional sangat tergantung dari perimbangan yang fundamental antara empat komponen utama yaitu komponen-komponen historis-politis, sosio-cultural, interaksi dan komponen ekonomi, dalam keseimbangan yang dinamis. Ia selanjutnya menambahkan, bahwa integrasi nasional adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensional, kompleks dan dinamis, yang melibatkan sejumlah besar berbagai unsur yang saling kait-mengkait yang beroperasi secara terpisah sampai taraf tertentu, tetap, namun demikian, saling berinteraksi, kumulatif, dan pada umumnya saling memperkuat satu sama lain. Berdasarkan kerangka referensi di atas dapat diberikan eksplanasi bahwa pengalaman-pengalaman sajarah (historical experience) yang sama, yang bersifat integratif, jelas sekali merupakan kekuatan yang kohesif. Oleh karena itu penderitaan yang dihayati bersama, seperti yang dialami ketika bangsa Indonesia dijajah, sampai kepada kemajuan-kemajuan yang dicapai bersama, termasuk sejumlah besar berbagai pengalaman sajarah dan politik, baik besar maupun kecil, seyogyanya disosialisasikan kepada masyarakat oleh berbagai organisasi dalam berbagai kesempatan untuk memperkuat integrasi nasional.

Erat bertalian dengan komponen historis-politis ini adalah atribut-atribut sosio-cultural yang dihayati bersama yang memberikan kepada suatu negara kebangsaan itu jati dirinya, yang membedakan negara kebangsaan itu dengan negara-negara sekitarnya, yang memungkinkan pula warga negaranya menghayati suatu rasa persatuan (sense of unity). Kita semua menyadari bahwa unsur-unsur yang dihayati bersama seperti misalnya dasar negara kita, Pancasila termasuk bahasa yang sama, serta pemberian kesempatan dalam kegiatan-kegiatan bersama yang bersifat nasional bagi semua suku bangsa dan semua penganut agama jelas mendorong rasa persatuan bernegara, dan ke arah ini perlulah segera diambil berbagai langkah yang serius melebihi dari waktu-waktu yang lalu.

Keterkaitan yang padu kedua komponen di atas dengan komponen interaksi antar berbagai suku bangsa dalam sebuah negara kebangsaan jelas mengakibatkan terciptanya integrasi, terutama bagi mereka yang menghayati berbagai atribut sosio-cultural. Segala jenis gerakan dan komunikasi antar propinsi dan antar pulau yang berjumlah lebih dari 10.000 buah itu sangat penting artinya. Usaha pemerintah menambah 15 buah kapal penumpang di waktu yang lalu untuk pelayaran nasional patut mendapat pujian.

Demikianlah pula jaringan transportasi darat yang mulai diusahakan penambahannya di kawasan timur Indonesia amat menggembirakan. Di samping itu biaya komunikasi telepon harus ditekan serendah mungkin, demikian pula hal transmigrasi dan perdagangan perlu penyempumaan yang terus menerus, kesemuanya ini untuk mendukung integrasi nasional.

Komponen keempat adalah ketergantungan ekonomi antar wilayah. Dalam hal keseimbangan perkembangan ekonomi antar wilayah adalah fundamental bagi integrasi nasional. Perkembangan ekonomi yang secara geografis tidak seimbang, yaitu satu daerah atau satu kelompok orang kelihatan mendapat keuntungan yang besar secara tidak proporsional, jelas cepat atau lambat akan dapat menimbulkan keadaan disintegratif.

Apabila salah satu saja dari keempat komponen itu tidak terdapat, maka bala akan datang menimpa integrasi nasional.

Demikianlah kerangka konseptual Christian Drake yang dapat kiranya dipertimbangkan dalam upaya kita untuk mengambil langkah-langkah agar integrasi nasional dapat diperkokoh.

Pertanyaan berikut yang perlu dijawab adalah apakah kita mempunyai itikad untuk mengedepankan kegunaan sejarah yang mempunyai manfaat yang khusus yaitu menarik pelajaran dari pengalaman masa lalu, seperti yang termaktub dalam semua kitab-kitab suci, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk menghilangkan kerugian-kerugian atau sekurang-kurangnya mengurangi seminimum mungkin malapetaka yang bakal menimpa?

Bagi saya jawabannya adalah positif. Pada tanggal 5 Februari 1983, lebih 13 tahun yang lalu dalam salah satu waktu jeda diantara sidang-sidang jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta saya berbicara serius dengan almarhum Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, waktu itu rektor Universitas Indonesia, seandainya di takdirkan Allah beliau menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar masalah pengajaran sejarah di ambil berat oleh beliau mengingat asas manfaatnya bagi segenap warga negara Indonesia.

Sebagai penutup wacana ini dikemukakan di sini beberapa catatan dan harapan sebagai berikut :

1. Seandainya para penyampai sejarah siap dengan karyanya bersandarkan kepada bukti-bukti sajarah otentik dan kredibel, dengan bahasa yang menarik, baik, dan benar serta disesuaikan pula dengan tingkat pengetahuan dan umur khalayak pembaca dan pendengar, bermanfaat bagi pembangunan bangsa, adakah karya-karya seperti ini dapat tersebar secara meluas dan dapat terjangkau oleh semua anggota masyarakat? Di sinilah mustahak atau patutnya turun tangan pemerintah untuk memberikan subsidi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Perlu diikhtiarkan agar kepada para penulis ini tidak lagi dibebankan pajak, demikian pula kepada penerbit-penerbit swasta yang menerbitkan karya-karya seumpama tersebut di atas.
3. Publikasi-publikasi seperti yang diterbitkan oleh American Association (Masyarakat Sejarawan Amerika) melalui Pusat Pelayanan bagi guru-guru sejarah (Service Center For Teachers of History) di Washington, D.C. mengenai berbagai topik sejarah yang tebalnya sekitar 25-40 halaman dan dijual dengan harga yang sangat murah perlu diusahakan oleh

Masyarakat Sejarawan Indonesia dengan bantuan sepenuhnya dari pihak pemerintah. Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta mempunyai pengalaman dalam hal penerbitan seperti ini.

Akhirulakhir. alangkah tepatnya apa yang dikemukakan oleh ahli filsafat termasyur A. Schopenhauer pada tahun 1818, bahwa "HANYA MELALUI SEJARAH LAH SESUATU BANGSA DAPAT SEPENUHNYA SADAR AKAN DIRINYA SENDIRI".

CATATAN AKHIR

1. Bung karno. *Indonesia Menggugat*, 1951, hlm, 111-112. (Ejaan disesuaikan dengan ejaan baru EYD).
2. Christine Drake, *National Integration in Indonesia : Patterns and Policies*, 1989, hlm. 3.

SEJARAH DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Oleh : G. Moedjanto

PENGANTAR

Bangsa Indonesia terbentuk dari dan lewat proses sejarah yang panjang. Hal itu terjadi terutama karena bangsa Indonesia bersifat majemuk. Dalam diri bangsa Indonesia terdapat begitu banyak kebhinekaan, yang menyangkut banyaknya suku dan budaya daerah, banyaknya bahasa dan dialek. Meskipun Islam merupakan agama dengan penganut yang terbanyak, tetapi dalam hal agama terdapat kebhinekaan juga, karena ada penganut agama Hindu dan Budha, ada penganut agama Katholik dan Kristen (Protestan). Kebhinekaan itu akan membesar kalau jenis profesi, persepsi terhadap berbagai masalah aktual dan kepentingan dihitung. Lagi pula negara Indonesia berwilayah yang begitu luas. Kecuali itu jumlah penduduk Indonesia begitu besar!

Dari uraian di atas masuk akal kalau persatuan bangsa hingga sekarang masih merupakan hal yang dirasakan renta. Bangsa Indonesia sebenarnya adalah rawan perpecahan. Maka dari itu pembicaraan tentang persatuan bangsa masih tetap relevan. Relevansi akan membesar kalau pembangunan bangsa tidak saja menyangkut persatuan, yang berarti nasionalisme atau rasa kebangsaan, tetapi juga dalam dimensi lain, seperti penghargaan terhadap HAM dan etos kerja yang mampu mendukung perkembangan budaya suka bekerja keras dan menjadi manusia yang berprestasi.

Berkenaan dengan itu, maka dalam makalah ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai beberapa hal berikut :

1. Proses integrasi bangsa Indonesia;
2. Persoalan Pembangunan Bangsa;
3. Aspek apa dari bangsa Indonesia yang harus dibangun ?
4. Dan akhirnya, apa yang dapat disumbangkan oleh Ilmu Sejarah ?

PROSES INTEGRASI BANGSA INDONESIA

Seperti sudah disinggung di depan integrasi bangsa Indonesia terbentuk dari dan lewat proses yang lama. Faktor apa yang membuat orang-orang Indonesia yang begitu bhineka itu dapat menjalani integrasi menjadi bangsa Indonesia? Ada begitu banyak faktor, diantaranya adalah :

1. Pelayaran dan perniagaan antar pulau;
2. Timbulnya pusat-pusat kekuasaan dan peradaban;
3. Agama Islam yang dianut mayoritas orang Indonesia;
4. Hikmah dari politik kolonial yang dapat orang Indonesia petik;
5. Nasionalisme dan ide-ide baru dari budaya Barat.

Sebaiknya masing-masing faktor diberi komentar sekedarnya. Pertama tentang pelayaran dan perniagaan antar pulau. Pulau-pulau di Indonesia memiliki potensi yang berbeda, misalnya Jawa kaya akan padi, Sumatera Selatan kaya akan mas, NTT kaya akan cendana, Aceh kaya akan gaharu. Begitu seterusnya ceritera kebhinekaan potensi itu dapat diteruskan. Dan kebhinekaan potensi itulah justru yang membuat penduduk dari berbagai pulau (daerah) saling memerlukan. Dengan demikian terjadilah pelayaran dan perniagaan antar pulau. Hal itu memberi peluang untuk terjadinya pelayaran dan perniagaan antar pulau.

Faktor kedua adalah timbulnya pusat-pusat kekuasaan dan peradaban. Munculnya pusat-pusat kekuasaan, yang biasanya diikuti dengan munculnya pusat-pusat peradaban juga, seperti kerajaan Sriwijaya, Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuna Baru, Majapahit, Tidore dan Temate, dll. Semua kerajaan itu menguasai daerah yang masyarakat sekitarnya. Sekaligus kerajaan-kerajaan itu juga menjadi pusat perkembangan peradaban. Kerap kali berbagai kerajaan itu bukan saja mampu menguasai daerah dan masyarakat sekitar, tetapi juga mampu menjalin hubungan dengan kerajaan yang lebih jauh. Dengan proses begitu, maka kerajaan-kerajaan yang menjadi pusat kekuasaan dan peradaban itu ikut menjadi jembatan integrasi.

Faktor ketiga adalah agama Islam. Dalam abad XVI dapat dikatakan telah menyebar ke seluruh Indonesia. Tersebar nya agama Islam di ikuti oleh berdirinya banyak kerajaan-kerjaan Islam, yang sekaligus menjadi pusat kekuasaan dan peradaban Islam. Kesamaan agama dapat menjadi faktor integrasi. Bagi orang Islam agama mereka menjadi identitas, yang mampu menjiwai pemeluknya dalam menghadapi orang-orang Barat, seperti Portugis dan Belanda. Dalam pertentangan antara pihak Indonesia dan Belanda seringkali orang Islam diartikan orang Indonesia.

Faktor keempat adalah hikmah dari politik kolonial. Dalam abad XX Belanda mempersatukan Indonesia dalam satu koloni dan mereka mengaku telah berhasil menciptakan apa yang disebut PAX Neerlandica. Dalam wadah PAX Neerlandica itu Belanda mempraktekkan politik etis, yang sering juga disebut politik kesejahteraan. Dengan politik etis itu Belanda memajukan kesejahteraan rakyat bumiputera dalam arti luas. Jadi bukan hanya mencukupi kebutuhan pangan dan sandang, tetapi juga keamanan dan pendidikan. Pendidikan Barat disebarluaskan dan terus menerus ditingkatkan. Di banyak daerah didirikan sekolah rakyat, kemudian diikuti dengan pendidikan setingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, mulai dengan STOVIA, NIAS, THS, RHS dan kemudian GHS yang menggantikan STOVIA. Pada awalnya sekolah-sekolah yang agak tinggi dan kemudian sekolah tinggi ada di Jawa. Pemuda-pemudi dari luar Jawa harus pergi ke Jawa untuk belajar. Hal itu menguntungkan bagi proses integrasi. Banyak di antara mereka yang kemudian menemukan jodohnya dari masyarakat lain suku atau daerah. Beberapa contoh : Moh. Hatta, Joh Leimena, Joh. Latuharhary, Sjahrir, A.H. Nasution, Ny. Sunario (istri Prof. Sunario, tokoh PI dan PNI yang masih ada hingga sekarang). Dalam tahun 1903 pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang otonomi, yang memungkinkan daerah-daerah kabupaten dan kotapraja memiliki badan "perwakilan". Kemudian disusul pada tahun 1916 pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang pembentukan Volksraad, badan konsultatif yang anggotanya berasal dari seluruh Indonesia. Meski Volksraad pernah dijuluki "Komedi Omong Kosong", tetapi keberadaan wakil-wakil rakyat dari berbagai daerah itu memberi peluang untuk berlangsungnya proses integrasi. Tak terkecuali tentu saja sifat-sifat jahat dari penjajahan, seperti penindasan, pemerasan dan diskriminasi, memberikan peluang untuk berkembangnya rasa senasib-sepenanggungan dan pembentukan cita-cita yang sama: bangsa Indonesia yang merdeka.

Faktor kelima adalah paham nasionalisme dan ajaran-ajaran baru dari Barat, seperti demokrasi, republik, nasionalisme, konstitusi, sistem perwakilan, hak-hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri, trias politica, kooperasi, sistem upah yang adil, persamaan hak, dan sebagainya. Berbagai paham itu mampu mendorong proses integrasi nasional pula.

Dari uraian di atas nyatalah bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang.¹ Pada masa sebelum tahun 1945 proses integrasi itu terutama terarah kepada dua sasaran: persatuan orang Indonesia dari berbagai kelompok di satu sisi dan musuh dari luar, yaitu penjajah Belanda.² Proses integrasi itu telah mampu membuat daerah-daerah yang begitu luas menyatu (integrasi horisontal atau teritorial).³ Begitu juga banyak orang dengan segala tingkatan, ada elit dan massa, bersatu menjadi satu bangsa (integrasi vertikal atau politik).⁴

PERSOALAN PEMBANGUNAN BANGSA

Menghadapi penjajah gerakan menyatu sudah berhasil memenangkan perang, sehingga dalam tahun 1945 kita mampu memproklamasikan kemerdekaan dan pada tahun 1949 kita berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan. Kita berhasil memenangkan perang karena kita berhasil memobilisasi berbagai faktor kekuatan yang dapat dibangun pada masa-masa sebelumnya, yaitu penggalan kekuatan semasa pergerakan kemerdekaan, pada jaman Jepang dan revolusi kemerdekaan. Di antara kekuatan itu yang kiranya paling menonjol adalah: **persatuan nasional, solidaritas nasional, kerelaan berkorban jiwa raga dan harta benda, kecerdikan dan keberanian berdiplomasi dan berperang melawan musuh, kecerdikan dalam menggelar diplomasi internasional, kemampuan mengajak seluruh rakyat untuk berperan serta dalam perjuangan, dan sebagainya.**

Pada umumnya orang Indonesia yang terlibat dalam perjuangan melawan musuh, betapapun kecilnya pengorbanan, sangat bangga dengan keberhasilan mereka melahirkan dan mempertahankan NKRI. Lebih bangga lagi karena NKRI berwilayah begitu luas, dengan segala kebhinekaan dan heterogenitasnya, yang ternyata tidak menghalangi terbentuknya ketunggalan.

Tetapi sesudah kita berhasil mengalahkan dan mengusir penjajah, timbul persoalan bagaimana memelihara persatuan bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membina kerjasama internasional yang saling menguntungkan.⁵

Betapapun bangsa Indonesia telah bersatu, akan tetapi sesungguhnya persatuan bangsa kita itu rendah. Faktornya bukan saja kebhinekaan dalam suku, agama, ras dan aliran (SARA), tetapi melebar ke kesenjangan sosial dan perbedaan persepsi politik.

Kesenjangan sosial dan perbedaan persepsi politik mudah menimbulkan perbedaan pendapat, yang kadang-kadang menjurus ke konflik, yang sementara ini dapat diredam dengan kebijaksanaan yang bagi banyak orang terutama cendekiawan, seperti dosen-dosen di PT, wartawan, budayawan, seniman, bahkan sejumlah politisi, dirasakan otoritarian.

Bila rasa otoritarian itu terjadi pada masa penjajahan, yang terjelma dalam berbagai bentuk penindasan dan pemerasan, atau politik diskriminatif pemerintah jajahan, mudahlah untuk dimaklumi. Tetapi kalau rasa otoritarian itu terjadi dalam masa kemerdekaan, maka penilaiannya lain. Di kalangan masyarakat terdapat perasaan dijajah oleh bangsanya sendiri. Perasaan itu menyangkut bukan saja kalau warga masyarakat berhadapan dengan birokrasi, baik sipil maupun militer, tetapi juga dalam bidang usaha ekonomi. Kalau dalam masa penjajahan kita mengenal pangreh praja, maka dalam alam kemerdekaan kita mengubahnya menjadi pamong praja. Tetapi itu baru terbatas dalam teori. Dalam praksis sifat pangreh itu

masih terasa dan kadang-kadang menyakitkan mereka yang mempunyai urusan dengan birokrasi, misalnya dalam hal berbagai macam perijinan. Karena itu bukan hal yang mengherankan kalau baru-baru ini Presiden sampai mengingatkan para pegawai negeri, lebih-lebih pejabat pimpinannya, benar-benar bersifat dan bersikap melayani rakyat atau masyarakat.

Selama ini terbukti bahwa mengatur dan menyelenggarakan negara merdeka, negara kita sendiri, tidaklah mudah. Akan tetapi berbagai ciri yang terdapat atau negara jajahan haruslah disingkirkan. Di antaranya yang menurut hemat saya mendesak adalah :

1. Pembentukan pemerintahan yang benar-benar bersih dan karena itu berwibawa;
2. Aparat pemerintah hendaklah bersifat adil (tidak diskriminatif dalam bentuk apapun);
3. Aparat pemerintah tidak bersifat dan bersikap menindas rakyat, justru karena aparat yang menindas dan memeras hanya layak pada aparat kolonial;
4. Pemerintah bersifat dan bersikap partisipatif dalam arti mengikutsertakan sebanyak-banyaknya warga dalam pengembalian dan pelaksanaan keputusan;
5. Perusahaan-perusahaan nasional supaya memperlakukan para karyawannya benar-benar sebagai keluarga dan dengan gaji serta tunjangan dan jaminan sosial yang adil menurut ukuran umum, jangan kalah dengan perusahaan-perusahaan jaman kolonial dahulu.
6. Pemerintah dan perusahaan diharapkan tidak hanya mampu membuat rumusan-rumusan, apakah itu menyangkut hak-hak asasi manusia ataupun hak-hak karyawan, tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaan dari hak-hak itu bagi yang bersangkutan.

Demikianlah enam hal yang dalam pikiran saya mendesak; jadi dalam jangka waktu pendek harus diwujudkan atau dilaksanakan. Untuk jangka panjang, menghadapi era globalisasi yang makin intens, dan memasuki era perdagangan bebas ASEAN maupun APEC, banyak hal yang harus kita kerjakan. Semuanya itu sering dikaitkan dengan ramalan futurologi seperti John Naisbitt⁶ atau Alvin Toffler.⁷ Ramalan mereka tentu belum pasti menjadi kenyataan, tetapi sedikitnya dapat membantu membaca kecenderungan perkembangan peradaban dunia yang tampaknya berjalan makin cepat saja.

Dengan membaca kecenderungan-kecenderungan dalam perkembangan peradaban dunia dan terkait dengan soal pembangunan bangsa, tentu muncul pertanyaan apa yang harus dibangun dalam diri bangsa ini ? Jumlah hal di bawah ini dapat menjadi jawabannya :

1. Kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air;

2. Penghargaiannya terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
3. Kebanggaan terhadap prestasi sendiri maupun bangsanya, dan membenci atau malu atas kegagalan sendiri dan bangsanya;
4. Etos kerja yang mendukung budaya berprestasi dan budaya malu gagal berprestasi.

Mungkin benar juga kalau kita menyatakan bahwa hal yang harus dibangun itu menyangkut nasionalisme, tetapi bukan sekedar nasionalisme politik, yang menyangkut kemerdekaan dan demokrasi, tetapi nasionalisme yang multi-dimensional, yang menyangkut banyak dimensi, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum dan sebagainya.

Kalau kita hubungkan dengan anjuran Prof. Sartono,⁸ nasionalisme kita hendaklah mengandung di dalamnya prinsip-prinsip: unity, liberty, equality, personality (identity) dan performance. Marilah kita mencoba untuk memahami prinsip-prinsip itu. Paham nasionalisme jelas mengajarkan persatuan bangsa. Kalau dikaitkan dengan salah satu semboyan revolusi Perancis, persatuan bangsa dekat dengan persaudaraan, sebab bagaimanapun persatuan bangsa tanpa persaudaraan hidup di dalam bangsa itu tidaklah mungkin. Persaudaraan sejati tidak mengenal batas kesukuan, agama, ras atau aliran. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan betapa penting dan benar-benar berfungsinya persatuan sebagai kekuatan perjuangan.

Dalam nasionalisme kebebasan atau kemerdekaan merupakan prinsip yang sangat menjiwai perjuangan, terutama tampak pada jaman revolusi. Dalam masa itu bangsa kita berani menyatakan kemerdekaan atau mati. Dalam pandangan bangsa Indonesia merupakan barang yang begitu berharga sehingga bangsa Indonesia berani mempertaruhkan jiwa raganya demi kemerdekaan. Bung Karno mengajarkan kepada bangsanya bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas, yang dapat diartikan sarana yang sangat berharga. Dengan kemerdekaan bangsa Indonesia bebas untuk mengatur penyelenggaraan negara sendiri, sesuai dengan aspirasi seluruh bangsa.

Prinsip ketiga adalah persamaan derajat semua orang Indonesia. Nasionalisme mengajarkan bangsa Indonesia bahwa semangat bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat, yang memberi peluang yang sama kepada semua orang Indonesia untuk menduduki pos-pos pelayanan negara atau pemerintah, tanpa membedakan satu dari lainnya, entah karena faktor suku, agama, ras atau aliran. Prinsip nasionalisme tidak membenarkan adanya warganegara kelas dua.

Prinsip keempat dari nasionalisme adalah jati diri. Bila kita berpikir konsisten, maka jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian nasionalisme kita akan mampu menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Akan tetapi dengan Pancasila orang Indonesia menghargai bangsa lain sederajat dengan dirinya sendiri. Dan justru karena itu

persaudaraan antar bangsa dapat diciptakan. Dengan begitu pulalah bangsa-bangsa di dunia akan dapat bekerjasama saling menguntungkan, demi kesejahteraan dan perdamaian.

Prinsip kelima adalah performance, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kinerja atau penampilan. Prinsip kinerja menolak nasionalisme berkebangsaan kosong, melainkan berkebangsaan prestasi. Kita diajar bangga menjadi orang Indonesia, kalau orang Indonesia berprestasi.

Kecuali itu kita pernah juga diajar Prof. Sartono bahwa nasionalisme kita bersifat multidimensional.⁹ Dalam nasionalisme Indonesia terdapat dimensi politik, yang di dalamnya terdapat sikap anti penjajah dan pro kemerdekaan, anti pemerintahan otoriter dan prodemokrasi. Dimensi kedua adalah dimensi ekonomi, yang menghendaki keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ketiga adalah dimensi sosial, yang menghendaki kesamaan derajat bagi semua orang serta kerukunan sesama manusia, serta dimensi kebudayaan yang menghendaki bangsa Indonesia memiliki kebudayaan nasional, bukan sekedar bangsa yang pandai meniru budaya bangsa maju, tetapi mampu mengembangkan inventifitas dan kreativitas sendiri.

Demikianlah hal-hal yang menyangkut persoalan pembangunan bangsa. Maka dalam paragraf berikut akan saya uraikan masalah sejarah dan pembangunan bangsa.

SEJARAH DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Dengan menyebut persoalan pembangunan bangsa seperti di atas, muncul pertanyaan: peran apa yang dapat dimainkan oleh (ilmu) sejarah? Pertanyaan itu lebih khusus dibandingkan dengan masalah Ilmu Sejarah dan Masa Depan yang dibahas dalam sarasehan di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1994, dan yang kemudian dimuat dalam majalah Basis, edisi September 1994.

Sesuai dengan hakekat (ilmu) sejarah, yang mempelajari perbedaan masa lalu sebagai suatu proses, maka ia berfungsi sebagai guru kehidupan. Orang Yunani Kuna menyatakan bahwa *historia vitae magistra*.¹⁰ Sejarah merupakan pengalaman kolektif masyarakat yang berperan sebagai guru yang paling baik (*experience is the best teacher*).

Untuk membuktikan bahwa sejarah memang merupakan *historia vitae magistra* tidak ada yang lebih baik dari pada menjelaskan sejumlah peristiwa sejarah yang memang dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa, dalam arti yang seluas-luasnya. Peristiwa sejarah itu baik yang terjadi di tanah air maupun yang terjadi di luar negeri, yang berpengaruh bagi penataan negara dan masyarakat kita sepanjang sejarahnya.

Peristiwa-peristiwa sejarah tanah air yang jelas dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa, misalnya, adalah pesan kesepakatan pemuda dalam kongres 1928, pidato pembelaan Bung Karno di pengadilan kolonial, alinea I Pembukaan UUD 1945, Pidato Syahrir di DK-PBB tahun 1947, Pemberontakan PKI 1948 dan 1965, sejarah politik LN-RI, Trikora dan serbuan Sultan Agung ke Jakarta, konsep sishankamrata, dan pemanfaatan telekomunikasi untuk persatuan dan kesatuan.

Marilah kita bicarakan satu-persatu. Pertama tentang pesan para pemuda.¹¹ Pada umumnya kita hanya mengenal kesepakatan para pemuda dalam Kongres Pemuda 1928 adalah ikrar satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Tetapi itu belum lengkap. Para pemuda juga menyampaikan pesan, demi memperkuat persatuan supaya rakyat Indonesia mau mempelajari sejarah, khususnya sejarah bangsanya. Dengan demikian para pemuda dalam Kongres tahun 1928 sungguh memahami manfaat sejarah bagi pembangunan bangsa.

Kedua, pidato pembelaan Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial di Bandung dalam tahun 1930. Pidato itu aslinya dalam bahasa Belanda dan berjudul Indonesia Klaagt aan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Indonesia Menggugat.¹² Dalam pembelaan itu Bung Karno memanfaatkan karya-karya sejarah yang menyangkut pemerahan atau pengerukan kekayaan Indonesia selama Belanda menjajah Indonesia, dan pemerasan atas hidup rakyat, misalnya, dalam bentuk pemberian upah yang sangat rendah, sedangkan tenaga-tenaga Belanda mendapat upah yang sangat tinggi.

Ketiga adalah pidato Syahrir di DK-PBB pada tanggal 5 Agustus 1947, hampir sebulan setelah Belanda melancarkan agresinya yang pertama.¹³ Termasuk hal yang istimewa bahwa delegasi RI diijinkan hadir dalam sidang DK-PBB dan boleh menyampaikan pidato. Dapat diduga bahwa Syahrir akan memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya demi membela RI. Ternyata dalam membela RI Syahrir memanfaatkan sejarah kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Ia, antara lain, menyatakan bahwa sebelum bangsa Indonesia dijajah Belanda, rakyat Indonesia pernah memiliki kerajaan besar yang merdeka. Selanjutnya ia menerangkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan sekarang sebenarnya hanyalah untuk memulihkan kerajaan itu kembali.

Keempat adalah alinea pertama dari Pembukaan UUD 1945. Dalam alinea pertama itu bangsa Indonesia menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan harus dilenyapkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan". Substansi kalimat itu jelas dirumuskan berdasarkan studi sejarah sebelumnya. Memang pada masa sebelum pembukaan dirumuskan bangsa Indonesia hidup dalam penderitaan yang berat di bawah penjajahan Jepang yang kejam. Dengan perkataan lain pengalaman sejarah melatarbelakangi penyusunan Pembukaan UUD 1945.¹⁴

Kelima adalah pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965. Kedua pemberontakan itu dilancarkan oleh PKI untuk merobohkan pemerintah RI yang sah, dan mendirikan pemerintahan komunis.¹⁵ Itu berarti PKI mencoba untuk membubarkan negara RI yang berdasarkan Pancasila. PKI sendiri memang sebenarnya sudah bertentangan dengan Pancasila, karena PKI bersifat atheistik, sementara sila I dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu rakyat Indonesia tidak mau lagi menerima keberadaan PKI dan ormas komunis.

Keenam adalah politik luar negeri RI.¹⁶ Dalam sejarah menjelang meletusnya pemberontakan PKI tahun 1965 kita mempraktekkan politik isolasi dengan membentuk poros Jakarta-Beijing. Kita juga memusuhi Malaysia dan keluar dari PBB. Ternyata politik yang tidak konsekuen bebas dan aktif itu merugikan rakyat. Maka dari itu kita meluruskan kembali politik luar negeri, supaya sungguh-sungguh bebas-aktif. Untuk pembangunan nasional kita memerlukan banyak sahabat. Maka kita membubarkan politik poros-porosan, menghentikan konfrontasi melawan Malaysia dan aktif kembali di PBB. Untuk membiayai pembangunan nasional sejumlah negara membentuk IGGI dan kemudian CGI.

Ketujuh adalah pembebasan Irian Jaya. Setelah Belanda sungguh-sungguh tidak mau menyerahkan Irian Jaya ke dalam kekuasaan RI, maka RI kemudian melancarkan Trikora. Demi suksesnya Trikora kekuatan fisik tidak cukup, tetapi harus didukung oleh semangat melawan penjajahan yang kuat. Maka dari itu pengumuman Trikora diucapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Mengapa demikian? Yogyakarta merupakan pusat gerakan pertama pengusiran Belanda dari Batavia (Jakarta) dalam bentuk serbuan pasukan Mataram ke kota itu pada tahun 1628 dan 1629, sedangkan tanggal 19 Desember (1948) adalah tanggal Belanda si penjajah melancarkan agresi Belanda II.¹⁷

Kedelapan adalah pengembangan konsep sishankamrata. Sishankamrata yang kita kembangkan sekarang jelas diwarnai oleh pengalaman sejarah perang kemerdekaan, khususnya pada waktu menghadapi agresi Belanda II. Menghadapi agresi itu pemerintah RI dan TNI mengubah siasat pertahanan linier menjadi perang total, atau perang rakyat semesta. Dalam perang itu seluruh rakyat diikutkan dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan barikade, bumihangus, dapur umum, atau mengungsi yang berarti non-kooperasi dengan Belanda. Siasat perang rakyat semesta ternyata berhasil baik, maka siasat itu menjadi dasar bagi pengembangan sishankamrata sekarang.¹⁸

Kesembilan adalah pengembangan telekomunikasi masa kini. Hubungan antara daerah sekarang sangat diperlancar oleh adanya jaringan telpon lewat satelit. Nama satelit komunikasi RI disebut palapa diilhami oleh sumpah Tan Amuktia Palapa Gajah Mada tahun 1331.¹⁹

Di bawah ini dikemukakan pemanfaatan, setidaknya korelasi, sejarah luar negeri untuk pembangunan bangsa. Pertama adalah Revolusi Kemerdekaan Amerika yang ditandai oleh Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776. Revolusi Kemerdekaan

Amerika jelas diwamai oleh semangat kemerdekaan yang kuat. Hal ini berpengaruh kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya PNI, 4 Juli (1927) tentu bukan kebetulan, melainkan dipilih, supaya semangat kemerdekaan bangsa Amerika mengilhami semangat kemerdekaan bangsa Indonesia.²⁰ Deklarasi Kemerdekaan Amerika (Declaration of Independence of The United States of Amerika) ditandatangani oleh semua yang hadir dalam Kongres Kontinental II di Philadelphia, 4 Juli 1776, sebagai wakil bangsa Amerika. Hal itu berpengaruh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang The Indonesian Founding Fathers tanggal 17 Agustus 1945 dinihari di rumah tinggal Laksamana Maida ada pemikiran, misalnya dari Bung Hatta, agar seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika, proklamasi kemerdekaan Indonesia juga ditandatangani oleh semua peserta sidang. Tetapi atas usul Sukarni supaya ditandatangani Sukarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.²¹ Karena itu terdapat perbedaan antara buram dan teks proklamasi yang otentik. Dalam buram tertulis Wakil-wakil Bangsa Indonesia, dalam naskah yang otentik Atas Nama Bangsa Indonesia.

Kedua adalah Monroe Doktrin. Akhir perempat pertama abad XIX negara adikuasa di Eropa memperlihatkan tanda-tanda akan melakukan ekspansi politik ke Amerika Tengah. Presiden Amerika Serikat James Monroe (1817 - 1825) pada tahun 1823 mengeluarkan Doktrin yang terkenal America for Americans. Meskipun saya belum menemukan bukti hubungan causal antara doktrin itu dengan semboyan Indische Partij (Partai Bangsa India), 1912-1913, berbunyi Indie for the Indeiens (India, yaitu Indonesia kelak, untuk orang India).²²

Ketiga adalah semboyan Revolusi Perancis Lyberte, Egalite dan Freternite, berpengaruh di Indonesia. Semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dalam masa revolusi tanpa diilhami oleh Revolusi Perancis pula. Maka tidak mengherankan pada masa revolusi para pemuda bersemboyan Liberty or death,²³ yang tertulis di dinding-dinding bangunan atau gerbong kereta api. Semangat persaudaraan ditandai oleh kerelaan orang-orang desa menerima dan menghidupi para pengungsi dari kota. Kebersamaan antar orang Indonesia tercermin pada panggilan Bung, juga untuk menyebut para pemimpin seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Dirman, Bung Syahrir, Bung Tarjo. Suatu hal yang menarik dalam Surat-surat Kartini,²⁴ dapat kita catat kalau penulisnya dapat berbahasa Perancis, tertarik pula pada semboyan Revolusi Perancis itu. Dan mungkin juga semangat emansipasi dalam revolusi itu mengilhami pula perjuangannya untuk emansipasi perempuan.

Keempat adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Sampai abad XX masih terdapat keyakinan bahwa bangsa Eropa yang kulit putih, ditakdirkan menjadi bangsa yang unggul. Oleh karena itu mereka dapat menjajah bangsa-bangsa lain yang kulit berwarna. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 diartikan sebagai bantahan terhadap mitos keunggulan orang kulit putih. Bila bangsa Indonesia pandai dan maju, mereka juga akan mampu berbuat seperti Jepang, Indonesia mengalahkan Belanda.²⁵

Kelima adalah ajaran Sun Yat Sen dalam bukunya San Min Chui (3 Asas Rakyat), yaitu nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. San Min Chui telah menjadi dasar perjuangan bangsa China mendirikan Republik pada tanggal 10 Oktober 1911 di Nanking. Peristiwa itu mengakhiri penjajahan bangsa Manchu yang sudah ratusan tahun. Bukan saja keberhasilan mendirikan Republik China yang mengilhami perjuangan mendirikan Republik Indonesia, tetapi Tiga Azas Rakyat itu juga mengilhami perkembangan pemikiran tentang perumusan Pancasila pada tahun 1945.²⁶

Keenam adalah ajaran Wilson. Pada tahun 1918 Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan Sekutu. Sehabis perang itu Presiden Amerika, Woodrow Wilson mengeluarkan Empat Belas Pasal usul (Wilson's Fourteen Point) untuk memelihara perdamaian dunia. Salah satu pasalnya adalah The Right of self determination, yang diartikan sama dengan the right of self government.²⁷ Ajaran itu sangat mengesankan pada para pemimpin pergerakan kebangsaan, dan dijadikan sebagai salah satu senjata andalan.

Ketujuh adalah pengalaman bangsa Turki. Dalam Perang Dunia I Kesultanan Turki memihak, secara salah, Jerman yang terbukti kalah. Karena Turki ada di pihak yang kalah, Sekutu mendiktekan perjanjian yang sangat merugikan dan merendahkan. Itulah Perjanjian Sevres, 1920. Sultan Muhammad Kemal Pasha, yang kelak disebut Kemal Ataturk (Kemal Bapak Bangsa Turki), menentang. Kaum Sekutu mengancam akan menyerbu Turki, tetapi kaum nasionalis tidak gentar dan siap menghadapi ancaman Sekutu. Sekutu mengalah dan bersedia mengubah perjanjian Sevres dengan perjanjian Lausanne (1923) yang mengembalikan kehormatan dan hak-hak Turki. Keberanian kaum nasionalis Turki melawan Sekutu dengan kekuatan sendiri sangat mengesankan kaum pergerakan, khususnya pemuda-pemuda Perhimpunan Indonesia (PI), yang kala itu sedang belajar di Belanda.²⁸

Kedelapan adalah kepemimpinan Mahatma Gandhi. Sesudah Perang Dunia I ia muncul sebagai pemimpin pergerakan kebangsaan India yang besar. Ia menggerakkan perlawanan tanpa kekerasan, yang nampaknya mempengaruhi Ki Hadjar Dewantara dalam memprotes Undang-undang Sekolah Liar (1932).²⁹ Dalam melawan Inggris Gandhi juga menganjurkan swadesi (memakai produk negeri sendiri). Tampaknya itu berpengaruh juga di Indonesia, seperti diperlihatkan oleh PARINDRA yang menganjurkan orang berbusana kain lurik produk industri rakyat.³⁰ Dalam sejarah perumusan Pancasila ajaran Gandhi tentang kemanusiaan juga bergema, seperti kata Bung Karno dalam pidato 1 juni 1945, "My nationalism is humanity".³¹

Kesembilan adalah keberhasilan Republik India mendapatkan kedaulatan dari Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947. Perjuangan kemerdekaan India diwarnai oleh keberhasilan-keberhasilan India berunding dengan Inggris. Delegasi Indonesia

memandang bermanfaat untuk belajar dari India dalam menghadapi perundingan KMB. Maka delegasi Indonesia berangkat lebih awal, supaya dapat singgah di New Delhi dan belajar dari pengalaman Indie.³²

PENUTUP

Dari uraian yang telah saya paparkan di atas secara jelas dan konkret berfungsinya ajaran *historia vitae magistra* terlihat. Dalam berbagai contoh kejadian nyata sejarah berkorelasi positif dengan pembangunan bangsa. Sejarah bermanfaat dan dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa.

Dengan demikian saya dapat berharap uraian ini ada manfaat bagi pembacanya barang sedikit.

CATATAN

- (1) Prof. Sartono Kartodirdjo memberikan gambaran yang baik tentang proses integrasi dari 1500 sampai 1900 dalam bukunya *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, jilid I, Gramedia, Jakarta, 1987.
- (2) Proses integrasi bangsa Indonesia menyangkut dua sasaran, regionalisme dari dalam dan imperialisme dari luar. Bandingkan J.D Legge dalam *Indonesia*, Prenticehall, Inc., Englewood Cliffs, 1964, p. 113.
- (3) Tentang integrasi horisontal, periksa Nasaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, p. 1-8.
- (4) Tentang integrasi vertikal, periksa *ibid*.
- (5) Periksa Adam Swarz, *A Nation in Waiting*, Allen dan Unwin, St. Leonards, 1994, p. 5-6.
- (6) John Naisbitt meramal kemungkinan kejayaan Asia dalam delapan bidang perubahan, a.l. Perubahan dari Padat Karya ke Teknologi Canggih dan Dari Dominasi Kaum Pria ke Munculnya Kaum Wanita, dalam bukunya *Megatrends Asia*, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 1995. bab 6 dan 7.
- (7) Alvin Toffler dalam *Powershift* mendaftar 64 buku sejarah dari 592 buku bacaan untuk menyusun ramalannya. Jelaslah pentingnya sejarah dalam penyusunan ramalan itu. Periksa bukunya *Powershift*, Bantam Books, New York, 1990, p. 503-506.
- (8) Periksa Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa*, Aditya Media, Yogyakarta, 1994, p. 24 dan *passim*.
- (9) Tentang nasionalisme Indonesia yang multidimensional, periksa Sartono Kartodirdjo, "Kolonialisme dan nasionalisme di Indonesia pada abad ke-19 dan abad ke-20", dalam *Lembaran Sedjarah*, FS-UGM, Yogyakarta, No. 8, Djuni 1972, p. 56 dst.
- (10) Tentang *historia vitae magistra*, periksa J.H. Plumb, *The Death of the Past*, Pelican, Harmondsworth, 1973, p. 85. Juga Henri Marrau, *The Meaning of History*, P.H. Dublin, 1966, p. 281. Periksa juga G. Goedjanto, "Ilmu Sejarah dan Masa Depan" dalam *Basis*, September 1994, p. 321 dst.
- (11) Tentang pesan para Pemuda dalam Kongres 1928 supaya orang Indonesia mempelajari sejarah guna meningkatkan persatuan bangsa, periksa Abdurrachman Surjomihardjo dkk, *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*, Balai Pustaka, 1978, p. 544.
- (12) Tentang paparan sejarah Indonesia oleh Bung Karno, khususnya dari "zaman Kompeni sampai PNI", periksa pidato pembelaannya di pengadilan negeri Bandung, *Indonesia Menggugat*, Penerbit "S.K. Seno", Djakarta, 1951, p. 31-150.

- Cuplikan dari padanya dapat dibaca dalam J.D. Legge, *Sukarno sebuah biografi politik*, terjemahan, Sinar Harapan, Jakarta. 1995. p. 624-625.
- (13) Tentang kutipan pidato St. Syahrir di DK-PBB 14/15 Agustus 1947, periksa Rudolf Mrazek, *Sjahrir* terjemahan, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1996 p. 624-625.
 - (14) Periksa alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Penderitaan rakyat Indonesia direfleksikan di dalamnya. Baca, misalnya, G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20*, jilid I, Kanisius, Yogyakarta, 1993, p. 75-77.
 - (15) Periksa G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20*, jilid 2, bab XIII dan XXII.
 - (16) Tentang politik luar negeri RI dalam masa Orde Lama, periksa *Ibid.*, p. 119.
 - (17) Tentang Trikora, periksa G. Moedjanto, jilid 2, p. 22
 - (18) Tentang siasat pertahanan linier ke siasat pertahan rakyat semesta, periksa *Aktualisasi Nasionalisme Rakyat Jelata*, makalah seminar di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, 12 Agustus 1996. Juga Dinas Militer Kodam VII, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*, Dinas Sejarah Kodam VII bersama C.V. Borobudur Megah, Semarang. 1977, p. 323.
 - (19) Tentang sumpah palapa, yang semestinya tan ayun amuktia palapa (tak ingin makan dengan garam) atau tan amuktia palapa (tak makan garam), periksa Ki J. Padmapuspita, *Pararaton* (teks dan terjemahan), Tamansiswa, Jogjakarta, 1966 p. 38. Teknologi komunikasi merupakan salah satu sarana efektif untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Andaikata pada jaman Gajah Mada sudah ada teknologi komunikasi modern, maka pekerjaan Gajah Mada akan dipermudah.
 - (20) Tentang pemilihan tanggal 4 Juli (1927) sebagai hari jadi PNI, periksa Adam Malik *Mengabdikan Republik Indonesia*, Jilid I, Gunung Agung. Jakarta, 1978, p. 161.
 - (21) Tentang pemikiran Hatta, periksa Moh. Hatta, *Memoir*, Tinta Mas, Jakarta, 1979, p. 454-455. Sedang usul Sukarni agar teks proklamasi ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia, periksa *ibid.*, p. 455.
 - (22) Tentang semboyan Indische Partij, periksa H.H. De Graf *Geschiedenis van Indonesia*, Van Hoeve, The Hague Bandung, 1949, p. 466.
 - (23) Tentang semangat *Liberty or death*, merdeka atau mati, periksa Usman Raliby, *Sejarah Hari Pahlawan*, Bulan Bintang, Jakarta, p. 56-63. Periksa juga Mrazek, *Opcit.*, p.497.
 - (24) Tentang pengenalan Kartini terhadap semboyan Revolusi Perancis, periksa *Surat-surat Kartini*, terjemahan Sulasti Sutrisno, Jembatan, Jakarta, 1979, p.11 dan 249.

- (25) Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang mengilhami bangkitnya nasionalisme Indonesia, periksa G. Moedjanto, Jilid I, p. 26. Juga Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional*, jilid 2, Gramedia, Jakarta, 1990, p. 59.
- (26) Tentang pengaruh Sun Yat Sen dalam bukunya San Min Chui dalam proses Lahirnya Pancasila. 1 Juni 1945, periksa Pidato Bung Karno dalam Yayasan Idayu, *Sekitar Tanggal dan Penggaliannya*, Idayu, Jakarta, 1981, p. 197.
- (27) Tentang Wilson's *fourteen points*, periksa G. Moedjanto, jilid I, p. 45.
- (28) Tentang pengaruh kaum nasionalis Turki, periksa G. Moedjanto, *Ibid*.
- (29) Tentang perlawanan Ki Hadjar Dewantara terhadap UU Sekolah Liar, periksa Jan Pluvier, *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia*, terjemahan-stensil, Yogyakarta, t.t., p. 65 dst. Juga Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki hadjar Dewantara dan Tamansiswa dalam Sejarah Indonesia Modern*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, p.105 dan 152.
- (30) Tentang pengaruh swadesi Gandhi terhadap swadhesi PARINDRA periksa G. Moedjanto, jilid I, p. 59.
- (31) Tentang ucapan Bung Karno berdasarkan Gandhi "My nationalism is humanity" periksa Yayasan Idayu. *Op.Cit.*, p.196.
- (32) Tentang persinggahan delegasi Indonesia ke KMB di New Delhi, periksa K.M.L. Tobing, *Persetujuan Roem-Roeyen dan KMB*, C.V. Haji Masagung, Jakarta, 1987, p. 1996.

BAB VI DEMOKRASI DI INDONESIA

DEMOKRASI DI INDONESIA SEBUAH LATIHAN

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

PENDAHULUAN

Pada saat komunisme telah menjadi sejarah atau setidaknya tidaknya bukan lagi menjadi ancaman bagi sistem politik dan ekonomi Barat, maka visi Barat tentang politik dan ekonomi hampir-hampir tanpa tantangan. Tetapi ambisi Amerika Serikat untuk memaksakan visi Barat itu secara global telah menimbulkan perlawanan di berbagai bagian dunia. Ada tiga prinsip dasar dari visi Barat itu : kapitalisme dan pasar bebas, hak-hak asasi manusia dan demokrasi liberal sekuler, dan bingkai negara-negara dalam hubungan internasional.¹ Yang repot adalah Amerika dalam memaksakan politik globalnya sering memakai gaya preman hingga demokrasi dan hak-hak asasi yang selalu didengungkan dinilai orang sebagai jubah untuk menutupi watak neo-imperialismenya yang seharusnya dikubur bersama komunisme. Indonesia sebagai negara dalam kategori dunia ketiga dalam membangun demokrasi ingin menghindari gaya premanisme itu, sekalipun dirasakan sangat lamban bila ukuran yang dipakai adalah ukuran budaya urban. Memang bangunan demokrasi di Indonesia menurut pantauan saya masih dalam tahap latihan demokrasi, seperti yang akan kita bicarakan lebih jauh.

DEMOKRASI DI INDONESIA : ANTARA KONSTITUSI DAN PRAKSISME

Sejak proklamasi Agustus 1945 sampai sekarang kita telah mengenal tiga bangunan konstitusi : Konstitusi 1945, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), dan Konstitusi Sementara 1950. Bila mukadimah ketiga konstitusi ini kita cermati kita pasti menemukan perkataan kerakyatan yang tidak lain daripada demokrasi, di dalamnya rakyat menurut konstitusi memegang kedaulatan tertinggi. Konstitusi 1945 memakai ungkapan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".² Konstitusi RIS dan Konstitusi 1950 menggunakan ungkapan yang serupa : "kerakyatan dan keadilan sosial".³ Perlu dicatat

bahwa keadilan sosial bukanlah dasar negara tapi tujuan yang hendak diwujudkan oleh Indonesia merdeka. seperti ditegaskan oleh Hazairin.⁴ Adnan Buyung Nasution menerjemahkan ungkapan kerakyatan itu ke dalam bahasa Inggris dengan "democracy"⁵. suatu terjemahan yang cukup tepat.

Agar kita jangan terlalu risau tentang hari depan budaya politik kita, ada baiknya optimisme Hatta mengenai demokrasi saya sertakan di sini. Proklamator ini yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di Indonesia, sekalipun pasti mengalami pasang surut. Ada tiga sumber demokrasi di Indonesia menurut Hatta. Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme. Kedua, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa Indonesia. Ketiga sumber ini akan menjamin kelestarian demokrasi di negeri kita, sehingga dalam rentang waktu tertentu demokrasi akan kukuh keberadaannya dalam sistem politik kita.⁶

Karena tahap perkembangan demokrasi di Indonesia masih berada pada tahap latihan, bila hipotesa kita ini mengandung kebenaran, maka pengalaman kita selama 51 tahun pasca proklamasi tentu akan menyadarkan kita bahwa untuk membangun sebuah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian kita memerlukan kesungguhan dan kesabaran. Seorang Hatta pernah juga jengkel melihat pelaksanaan Pancasila yang di dalamnya prinsip demokrasi wajib dijunjung tinggi. Hatta menulis "Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu hanya diamalkan di bibir saja. Tidak banyak manusia Indonesia yang menanam Pancasila itu sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa kelima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri".⁷ Catatan kita adalah bahwa bila seorang demokrat sabar semisal Hatta jengkel juga melihat budaya politik kita yang kurang menghormati demokrasi dan bahkan Pancasila, apalagi kita yang sering kurang sabar ini. Tapi mohon diingiat bahwa sebuah bangunan demokrasi yang sehat tidak mungkin ditegakkan tanpa kesungguhan, kesabaran, dan melalui proses pencerahan terus menerus.

Mengapa harus demokrasi ? Bukankah demokrasi sebagai sistem politik sering lamban dalam mengambil keputusan ? Memang demikian. Tapi berdasarkan pengalaman umat manusia selama lebih kurang 300 tahun terakhir ini, sistem demokrasi adalah yang terbaik di antara sistem politik yang ada, sekalipun pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi budaya tertentu. Demokrasi liberal ala Barat pernah kita operasikan di Indonesia tahun 1950-an di bawah payung Konstitusi 1950, tapi ternyata telah melahirkan pemerintahan yang tidak stabil. Karena tidak stabil, umumnya tidak ada yang melebihi dua tahun. Pertanyaannya adalah : bagaimana kita dapat membangun ekonomi bila kabinetnya selalu berumur pendek ? Indonesia tidak dapat disamakan dengan Jepang misalnya. Masyarakat Jepang dalam infra struktur politik dan ekonomi telah

mapan hingga sebuah kabinet yang berumur pendek tidak banyak berarti bagi pembangunan bangsa dan negaranya. Jepang bahkan telah modern sejak akhir abad ke-19.

Demokrasi ala Barat untuk negara berkembang telah dipraktikkan di India, tapi pembangunan ekonominya sangat tersendat-sendat, di samping kekerasan dan pembunuhan politik telah mewarnai perjalanan bangsa itu. Menurut catatan Asiaweek pendapatan per kepala India tahun 1996 ini hanyalah sekitar \$335,⁸ lebih kurang sepertiga Indonesia yang sudah mencapai \$1,023,⁹ sekalipun yang terendah di lingkungan enam negara Asean. Malaysia dengan pendapatan per kepala sudah mencapai \$3,930¹⁰ melalui sistem parlementer, tapi bila kita cermati lebih hati-hati, kepemimpinan politiknya agak bercorak otoritarian. Fenomena yang mirip kita temukan di Singapura dengan pendapatan per kepala \$26,400 tanpa hutang luar negeri.¹¹ Ini artinya untuk pembangunan ekonomi, demokrasi ala Barat bukanlah merupakan prasyarat, seperti banyak dipercayai orang.

Secara konstitusional Indonesia telah menetapkan demokrasi sebagai sistem politiknya. Tapi dalam pelaksanaannya antara konstitusi dan praksisme sering terdapat kesenjangan. Kadang-kadang kesenjangan itu terlalu jauh hingga ditafsirkan bahwa Indonesia telah melemparkan demokrasi. Ini terjadi terutama pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Seorang Natsir bahkan menilai : "... bahwa segala-galanya akan ada di dalam Demokrasi Terpimpin itu, kecuali demokrasi. Segala-galanya mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa Dalam istilah biasa semacam itu kita namakan satu diktatur sewenang-wenang."¹² Di antara korban Demokrasi Terpimpin adalah St. Sjahrir, salah seorang pendiri republik. D. Sjahruzah dengan nada pilu menulis tentang perjalanan akhir tokoh sosialis ini : "Akhirnya Bung Sjahrir ditangkap, dituduh yang tidak-tidak, yang sama-sekali bertentangan dengan jiwanya. Sekalipun tuduhan tidak terbukti, ia masih ditahan terus... sampai dibebaskan Tuhan yang Mahakuasa dari segala penderitaannya, lahir dan batin."¹³ Korban yang lain cukup banyak, tapi perjalanan Sjahrir adalah yang paling dramatis. Di antara arsitek drama semacam ini adalah kaum komunis Indonesia yang selalu berteriak tentang demokrasi.

Bila dialektika Hegel kita gunakan untuk meneropong perjalanan demokrasi di Indonesia, maka kita akan mendapat gambaran sebagai berikut. Demokrasi Liberal sebagai tesa, Demokrasi Terpimpin sebagai antitesa. Persoalannya adalah apakah sintesa ini benar-benar merupakan sebuah sintesa dalam arti menyerap unsur-unsur yang baik dari dua sistem sebelumnya atau bukan, akan sangat tergantung kepada sudut pandangan kita masing-masing. Pihak pemerintah berpendirian bahwa dengan adanya siklus pemilu sekali lima tahun, maka Demokrasi Pancasila telah semakin mantap dan mengukuhkan jati dirinya. Sebaliknya mereka yang berada di luar sistem sekalipun sebelumnya berada di dalam akan punya penilaian miring tentang praktik Demokrasi Pancasila. Kalau saya pribadi berpendapat, seperti telah diungkapkan di

atas bahwa demokrasi barulah dalam taraf latihan. Masih teramat banyak persoalan fundamental yang perlu dibenahi melalui cara-cara konstitusional. Diantara persoalan itu adalah masalah praktik pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memang dianut oleh semua konstitusi itu. Konsep massa mengambang misalnya perlu ditinjau kembali, sebab bersifat diskriminatif terhadap OPP (Organisasi Peserta Pemilu) yang tidak turut dalam sistem kekuasaan. Dalam demokrasi yang sehat, semua OPP diberi hak yang sama untuk memenangkan Pemilu. Cara ini berlaku universal, tidak ada kaitannya dengan sistem liberal.

Masalah lain yang tak kurang fundamentalnya adalah masalah masa jabatan presiden dan wakil presiden. Saya tidak tahu mengapa dulu para pembuat ketiga UUD kita tidak berpikir untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Konstitusi 1945 Bab III pasal 6 ayat 2 mengatakan : "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali." Untuk berapa kali? Baik UUD 1945 maupun dua yang lain tidak menjelaskan apa-apa tentang masalah yang cukup krusial ini. Mungkin dulu tidak dipandang krusial, tapi sekarang di akhir abad ke-20, masalah ini perlu mendapat perhatian serius. Setidak-tidaknya harus ada TAP MPR yang dapat menampung aspirasi politik rakyat yang sudah jauh berkembang. UUD dibuat bukan untuk harga mati. Bila kita tidak berkehendak mengubahnya, maka harus dirumuskan TAP MPR untuk menyalurkan kegelisahan konstitusional para demokrat Indonesia.

Dalam praktik demokrasi selama ini ada hal lain yang sulit saya pahami. Yang saya maksud ialah ada di antara anggota DPR kita yang sudah berkali-kali dipilih dan belum tampak tanda-tanda untuk memberi peluang kepada calon yang lebih muda. Kalau mereka ini berbicara tentang pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden jelas kurang etis, sebab akan berlawanan dengan prilakunya sebagai anggota DPR. Tapi keadaan akan menjadi sangat sopan bila seorang gubernur, rektor, bupati, dan tentu saja para pengamat bebas mendiskusikan perlunya pembatasan masa jabatan pimpinan tertinggi negara itu. Gubernur, rektor dan lain-lain telah dibatasi oleh UU tentang berapa kali mereka boleh berada dalam posisi itu. Ini adalah praktik demokrasi yang cukup sehat yang perlu dipertahankan. Mungkin masalah umur untuk seorang rektor atau dekan tidak perlu kaku seperti yang berlaku sekarang ini. Mengapa misalnya seorang calon rektor atau dekan harus di bawah 60 tahun, sementara presiden, menteri, dan lain-lain boleh di atas usia itu. Dalam perspektif analisa kita tampaknya para pembuat UU perlu benar tangkas dan jeli dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat kita yang semakin kritis. Demokrasi akan berkembang dengan baik bila rakyat pendukungnya punya nalar kritis tapi konstitusional dan bertanggungjawab. Demokrasi tanpa tanggungjawab dapat menjurus kepada anarki atau ultra demokrasi seperti yang kita lihat pada era 1950-an.

PENUTUP : MENGAPA KITA MEMILIH DEMOKRASI ?

Kita memilih demokrasi karena sistem ini lebih sesuai dengan hakekat dan martabat manusia merdeka. Dalam sistem ini prinsip egalitarian lebih mendapatkan saluran tanpa rasa takut. Kemudian pengalaman sejarah selama era pergerakan nasional, demokrasi telah menjadi cita-cita luhur bagi para pejuang nasional itu. Dan akhirnya ungkapan Reinhold Niebuhr yang bermuansa filosofis akan semakin menyintakan kesadaran nurani kita akan mutlakny demokrasi itu bagi penyelenggaraan politik suatu negara. Kita kutip ungkapan itu : "Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary."¹⁴ Akhirnya masa depan demokrasi Indonesia akan sangat tergantung kepada setia tidaknya kita kepada cita-cita luhur para tokoh pergerakan nasional itu yang sebagian besar telah mendahului kita.

CATATAN AKHIR

- ¹ Graham Fuller. "The Next Ideology." Foreign Policy, No. 86 (Spring 1995), 145.
- ² Lih. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, UUD 1945, GBHN, Kewaspadaan Nasional, Tap-Tap MPR 1993, Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, Jakarta:1996, hlm 1.
- ³ Lih. Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta:Tintamas, 1970, hlm 96-97.
- ⁴ Ibid, hlm. 12.
- ⁵ Adnan Buyung Nasution, The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia:A Social-legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 443,450 and 487.
- ⁶ Lih. Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta : LP3ES, 1987, hlm. 156.
- ⁷ Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila. Jakarta : Idayu Press, hlm. 19-20.
- ⁸ Asiaweek, Vol. 22, No. 23 (June 7. 1996),59.
- ⁹ Berdasarkan keterangan Ginandjar Kertasasmita dalam Jawa Pos, 19 April 1996, hlm 1. Ditambah pula bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1995 mencapai 8,07%.
- ¹⁰ Asiaweek, op.cit., 59.
- ¹¹ Ibid.
- ¹² Lih. Yusuf Abdullah Puar, "Trias Politika RI Sering Digugat." Panji Masyarakat, No. 250, Th. XX (Juli 1978), 23.
- ¹³ Lih. Rosihan Anwar, Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir. Jakarta : Pembangunan, 1966, hlm. 6.
- ¹⁴ Dikutip dalam Samuel P. Huntington, "Democracy for the Long Haul." Journal of Democracy, Vol. 7, No. 2 (April 1996), 13.

DEMOKRASI DI INDONESIA

(P.J. Suwamo)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Bangsa Indonesia yang mulai bangkit tahun 1908 berhasil mendirikan negara kebangsaan pada tahun 1945. Dari dasar negara yang ditetapkan tampak bahwa bangsa Indonesia menghendaki negara demokrasi konstitusional. Hal ini tampak dari alinea keempat UUD 1945 yang berbunyi :

.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat.

Kata-kata 'Undang-undang Dasar' itu menunjukkan sifat konstitusionalnya sedangkan kata-kata 'Republik' dan 'kedaulatan rakyat' menunjuk demokrasi, sebab Republik sebenarnya berarti negara itu urusan rakyat (*res*=urusan, *publica*=umum), sedangkan kedaulatan berarti rakyatlah yang memerintah atau demokrasi (*demos*=rakyat *cratos*=pemerintahan).

Kehendak mendirikan negara demokrasi itu diwujudkan sejak tahun 1945. Berdasarkan UUD 1945 itulah dibangun suatu struktur sistem pemerintahan. Dalam periode awal berdirinya negara dibangun suatu pemerintahan yang kekuasaannya memusat pada tangan presiden yang menjadi kepala pemerintahan dan sekaligus memegang kekuasaan MPR, DPR dan DPA, karena keadaan masih sangat darurat. Dengan demikian yang muncul bukan sistem pemerintahan demokrasi tetapi justru memberi kesan sistem otokrasi yang memungkinkan presiden bertindak otoriter.

Situasi demikian segera mendapat kritik dari Sutan Syahrir yang tumbuh dalam kultur Barat. Kritik ini mendapat akomodasi dari Wakil Presiden Muh. Hatta yang juga menghabiskan masa mudanya ditengah-tengah masyarakat yang berkultur demokratis di negeri Eropa khususnya di negeri Belanda. Maka diubahlah sistem pemerintahan otoriter menjadi sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan mengubah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi lembaga legislatif yang memegang kekuasaan DPR sekaligus MPR dan Presiden menyerahkan wewenang

sebagai kepala pemerintahan kepada Perdana Menteri. Dengan demikian dia hanya menjadi kepala negara. Sistem ini dapat diakomodasi oleh UUD 1945 lewat pasal IV aturan peralihan.

Demokrasi parlementer itu dapat diwujudkan oleh negarawan dan politisi yang hampir semua mendapat pendidikan modern dari Belanda. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba memperkenalkan sistem itu kepada masyarakat baik lewat caramah-ceramah, pidato-pidato di rapat umum maupun lewat tulisan-tulisan dalam surat kabar. Sampai tahun 1949 partisipasi rakyat dalam mengurus negara masih penuh sebab didorong oleh nasionalisme yang tinggi. Baik di wilayah yang dikuasai Republik Indonesia (RI) maupun yang dikuasai Netherlands Indies Civil Administration (NICA) rakyat mempunyai perhatian besar terhadap berdirinya negara RI yang merdeka dan mereka siap berpartisipasi untuk membelanya. Mereka berhasil memperoleh negara berdaulat dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat lewat Konferensi Meja Bundar.

Oleh karena para pemimpin Indonesia merasa pemerintah Belanda masih menitikkan kepentingannya dalam negara RIS ini maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS mengubah dirinya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Sejak itu berkembanglah struktur pemerintahan demokrasi liberal yang sesuai dengan kultur Barat modern seperti yang pernah dipelajari oleh kebanyakan pemimpin nasional Indonesia pada waktu itu. Akibatnya terjadi pergulatan legal antara negara dan golongan-golongan masyarakat menurut suku, agama, ras dan aliran. Ketika pergulatan itu belum tuntas TNI mendukung kepala negara untuk mengakhiri pergulatan legal itu dengan mendekritkan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Dewan Konstituante yang legal.

Sejak itu dibangunlah sistem pemerintahan patrimonial yang dilapisi kultur timur terutama Indonesia khususnya Jawa. Dengan sebutan populer Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Sukarno. Kalau periode 1959-1965 pembangunan struktur pemerintahan patrimonial itu masih sementara dan pelapisan budaya timur itu baru dalam tahap awal dan masih agak malu-malu terhadap pemimpin-pemimpin politik produk kultur Barat maka pada tahun 1966 struktur patrimonial itu setapak demi setapak dilegalisasi dan lapisan budaya timur itu dijadikan jati diri dengan jargon demokrasi Pancasila.

Dari perkembangan pemerintahan negara Republik Indonesia tersebut dan peristiwa yang terpantul dalam media masa orang merasakan bahwa negara republik yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi yang dicita-citakan oleh Bapak bangsa tersebut masih belum terwujud secara penuh. Apakah dalam hal ini budaya Timur merupakan faktor yang menyebabkan demokrasi belum dapat diwujudkan di Indonesia ?

B. Catatan Metodologis

Demokrasi mengandung tiga nilai pokok yaitu : idea partisipasi, tanggungjawab pemimpin kepada rakyat serta terhadap kontrol rakyat dan kesamaan. Partisipasi artinya ikut ambil bagian secara bebas dalam menetapkan hukum. Ini berarti lebih luas dari pada hanya sekedar memilih wakil rakyat saja, tetapi rakyat harus tetap dapat ikut berpartisipasi dengan bebas waktu wakil rakyat itu menetapkan hukum, jadi tidak berarti setelah pemilihan umum kebebasan rakyat hilang. Tanggung jawab pimpinan kepada rakyat artinya sistem politik harus menjamin bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah harus sesuai dengan aspirasi rakyat. Kontrol rakyat terhadap keputusan pemerintah itu harus tercakup dalam mekanisme sistem politik tersebut. Kesamaan dalam demokrasi berarti setiap rakyat harus sama dalam menyumbangkan pemikiran dalam pengambilan keputusan politik tidak dibedakan atas dasar suku, agama, ras, dsb. (Schwarzmantel, 94:33-35).

Sebelum negara Indonesia berdiri bangsa Indonesia sudah mengenal negara bahkan negara yang wilayahnya seluas wilayah negara Indonesia yaitu negara Majapahit. Negara-negara yang muncul sebelum negara Indonesia itu juga memiliki pemerintahan tetapi tidak dapat disebut demokrasi, artinya rakyat tidak dapat berpartisipasi dengan bebas dalam menetapkan peraturan perundang-undangan, pemerintah tidak bertanggungjawab kepada rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan rakyat tidak dapat mengontrol pemerintahan lewat mekanisme politik yang ada, dan tidak ada kesamaan untuk rakyat dalam menyumbangkan pendapatnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sistem pemerintahan demikian didapati dalam negara Sriwijaya, Majapahit dan Mataram yang pada jaman penjajahan Belanda bertahan menjadi tipe Melayu dan tipe Jawa Bali.

Tipe Melayu seperti halnya Swapraja yang terdapat di Sumatera Barat. Jabatan raja merupakan jabatan tertinggi dan titik pusat kekuasaan lahir batin, raja didampingi Dewan Penasehat yang anggotanya diangkat oleh raja sendiri dari lingkungan keluarganya atau dari golongan lain yang oleh raja dianggap mempunyai banyak pengaruh dan tinggi pengetahuannya. (Usep Ranawidjaja, 1955:83). Untuk memerintah kerajaannya raja menyerahkan kekuasaan kepada datuk-datuk. (Suwarno, 1993:32).

Tipe Jawa Bali pada dasarnya raja sebagai penguasa tunggal yang dibantu oleh Papatih Dalem dan para menteri. Papatih dalem ini ditunjuk oleh raja atas persetujuan Gubernur Jenderal. Konsekwensinya kalau ada konflik antara raja dan gubernur jenderal papatih dalem harus memihak gubernur jenderal. Papatih dalem dan para menteri itulah yang memerintah wilayah kerajaan dengan pengawasan pegawai-pegawai Belanda.

Kecuali dua tipe itu pada jaman Hindia Belanda masih terdapat tipe pemerintahan Bugis Makasar seperti yang masih terdapat di Swapraja Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara kecuali Bali, misalnya pemerintahan di Bima. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh sebuah dewan kerajaan yang disebut Hadat. Hadat terdiri atas seorang ketua dan 24 orang anggota yang terdiri atas 6 toresi (menteri pertama), 6 jeneli (menteri kedua). Keduabelas orang itu dipilih oleh kepala kampung yang mewakili rakyat; dan yang 12 orang disebut bumi (menteri biasa). Semua urusan penting dari swapraja Bima dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hadat, sewaktu-waktu hadat dapat memecat Sultan dan dapat mengangkat Sultan baru. Hadat inilah yang berhubungan dengan pemerintah Hindia Belanda (Usep Ranawidjaja, 1955:83-85).

Tipe Sistem pemerintahan Nusantara yang masih bertahan pada jaman Belanda ada sedikit mendekati sistem pemerintahan demokrasi adalah tipe Makasar Bugis yang sekarang disebut Indonesia bagian timur dan sedikit tipe Melayu.

Di Eropa sendiri pada abad XIX menjelang abad XX berkembang pemerintahan liberal yang memandang hak-hak pribadi amat penting dan harus dilindungi terhadap kekuasaan negara. Maka diadakan pembagian di dalam kekuasaan pemerintahan yaitu : kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang saling mengawasi dan mengimbangi. Dewan Perwakilan cukup diisi oleh orang-orang yang memiliki kekayaan tertentu dan merekalah yang disebut warga negara aktif sebaliknya massa berperanan sebagai warga negara yang pasif, merekalah yang dilindungi oleh parlemen dari kesewenang-wenangan negara tetapi tidak berhak mencampuri pembuatan undang-undang dan memilih dilindungi oleh parlemen dari kesewenang-wenangan negara tetapi tidak berhak mencampuri pembuatan undang-undang dan memilih wakil rakyat. Dalam negara liberal orang takut kalau massa yang bodoh dan tak terpelajar itu memasuki dewan perwakilan dan akan menimbulkan tirani mayoritas dan akan mengintervensi pasar bebas.

Dalam periode selanjutnya muncul konsep negara demokrasi yang mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan negara liberal. Konsep ini menganggap negara bukan merupakan ancaman bagi kebebasan masyarakat tetapi merupakan organ atau instrumen dalam keinginan kolektif yang merupakan alat untuk mewujudkan kehendak rakyat. Jadi dalam pengertian negara demokrasi negara merupakan alat yang syah untuk menampung partisipasi semua warga negara dalam semua kegiatannya. (Schwarzmantel, 1994:41-44). Inilah yang biasanya disebut daulat rakyat oleh kelompok Hatta di Indonesia.

Belanda dalam memerintah Indonesia sebenarnya mulai memperkenalkan konsep negara liberal, meskipun tetap melestarikan pemerintahan patrimonial dari penguasa-penguasa pribumi dan dalam kuliah-kuliahnya kepada

mahasiswa-mahasiswa Indonesia dosen-dosen Belanda memperkenalkan konsep demokrasi. Maka dapat diduga kalau semua konsep sistem pemerintahan itu mempunyai pengaruh terhadap pembangunan politik pemerintahan bangsa Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Untuk memeriksa dugaan itu akan dianalisis perkembangan politik pemerintahan di Indonesia dalam periode 1945-1958 yang diduga mendapat pengaruh konsep negara demokrasi liberal dan periode 1959 sampai sekarang diduga mendapat pengaruh tipe-tipe pemerintahan tradisional Indonesia.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN 1945-1959

A. Usaha Menegakkan Indonesia Merdeka.

Ketika Indonesia merdeka maka para pemimpin bangsa yang sebagian besar mendapat pendidikan modern dari Barat mencoba untuk mewujudkan suatu negara demokrasi yang tidak terlepas dari alam pikiran Indonesia. Sebagai dasar ideal negara adalah Pancasila seperti pidato Sukarno yang merupakan hasil pemikiran tradisional Jawa-Bali, Minangkabau dan Makasar Bugis yang dieksplanasikan dengan teori Barat yang sudah dibersihkan dari faham liberalisme sehingga menghasilkan demokrasi yang berjiwa rasa keadilan rakyat menurut Supomo, yang oleh Yamin disebut permusyawaratan dan mufakat, dan oleh Hatta disebut daulat rakyat. Meskipun cita-cita mereka menciptakan dasar negara demokrasi yang bersih dari liberalisme seperti yang dialami dan dipelajari dari dunia Barat, tetapi mereka tidak meninggalkan konsep manunggaling kawulo gusti jawa, Musyawarah mufakat Minangkabau dan perwakilan Makasar Bugis. Oleh karena itu Pancasila sangat fleksibel, artinya mempunyai potensi operasional untuk mewujudkan demokrasi modern tetapi juga dapat jatuh ke praktek patrimonial tipe Jawa Bali sesuai dengan semangat pelaksanaannya. Hal ini ternyata dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar struktural negara Indonesia.

Hal tersebut segera tampak dalam pembentukan pemerintahan pertama kali pada tanggal 2 September 1945. Pada waktu itu Sukarno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjalankan segala kekuasaan dengan bantuan Komite Nasional sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dibentuk menurut UUD. (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945). Kecuali itu semua menteri, kecuali menteri penerangan pejabat dalam pemerintahan Jepang yang sudah kalah, bahkan mereka itu belum diberhentikan oleh Jepang.

B. Usaha Menegakkan Negara Demokrasi 1945-1949

Kabinet pertama itu segera dilihat oleh kelompok muda yang pernah belajar di negeri Belanda sebagai pemerintahan otoriter. Maka mereka menghimbau Syahrir untuk mengadakan perubahan sistem pemerintahan itu sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokrasi seperti yang dicita-citakan oleh pencipta Pancasila. Kawan-kawan Syahrir yang ahli hukum mencari cara untuk mengubah sistem pemerintahan tanpa melanggar UUD 1945. Maka berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan dengan persetujuan Hatta sebagai wakil presiden kedudukan Komite Nasional diubah dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan DPR dan MPR (Maklumat No. X) dan sistem kabinet presidensial diganti menjadi kabinet parlementer. (Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945). Sebelumnya yaitu tanggal 3 November Hatta juga mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengizinkan pembentukan partai politik untuk memperkuat persatuan. Dengan demikian Syahrir berhasil menjadi kepala pemerintahan atas usul anggota-anggota Komite Nasional.

Begitu kekuasaan berada di tangan kelompok Syahrir yang mempunyai hubungan dengan pemimpin-pemimpin sosialis Belanda yang dekat pemerintahan Inggris, maka pemerintahan demokrasi mulai diwujudkan. Perdana Menteri dan para menteri yang kebanyakan pernah bekerja dalam pemerintahan Hindia Belanda bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia lewat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (Bdk. Mrazek, 1996: 478-525) struktur demokrasi parlementer ini bertahan sampai tahun 1948, selama itu Syahrir mendapat oposisi kelompok Tan Malaka, meskipun selalu dapat dipulihkan oleh Sukarno yang sudah berdomisili di Yogyakarta, baru nanti sesudah jatuh bangun akhirnya digantikan oleh Amir Syarifuddin yang sebenarnya juga merupakan kawan Syahrir dalam partai Sosialis. Akhirnya Amir juga jatuh sesudah penandatanganan perjanjian Renville dan jabatan perdana menteri dipegang oleh Hatta yang pada waktu itu menjadi wakil presiden. Dengan demikian menjelang agresi II demokrasi parlementer sudah bergeser ke kabinet presidensial, sebab wakil presiden menjabat perdana menteri.

Waktu Sukarno Hatta masih di Jakarta Sukarno tidak dapat menolak tuntutan Syahrir, maka di Yogyakarta Sukarno merasa mendapat dukungan dari rakyat dan dari Sultan Hamengkubuwono IX. Keahlian pidatonya yang memukau dengan nuansa Jawa Bali mendapat sambutan lebih hangat rakyat Yogyakarta dari pada rakyat Jakarta. Ketika Yogyakarta diduduki Belanda, Sukarno Hatta, Syahrir dan beberapa menteri ditawan Belanda di pulau Sumatera sampai pertengahan tahun 1949.

Dalam periode 1945 itu Sukarno Hatta yang mulai dengan pemerintahan dengan kabinet presidensial yang sedianya akan diikuti dengan pembentukan satu partai negara yaitu Partai Nasional Indonesia, ternyata mendapat tantangan dari kelompok Syahrir yang ternyata dari brosurnya perjuangan kita. (Mrazek, 1966: 488-503). Syahrir dan kawan-kawannya berhasil mengubah pemerintahan Sukarno yang dipandanginya berbau fasis menjadi pemerintahan demokrasi dengan sistem kabinet parlementer. Syahrir sebagai perdana menteri dan Komite Nasional sebagai parlemen. Sukarno dan Hatta tetap menjadi presiden dan wakil presiden yang tidak bertanggungjawab terhadap Komite Nasional sebagai parlemen. Namun dalam situasi-situasi gawat perdana menteri justru berlindung kepada presiden dan wakil presiden terhadap serangan partai oposisi.

Lewat diplomasi dari penjara dan perang gerilya yang tak kenal menyerah dari pemimpin sipil militer dan seluruh rakyat Indonesia akhirnya Belanda menarik diri dari Yogyakarta ibukota RI pada tanggal 30 Juni 1949. Pada bulan Juli pemerintah RI yang dipimpin oleh Hatta sebagai perdana menteri dan Sukarno sebagai presiden dipulihkan dan dikembalikan ke Yogyakarta yang sudah diamankan oleh Sultan Hamengkubuwono IX yang telah diangkat menjadi menteri koordinator keamanan. Kemudian disusun dengan konperensi Meja Bundar yang melahirkan Republik Indonesia Serikat yang berdaulat. Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintahan RIS pindah ke Jakarta, pemerintahan dipimpin oleh Hatta sebagai perdana menteri dan Sukarno sebagai presiden. Seperti halnya Syahrir Hatta mempertahankan pemerintahan demokrasi parlementer sesuai dengan konstitusi RIS. Negara RIS terdiri atas 16 negara bagian, Negara bagian RI yang merupakan negara bagian terbesar melanjutkan sistem pemerintahan dengan kabinet Parlementer yang dulu pernah diciptakan oleh Syahrir dan Hatta lengkap dengan Komite Nasional yang merupakan Parlemennya. Perdana menteri RIS Dr. Abdul Halim sedangkan pejabat Presidennya Mr. Assaat, keduanya orang Minangkabau.

Pemerintah RIS memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi lewat partai politik yang diwakili dalam dewan perwakilan baik di pusat yang berupa DPR dan Senat dan di setiap negara bagian. Namun belum genap setahun RIS berdiri maka atas desakan dewan perwakilan rakyatnya sebagian besar negara bagian bergabung dengan negara bagian RI. Setelah tinggal tiga negara bagian maka RIS mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1950 mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Sukarno mengumumkan RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Usaha Menegakkan Negara Demokrasi Parlementer 1950-1959

Pada waktu itu yang berlaku UUDS yang mendasari sistem pemerintahan dengan kabinet parlementer. Anggota-anggota DPRS terdiri atas wakil-wakil partai-partai politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. Oleh karena jumlah partai politik cukup banyak maka masing-masing tidak memiliki anggota yang cukup untuk menduduki kursi DPRS sejumlah separoh ditambah satu yang merupakan syarat untuk menjadi formateur kabinet. Maka setiap kali presiden harus menunjuk seorang formateur kabinet dari salah satu partai politik yang besar lalu dia membentuk kabinet koalisi.

Tiga kabinet pertama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dipimpin oleh tokoh-tokoh pro Hatta yang memperjuangkan tegaknya demokrasi yang berupa menyambut partisipasi masyarakat dengan memberi kebebasan pers seluas-luasnya, menjunjung tinggi tanggungjawab kabinet kepada DPRS, dan menyambut masukan dari mana saja tanpa membedakan. Mereka masing-masing Perdana Menteri Natsir (September 1950-Maret 1951); Perdana Menteri Sukiman (April 1951-Februari 1952); Perdana Menteri Wilopo (April 1952- Juni 1953). Ketiga kabinet itu berhasil menjalankan programnya, meskipun masing-masing tidak dapat mengatasi oposisi, namun program mereka agak serupa sehingga terdapat kesinambungan. Mereka berhasil mengatur administrasi dan memulihkan komunikasi, mengurangi kegiatan pemberontakan dan kejahatan, menaikkan jumlah industri kecil dan menengah serta memulihkan produksi padi naik 23,2% dalam tiga tahun. Industri meningkat produksinya dan terdapat perluasan yang cepat dalam fasilitas pendidikan dari setiap bidang terutama sekolah menengah dan universitas. (Feith, 1995:13).

Namun masyarakat berkembang cepat berkat bangkitnya kaum nasionalis di kalangan militer dan sipil, mereka menginginkan menyingkirkan pengaruh Belanda dengan cepat. Dengan demikian kabinet Wilopo tidak dapat menahan oposisi dan jatuhlah, lalu diganti oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I yang pro Sukarno (Juli 1953-1955). Maka mulai dipertanyakan masalah Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda, disusul usaha menasionalisasi perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor ekonomi yang masih dikuasai oleh Belanda dan Cina.

Akhirnya kabinet Ali I diganti oleh kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), yang pada masa pemerintahan Indonesia berhasil mengadakan pemilihan umum yang bersih pada bulan September dan Desember 1955, setelah didahului kampanye selama dua setengah tahun. Dalam pemilihan umum ini muncul empat besar PNI mendapat 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 18,4% dan PKI mendapat 16,4%. (Feith, 1955:17).

Kabinet pasca pemilu koalisi antara PNI, Masyumi dan NU yang sangat diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang tertunda pada masa sebelum pemilu, tetapi ternyata harapan itu tak dapat terpenuhi.

Rupanya presiden Sukarno semakin lebih dalam memasuki urusan politik pemerintahan. Seperti diketahui dia seorang pemimpin yang tidak mengalami masyarakat demokrasi modern di Eropa seperti Syahrir, Hatta dan kawan-kawannya tetapi selama penjajahan Belanda menjadi anggota masyarakat yang dicurigai oleh pemerintah dan sering dimasukkan di dalam penjara. Kemudian mendapat pengalaman menjadi orang terhormat dan masuk dalam elit pemerintahan formal dalam periode penjajahan Jepang, bahkan dia dilibatkan dalam mengerahkan dan memobilisasi rakyat untuk kepentingan pemerintah Jepang untuk perang melawan Sekutu. Meskipun dia banyak belajar dari buku Barat modern tetapi lingkungan sosial budayanya Jawa dan Bali. Maka wajar kalau pengalaman yang menyenangkan pada masa muda dan pada masa penjajahan Jepang itu membekas dalam hati sanubarinya sehingga mempunyai pengaruh terhadap pikiran dan tindakannya ketika dia menduduki jabatan tinggi di Republik Indonesia merdeka yang diproklamirkannya bersama Hatta.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAH INDONESIA 1959-1965

A. Usaha Menegakkan Demokrasi Terpimpin 1959-1965.

Maka sebagai presiden ketika dia melihat kabinet Ali II lemah dan tidak mampu mengatasi masalah-masalah militer di luar Jawa yang mulai memberontak (PRRI dan PERMESTA), politik dalam negeri yang terpecah belah dan politik luar negeri yang tidak memuaskan dia kembali memanggil Nasution untuk menduduki jabatannya kembali seperti sebelum peristiwa 17 Oktober 1952. Presiden Sukarno tertarik pada gagasannya kembali ke UUD 1945 seperti pidato-pidato kampanye sebelumnya sebagai pemimpin IPKI. Maka sedikit demi sedikit Sukarno sebagai presiden dan Nasution sebagai pimpinan Angkatan Darat mulai mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari tangan kabinet.

Pada tanggal 21 Februari 1957 presiden menyampaikan konsepsi presiden yang isinya akan dibentuk Kabinet Gotong Royong yang akan menyertakan semua golongan termasuk PKI dan kabinet ini akan didampingi oleh Dewan Nasional yang akan dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Pada tanggal 2 Maret 1957 Masyumi, NU, PSII, Partai Katholik dan PRI Bung Tomo menolak konsepsi presiden itu. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali II menyerahkan mandat tetapi sebelum itu militer mendesak Presiden Sukarno agar menekan Ali Sastroamijoyo menandatangani negara dalam keadaan bahaya (SOB). Dengan berat hati perdana menteri Ali menandatangani.

Dengan demikian presiden leluasa menjalankan konsepsi presiden dengan dukungan militer. (Ramly Hutabarat, 1988:151).

Sejak itu presiden menguasai kabinet yang dibentuknya sendiri dengan perdana menteri Ir. Djuanda yang berbasiskan PNI dan NU. Kegiatan politik partai-partai politik dibatasi, lebih-lebih yang pro pemberontakan PRRI yang dapat diakhiri tahun 1958. Namun PKI yang mendapat angin baik dalam pemilihan DPRD di daerah-daerah keluar sebagai pemenang seperti di DIY PKI menguasai mayoritas kursi DPRD. (Suwamo, 1994 :311). Maka selanjutnya arena politik dikuasai presiden, ABRI dan PKI yang merupakan organisasi politik paling rapi dan berhasil menyusup ke desa-desa dan mendapat tempat dalam konsepsi presiden. Meskipun secara resmi tidak ada menteri PKI dalam kabinet Djuanda tetapi ada beberapa simpatisan PKI yang menjabat menteri pendidikan, pertanian dan pengerahan tenaga kerja. (Ramly Hutabarat, 1988 : 153).

Dalam situasi demikian itu presiden Sukarno menyelesaikan rencananya pemusatan kekuasaan pada dirinya dengan menyelesaikan rancang bangun demokrasi terpimpinnya dengan dukungan ABRI. Upaya pertama mengusahakan berlakunya kembali UUD seperti yang dikehendaki oleh pimpinan ABRI dalam hal ini Mayor Jenderal Nasution. Kemudian menggerakkan Dewan Menteri untuk mendesak Dewan Konstituante untuk menetapkan UUD 1945 secara konstitusional. Maka Dewan Menteri mengadakan sidang dan menghasilkan Keputusan Dewan Menteri mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 yang bertanggal 19 Februari 1959. Keputusan menteri ini mengandung tiga hal pokok yaitu tentang UUD 1945, prosedur kembali ke UUD 1945 dan tentang masuknya golongan fungsional ke dalam DPR. Kecuali diajukan calon anggota DPR dari partai politik juga diajukan dari golongan fungsional yang penempatannya diselang-seling dengan calon dari partai politik; kecuali itu ada anggota DPR yang diangkat oleh presiden yaitu dari golongan ABRI. Kecuali itu akan dibentuk Front Nasional dengan Peraturan Presiden yang fungsinya sebagai pembantu presiden. (Joeinarto, 1984 : 90-95).

Berdasarkan Keputusan Dewan Menteri itu pemerintah menganjurkan Dewan Konstituante menetapkan UUD 1945 berlaku kembali. Sesuai pasal 137 UUDS diadakan pemungutan suara sampai tiga kali (30 Mei, 1 Juni dan 2 Juni 1959), tetapi tidak mencapai dua pertiga suara, maka Konstituante batal menetapkan UUD 1945 berlaku kembali. Maka suasana menjadi tegang dan ada partai politik yang mengatakan tidak mau menghadiri sidang lagi, sehingga keadaan dianggap sebagai keadaan darurat, maka presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali ke UUD 1945. (Joeinarto, 1984 : 99-100).

Dengan demikian Presiden leluasa mengatur lembaga-lembaga negara sesuai dengan Keputusan Dewan Menteri tersebut dan Presidenlah sekarang yang menjadi kepala pemerintahan dan mandataris MP~RS. Setelah itu dikeluarkanlah Penetapan Presiden yang menetapkan DPR hasil pemilu 1955 sebagai DPR menurut UUD 1945. Namun sejak tanggal 24 Juni 1960, DPR diubah menjadi DPRGR dengan Penpres No. 24 Tahun 1960, karena DPR menolak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam DPRGR ini separoh anggotanya dari golongan karya yang diangkat oleh presiden sedangkan sisanya wakil partai politik yang menyetujui presiden. (Joeniarto, 1984 : 121-124).

MPRS dibentuk oleh presiden dengan Penpres No. 2 tahun 1959, sedangkan susunan MPRS diatur dengan Penpres No. 3 tahun 1959. Untuk menampung kekuatan orsospol terutama dalam merebut Irian Barat dibentuk Front Nasional dengan Penpres No. 13 tahun 1959 pada tanggal 31 Desember 1959. Mula-mula Front Nasional ini dibentuk oleh AD untuk merebut Irian Barat tetapi kemudian diambil alih oleh presiden dengan Penpres tersebut dan di semua daerah di Indonesia. (Joeniarto, 1984 : 124-125 dan Suwarno, 1994 : 334).

Kalau pusat dikuasai oleh presiden Sukarno maka daerah dikuasai oleh militer terutama setelah berhasil menghancurkan PRRI dan Permesta, perebutan Irian Barat, nasionalisasi perusahaan Belanda dan Cina, hampir semuanya dibawah kekuasaan militer. Kegiatan partai politik yang ingin menghidupkan demokrasi terutama Masyumi dan PSI selalu diawasi oleh militer. Meskipun Front Nasional sudah diambil alih oleh Presiden secara nasional tetapi di daerah-daerah militer masih mendapat kesempatan untuk membina pegawai negeri sipil dan pamong praja dengan diadakannya Latihan Kemiliteran Pegawai Sipil (LKPS) dalam rangka menghadapi perebutan Irian Barat. Kecuali itu secara umum juga diadakan Wajib Latih (Wala) yang harus diikuti oleh pelajar sekolah menengah, mahasiswa, guru, pegawai swasta, golongan-golongan dalam masyarakat dll. (Suwarno, 1994 : 335). Dalam kegiatan ini Kodam-Kodam memegang peranan penting.

Dengan demikian demokrasi secara substansional di Indonesia ditinggalkan, kebebasan pers mulai dibatasi, pengadilan mulai dicampurtangani, sehingga rule of law mengabur. Namun agak sulit untuk mengatakan bahwa di Indonesia sudah tumbuh pemerintahan yang otoriter sebab kekuasaan sebenarnya tidak pada satu tangan tetapi dua tangan. Di satu pihak di tangan presiden Sukarno yang memegang kekuasaan karismatis sebagai proklamator dan sebagai ahli pidato yang dengan pidato-pidatonya dapat mengubah opini masyarakat luas. Di pihak lain daerah-daerah dikuasai oleh militer terutama AD, yang dengan organisasinya yang rapi dapat meredam gejolak yang pada tahun 1950-an muncul sebagai pemberontakan di daerah-daerah seperti PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi, DI/TII di Aceh

dan di Jawa barat. Kedua belah pihak saling membutuhkan tetapi sebenarnya keduanya juga saling menginginkan kekuasaan tertinggi. (Feith, 1995 : 23-29).

Dalam situasi demikian partai-partai politik mulai tersingkir dari arena politik. Di DPR dan DPRD mereka didesak oleh golongan fungsional atau golongan karya. Meskipun UU No. 1 Tahun 1957 masih berlaku namun pemerintahan daerah diatur dengan Penpres No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa tunggal di daerahnya. Jadi meskipun ada dua kekuatan yang memegang kekuasaan di pusat dan di daerah bersifat sentralistis. Memang semuanya itu oleh Presiden Sukarno masih diberi label sementara dan oleh pihak militer diberi label keadaan darurat.

Dalam situasi kekuasaan seperti diuraikan di atas partai politik memang terpojok tetapi partai yang mampu memainkan peranan di tengah dan tidak memihak salah satu masih dapat mengharapkan bagian kekuasaan. Dalam hal ini PKI lah yang sangat gesit. Ketika separoh anggota DPR diangkat dari golongan karya maka PKI banyak mengajukan calon sebagai wakil golongan karya. Secara formal PKI mendekati presiden untuk mencapai kekuasaan tetapi juga tidak berhenti untuk memasukkan kadernya ke ABRI dengan membina anggota-anggota ABRI sebagai kadernya. Kecuali itu PKI terkenal organisasinya rapi dan menjangkau ke bawah sampai ke rakyat jelata. Oleh karena itu Sukarno melihat kesempatan untuk memperkokoh kekuasaannya ke bawah dengan menggunakan PKI dalam rangka menandingi AD. AD sendiri sebenarnya tidak kompak juga ada bermacam-macam fraksi yang merupakan bawaan dari pertumbuhannya. Ada kelompok mantan PETA dan kelompok mantan KNIL, ada juga militer yang pernah dibina sebagai kader politik oleh Amir Syarifuddin ketika dia menjadi menteri pertahanan dan kemudian ada yang dibina oleh PKI, ada juga yang dekat dengan presiden Sukarno.

Namun ABRI semakin menjadi kuat ketika perjuangan merebut Irian Barat berhasil, kemudian diarahkan oleh presiden atas hasutan PKI menentang pembentukan Malaysia, sehingga perbaikan ekonomi yang sebenarnya sedianya akan dibantu oleh Amerika Serikat terpaksa ditolak dan bangkrutlah perekonomian Indonesia. Dalam situasi demikian muncullah Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Letkol Untung yang membawa jenderal-jenderal AD. Pada saat itu muncullah Letjend Suharto Pangkostrad yang dalam waktu singkat dapat menguasai gerakan Letkol Untung dkk di Jakarta.

B. Usaha Menegakkan Demokrasi Pancasila.

Akhirnya Letjend Suharto dengan dukungan mahasiswa yang dipengaruhi pemikiran intelektual PSI dan Masyumi (keduanya lawan Sukarno) berhasil memegang kekuasaan politik lewat Surat Perintah 11 Maret 1966. Berdasarkan kekuasaan itu dia menandatangani Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang isinya melarang PKI di seluruh Indonesia. Dengan demikian sedikit demi sedikit kekuasaan presiden Sukarno diambil alih dan orang-orang PKI ditangkap oleh militer dengan diklasifikasikan sebagai berikut : Golongan A ; tokoh serta anggota PKI dan pengurus organisasi mantel yang berafiliasi dengan PKI dikarantina; Golongan B ; anggota organisasi mantel yang berafiliasi dengan PKI dan simpatisan PKI dikenakan tahan rumah sesuai dengan situasi setempat; Golongan C; simpatisan organisasi mantel PKI dilepas tahap demi tahap; dan golongan D ; orang-orang yang terseret dalam operasi pembersihan, tetapi ternyata salah tangkap, karena tidak adanya fakta sebagai bukti terlibat. Mereka ini dapat dilepas dengan larangan meninggalkan kota. (Mertju Suar, 17 Oktober 1966 seperti dikutip Suwarno, 1994 : 342).

Dengan demikian lambat laun tetapi pasti Jenderal Suharto sebagai pimpinan AD berhasil mematahkan Sukarno dan PKI, maka tindakan selanjutnya mengembangkan kekuasaan itu menjadi kekuasaan pusat dan daerah secara nyata dan diakui rakyat. Sebenarnya sudah sejak bulan Februari 1966 diadakan usaha untuk menggalang kekuatan politik yang berarti. Pada tanggal 21 Februari - 1 Maret 1966 diadakan kursus kader Sekber Golkar di aula BNI Jalan Thamrin 2 di Jakarta yang diikuti 800 peserta, pemberi kursus terdiri atas Khaerul Saleh, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mulyadi Joyomartono, Jenderal Nasution dan Letjend Suharto. (Suwarno, 1994 :354). Sultan sebagai Badan Pengawas Keuangan menjadi penghubung antara Pejabat Presiden Suharto dan teknokrat yang akan merencanakan pembangunan Indonesia. Mereka itu ialah RADIUS Prawiro, Selo Sumardjan, Widjojo Nitisastro, M. Sadeli, Subroto Ali Wardhana dan lain-lain, Mereka itu kawan Selo Sumardjan sekretaris Sultan yang meletakkan dasar perekonomian pemerintahan Suharto secara mantap. (Suwarno, 1994 : 354).

Kalau Presiden Sukarno dulu menyatakan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin harus kembali ke UUD 1945, maka Jenderal Suharto menegaskan bahwa untuk melaksanakan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Ini merupakan legitimasi kekuasaan nasional, tetapi untuk menguasai daerah pada tahun 1967 empat angkatan yang terpisah disatukan menjadi Departemen Pertahanan yang dalam perkembangannya ke bawah dibentuk 6 KOWILHAN, di bawah KOWILHAN ini setiap angkatan termasuk POLRI mempertahankan strukturnya sendiri, AD terdiri atas 17 Kodam, setiap Kodam membawahi Korem di bekas Karesidenan dan di bawah Kabupaten dibentuk

Kodim untuk metropolitan ada Kogar. di kecamatan ada Koramil dan di desa ada Babinsa. Kecuali itu banyak jabatan Gubernur, Bupati dan Kepala Desa yang dijabat oleh militer. Pada awal pemerintahan Jenderal Suharto dari 26 gubernur, 22 orang militer (85%). 65% Kepala Daerah Tingkat II militer dan 40% kepala desa militer. (Suwarno, 1981 : 157-160).

Setelah pemerintahan daerah dikuasai maka diadakan usaha untuk membentuk kekuatan politik dengan membersihkan Golkar dari unsur-unsur partai politik, maka komandan kodim mengorganisasi Sekber Golkar di daerah masing-masing menjadi suatu organisasi politik yang mampu menghadapi partai-partai politik di DPRD. Setelah itu maka Menteri dalam Negeri mengeluarkan peraturan Mendagri tentang pemurnian Golongan Karya di DPRGR Tingkat I dan II. Jumlah anggota DPRGR dari unsur parpol separuh dan sisanya unsur dari Golongan Karya. Unsur Golongan Karya itu ditunjuk Sekber Golkar, mereka yang berafiliasi dengan salah satu partai politik diharuskan melepaskan afiliasinya, kalau tidak mau diberhentikan.

Setelah Jenderal Suharto menguasai pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatifnya, maka dirancanglah undang-undang pemilihan umum dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yang sebenarnya materinya tidak berbeda dengan peraturan-peraturan presiden yang pernah dikeluarkan pada tahun 1960-an. Kalau tahun 1960-an anggota ABRI yang diangkat berjumlah 35 orang maka pada undang-undang pemilihan umum itu 100 orang dan 20% anggota DPRD diangkat, sedangkan jumlah anggota MPR yang diangkat oleh presiden meliputi sepertiga dari jumlah keseluruhan. Alasan yang digunakan agar kekuasaan tetap berada di tangan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Satu bulan sebelum pemilu dilaksanakan keluarlah Surat Mendagri No. Sus X/3/1/8 yang menegaskan bahwa semua pegawai Depdagri adalah anggota Kokarmendagri karena stelsel pasif, artinya yang menolak akan berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Ini merupakan awal dari pembentukan KORPRI yang meliputi semua pegawai negeri seluruh Indonesia. Mereka harus menyatakan monoyalitas kepada pemerintah. Jadi menjelang pemilihan umum itu sebenarnya kekuasaan sudah ditangan pejabat Presiden Suharto lebih-lebih Presiden Sukarno yang merupakan kekuatan politik di luar AD sudah wafat pada tahun 1970 dan PKI sudah dibubarkan.

Dalam pemilihan umum itu rakyat digiring untuk memilih Sekber Golkar oleh Pamongpraja dan ABRI, PNI lemah karena dituduh banyak disusupi PKI, Parmusi yang menggantikan Masyumi, tetapi mantan pemimpin Masyumi dilarang memegang pucuk pimpinan juga lemah, hanya Nu lah yang masih tetap dengan umatnya di desa-desa terutama di Jawa. Maka Sekber Golkar yang merupakan kontestan baru dalam arena politik itu mendapatkan suara 62%, PNI

hanya mendapat 6.9%. Parmusi mendapat 5.3% dan NU 18.4%. (Liddle, 1992 :196). Jadi kalau pemilu tahun 1955 empat besar urutannya PNI, Masyumi, NU dan PKI, maka pada tahun 1971 juga dikeluarkan empat besar dengan urutan Sekber Golkar, NU, PNI dan Parmusi. Kalau Sukarno dulu menggunakan PKI untuk menguasai rakyat maka Jenderal Suharto menggunakan Pamongpraja dan ABRI untuk menguasai massa rakyat di desa-desa.

Dalam membina negara Sekber Golkar sebagai mayoritas tunggal akan mengembangkan empat peranan, yaitu dalam jalur pertahanan dan keamanan ABRI memainkan peranan payung untuk memenangkan Sekber Golkar; dalam jalur eksekutif akan memainkan peranan modernisator dan penertib fungsi-fungsi yang berdasarkan pada prinsip fungsi dan profesi. Dasar prinsip ini ilmiah yang harus dikembangkan kelompok teknokrat; dalam jalur legislatif Golkar akan berperanan mengubah legislatif menjadi lembaga kerja bersama-sama dengan eksekutif; dan akhirnya dalam jalur masyarakat Golkar berperanan menciptakan kehidupan politik baru yaitu menghapuskan pengkotakan-pengkotakan rakyat dalam kelompok-kelompok ideologi politik. (Suwarno, 1994 : 340). Kalau empat peranan itu dapat dimainkan dengan baik maka dengan Golkar Jenderal Suharto akan mampu menguasai seluruh rakyat Indonesia sebagai penguasa tunggal.

Usaha untuk memainkan peranan itu dilakukan sesudah pemilu 1971 usai. Pada tanggal 29 November 1971 dikeluarkan Kepres No. 82/1971 tentang pembentukan KORPRI. Setiap pegawai negeri harus masuk korpri berdasarkan stelsel pasif. Setiap anggota KORPRI tidak dibenarkan membawa aspirasi atau menjadi anggota organisasi-organisasi yang menjalankan kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan asas, tujuan dan sifat KORPRI. Dengan demikian birokrasi pemerintah sudah dapat dijadikan tiang penyangga yang kuat dari pemerintah dalam menghadapi para tokoh politik yang bertumpu pada partai politik.

Sesudah itu penguasaan pemerintah daerah oleh pusat disempurnakan dengan dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1974. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah daerah diatur dengan Penpres No. 6 Tahun 1959 (DSPK) dan kemudian dikukuhkan dengan UU No. 18 tahun 1965. Materi dari dua peraturan perundang-undangan dikemas dalam UU No. 5 Tahun 1974. Dalam UU ini Gubernur dan Bupati/Walikota yang merupakan bawahan Presiden sekaligus menjadi kepala daerah tingkat I dan kepala daerah tingkat II, yang seharusnya dipilih oleh rakyat lewat wakilnya. Akan tetapi dalam UU No. 5 tahun 1974 ini DPR hanya memilih calon-calon kepala daerah, sedangkan yang memilih menjadi kepala daerah presiden lewat menteri dalam negeri. Kecuali itu secara eksplisit pasal 80 UU No. 5 Tahun 1974 menegaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dan wilayahnya.

Kalau Presiden Sukarno tidak berhasil mengubur partai-partai politik bahkan gagal mengikatnya dalam Front Nasional maka Presiden Suharto berhasil merekayasa fusi partai-partai politik sehingga mereka dapat dilokalisasikan dalam dua partai politik saja yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan pembangunan pada tahun 1973. (Sekretariat Dewan Pimpinan Partai, 1973 : 1-2). Fusi ini kemudian dilegalisasi oleh DPR pada tahun 1975 dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Dengan demikian apa yang tidak dapat dicapai oleh Presiden Sukarno dengan penetapan presiden dapat dicapai oleh Presiden Suharto dengan peraturan perundang-undangan yang dilegalisasi oleh MPR dan DPR serta dilegitimasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dualisme yang menggejala pada masa pemerintahan presiden Sukarno itu pada masa pemerintahan presiden Suharto itu lenyap, ABRI dan birokrasi memiliki monoloyalitas yang tinggi dan Golkar yang dulu hanya untuk membatasi partai politik kini mampu menguasai partai politik dengan memainkan empat peranan dalam pembinaan negara seperti yang telah diuraikan di atas.

Memang masih ada kekuatan rakyat yang dimotori oleh kelompok intelektual dan mahasiswa yang kadang-kadang masih mampu mengkomunikasikan kepada umum pendapat yang berbeda dengan pemerintah, tetapi segera dapat diatasi oleh pemerintah yaitu dengan Normalisasi Kehidupan Kampus pada tahun 1978 yang diatur dalam Instruksi Dirjen Dikti No. 002/DJ/Inst/1978.

Dengan demikian Presiden Suharto mampu memimpin negara termasuk di dalamnya semua lembaga negara dan rakyat Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Sukarno, namun perbedaan yang mencolok Presiden Suharto berhasil membangun ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan teknokrat yang dulu dipasok oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX lewat Prof. Selo Soemardjan.

PENUTUP

Dengan demikian apakah sekarang negara Indonesia sudah sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Bapak Bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu negara republik yang berkedaulatan rakyat atau negara Indonesia yang demokratis yang nilai pokoknya partisipasi, tanggungjawab pimpinan dan kesamaan. Dari uraian di atas tampak bahwa usaha untuk mewujudkan negara demokrasi itu tampak pada periode 1945-1959, bersamaan dengan aktifnya politisi dan negarawan yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran tipe Minangkabau dan Bugis Makasar dalam arena politik pemerintahan.

Namun pada periode 1959-1966, partisipasi rakyat dalam politik menipis, bahkan nyaris hilang setelah dinyatakan sistem massa mengambang, tanggungjawab pemimpin pemerintahan kepada rakyat menipis karena tanggung jawab itu diarahkan ke atas, dan kesamaan memang diupayakan tetapi pemimpin tetap lebih tinggi daripada rakyat, sebab mewakili pemerintah.

Dalam filsafat Jawa *manunggaling kawula gusti* dalam dimensi politik mengajarkan bahwa hubungan pemimpin (raja) dan rakyat merupakan hubungan pribadi yang akrab yang disertai perasaan saling mengasihi dan menghormati; takdir menetapkan kedudukan manusia dalam masyarakat apakah ia dilahirkan sebagai abdi atau tuan; sebagai implikasinya pemimpin (raja) dan para pejabatnya dalam kebijaksanaan pemerintahan praktis harus memperhatikan rakyat sebagai orang tua mengasuh anak-anaknya. dengan demikian sesungguhnya sang penguasa memiliki sikap keunggulan yang melindungi, sedangkan yang diperintah memiliki sikap pengabdian yang tulus. (Soemarsaid Moertono, 1985 : 31-32).

Memang Sukarno sudah mendapat pendidikan Barat, maka pengaruh budaya Jawanya tidak menjadi rujukan satu-satunya, sehingga ketika menghadapi partai politik dia tidak bertindak sesuai dengan kehendaknya secara drastis, hal ini lain dengan Presiden Suharto yang sesak kecil dibesarkan di tengah-tengah budaya Jawa dan mendapat pengalaman militer dari Jepang sebagai PETA dan dari Belanda sebagai KNIL sehingga budaya Jawa dan kerapian organisasi militer yang selalu siap tempur sangat mempengaruhi kepemimpinannya.

Mungkin ciri kurang membedakan milik pribadi dan milik umum dalam kepemimpinan tradisional menyebabkan korupsi dan kolusi di Indonesia sulit diberantas, lebih-lebih kalau para pemimpin tidak menyadari hal itu sebagai sesuatu yang harus dihapuskan dalam kepemimpinan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Saifuddin Anshari dan Amin Rais. 1988 : *Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Penilaian dan Pandangan Generasi Muda*, Media Da'wah, Jakarta. Feith. Herbert.
- _____, 1995 : *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Joeniarto, 1984 : *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Liddle, R. William, 1992 : *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Mrazek, Rudolf, 1996 : *Sjahirir Politik dan pengasingan di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Schwarzmantel, John, 1994 : *The State in Contemporary Society An Introduction*, Harvester Wheatsheaf, London.
- Sekretariat Dewan Pimpinan Partai, 1973 : *Partai Persatuan pembangunan*, Jakarta.
- Soemarsaid Moertono, 1985 : *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau Studi tentang Masa Mataram II*, Abad XVI sampai XIX, Yayasan Obor, Jakarta.
- Suwarno, 1994 : *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suwarno, 1981 : *Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974*, 1974 : tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1975*, 1975 : Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Bina Ilmu, Surabaya.
- Usep Ranawidjaja, 1955 : *Swapradja Sekarang dan di Hari Kemudian*, Djembatan, Djakarta.

BAB VII PENDIDIKAN SEJARAH

PENDIDIKAN SEJARAH DI INDONESIA

Oleh : Djoko Suryo

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak muncul keluhan dan pernyataan yang memprihatinkan mengenai adanya kecenderungan kemerosotan pemahaman dan kesadaran sejarah bangsa pada sebagian kalangan generasi muda. Salah satu diantaranya, ada yang menyatakan bahwa banyak anak-anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman sejarah bangsa secara utuh. Dengan kata lain, pengetahuan sejarah mereka disebutkan hanyalah sepotong-sepotong. Di pihak lain, ada pula yang menyatakan bahwa banyak anak-anak lebih akrab dengan tokoh-tokoh film kartun serta tokoh film anak-anak yang lain, seperti Satria Baja Hitam, Superman, Batman dan tokoh lain yang sejenis, daripada tokoh-tokoh pejuang atau pahlawan bangsa. Senada dengan pernyataan tersebut, sejumlah guru-guru SLTP dalam bidang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di Jakarta dalam sebuah pertemuan dengan penulis pada beberapa bulan yang lalu, juga menyampaikan keluhannya tentang adanya kecenderungan kemerosotan nilai IPS dari para siswanya secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya mata pelajaran sejarah. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan karena siswa kurang tertarik pada mata pelajaran yang diasuhnya. Dalam hubungan ini, para guru merasa prihatin dan resah.

Keresahan guru-guru tersebut di atas sejalan dengan pernyataan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo yang menyampaikan kekagetannya melihat adanya kecenderungan pada sebagian anak muda yang menolak nasionalisme yang bertumpu kepada Keindonesiaan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dan tidak membahagiakan. Selanjutnya Prof. Sartono, menyatakan bahwa kecenderungan semacam itu merupakan akibat dari pengajaran sejarah yang jelek (SKH Kedaulatan Rakyat, tgl 4 Oktober 1996, hal. 16).

Pernyataan di atas memberikan isyarat bahwa kecenderungan yang terjadi pada masa kini sesungguhnya sudah sangat memprihatinkan, dan apabila dibiarkan akan membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara kebangsaan (Nation State) Indonesia pada masa mendatang. Dalam jangka panjang, situasi yang memprihatinkan ini berarti juga akan

mengganggu jalannya proses pembangunan, dan menghambat kemampuan dalam menjawab tantangan Era Globalisasi di masa datang.

Persoalan pokok yang patut dipertanyakan di sini ialah mengapa terjadi kecenderungan kemerosotan pemahaman dan kesadaran sejarah bangsa pada sebagian generasi muda seperti tersebut di atas. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya? Bagaimanakah cara mengatasi persoalan tersebut?

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban yang memuaskan, mengingat persoalannya luas dan rumit. Disadari bahwa, untuk memberikan jawaban yang memuaskan masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam. Makalah singkat ini dimaksudkan untuk membahas salah satu segi penting yang mungkin menjadi salah satu faktor dari permasalahan di atas, ialah faktor pendidikan sejarah bangsa. Bagaimanakah pendidikan sejarah bangsa kita sekarang ini? Berbagai kendala apakah yang dihadapi pendidikan sejarah bangsa pada masa kini? Bagaimanakah cara mengatasi kendala tersebut?

Dua hal yang patut disoroti, ialah pertama, faktor proses perubahan sosial yang sedang dialami masyarakat Indonesia, dan kedua, faktor kebijaksanaan pendidikan sejarah bangsa yang dilaksanakan. Kedua faktor tersebut berkaitan, yaitu yang pertama mempengaruhi yang kedua dan yang kedua dapat mempengaruhi yang pertama.

PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN SEJARAH BANGSA

Sejak awal, perubahan sosial di lingkungan masyarakat Indonesia mempengaruhi kebijaksanaan dalam pendidikan sejarah bangsa. Tepatnya, pada masa awal kemerdekaan, perubahan sosial-politik masyarakat Indonesia menuntut perubahan kebijaksanaan pendidikan sejarah bangsa yang sesuai dengan tuntutan jaman. Perubahan masyarakat Indonesia dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat "bangsa" (nation) yang merdeka dan memiliki negara kebangsaan (Nation State) Indonesia, menuntut terwujudnya pendidikan kebangsaan dan pembangunan bangsa (national building). Sebagai nasion Indonesia yang baru lahir, juga menuntut adanya penulisan sejarah bangsa Indonesia yang sesuai wawasan kebangsaan, yang berbeda dengan wawasan sejarah sebelumnya, yaitu wawasan kolonial. Tuntutan ini meluas ke dalam kebijakan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan kelembagaan pendidikan, yaitu pendirian sekolah, universitas, institut, beserta jurusan yang mengasuh Ilmu Sejarah, maupun penyusunan kurikulum dan pengajaran sejarah disekolah oleh pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan buku pelajaran sejarah dan buku bacaan sejarah termasuk menjadi tuntutan yang integral dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sejarah tersebut. Pendidikan nasional yang dirumuskan sebagai sarana

pembangunan bangsa, memerlukan landasan pendidikan yang berwawasan kesadaran nasional dan kesadaran sejarah bangsa, sehingga pendidikan sejarah sejak awal diperlukan dan relevan.

Proses perubahan sosial dan politik, disatu pihak, dan pendidikan sejarah bangsa, di pihak lain, sejak tahun 1950-an masing-masing memiliki dinamika perkembangan sendiri. Berlangsungnya proses perubahan politik, ekonomi, dan sosial di lingkungan masyarakat Indonesia semenjak tahun 1950-an sampai dengan masa kini terasa lebih cepat daripada berlangsungnya perubahan perangkat sistem pendidikan sejarah bangsa, sehingga tidak mengherankan timbul kesenjangan perkembangan.

Proses pembangunan dan modernisasi serta industrialisasi, yang didorong oleh pengenalan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, beserta pembaharuan sistem birokrasi dan administrasi yang mantap, penyelenggaraan sarana dan prasarana perekonomian yang meluas, dan penyelenggaraan edukasi yang meningkat, telah menyebabkan terjadinya perubahan struktural dan kultural yang pesat di lingkungan masyarakat Indonesia, terutama semenjak 1970-an hingga masa kini.

Perubahan struktural dan kultural, sebagai akibat dari proses pembangunan dan proses modernisasi, telah menyebabkan timbulnya tuntutan yang meningkat secara terus menerus dari semua lapisan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan, baik dimensi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sementara itu perangkat pendidikan sejarah bangsa mengalami hambatan-hambatan, sehingga tidak mampu memenuhinya. Akibatnya timbul kesenjangan, antara tuntutan yang meningkat dan kemampuan untuk menjawabnya.

Apabila tidak ditanggulangi kesenjangan tersebut akan semakin besar, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan, terutama dalam masa Era Keterbukaan atau Era Globalisasi. Tantangan besar yang akan dihadapi antara lain, tantangan yang ditimbulkan oleh akibat revolusi industri yang ketiga, yaitu revolusi telekomunikasi, transportasi dan travel, yang diduga akan besar pengaruhnya terhadap kehidupan negara kebangsaan (nation state) pada masa yang akan datang. Dengan demikian, pemikiran kembali tentang pendidikan sejarah menjadi semakin relevan dan mendesak.

PEMANTAPAN PENDIDIKAN SEJARAH BANGSA DAN ERA GLOBALISASI SANGAT MENDESAK

Sejak awal tahun 1950-an, pendidikan dalam bidang Ilmu Sejarah telah mulai diselenggarakan melalui kelembagaan pendidikan, yaitu melalui pendirian lembaga pendidikan tinggi, seperti universitas dan institut, yang di dalamnya membuka jurusan Sejarah. Perkembangan ini telah memberikan sumbangan penting dalam melahirkan kelompok sejarawan peneliti dan

penulis serta sejarawan pengajar sejarah. yang berperanan dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran sejarah di Indonesia. Seajar dengan perkembangan institusional, penerapan kurikulum mata ajaran sejarah di sekolah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan kesadaran bangsa dan kesadaran sejarah bangsa dari sekolah dasar hingga tingkat sekolah lanjutan tingkat atas. Penanganan kurikulum dan sistem pengajaran sejak awal hingga masa kini menjadi bagian yang ditangani oleh departemen pendidikan dan pengajaran, dengan segala hambatan dan permasalahannya.

Selama ini, terasa bahwa hambatan sarana, prasarana, sumber dana, sumberdaya, organisasi dan kelembagaan, serta sistem kerja, serta meluasnya wilayah dan permasalahan yang ditangani, menjadi semakin besar dan kompleks. Akibatnya kebijaksanaan yang ditangani tidak dapat secara menyeluruh memenuhi tuntutan yang dihadapi.

Sekalipun demikian, terdapat kebijaksanaan pemerintah yang cukup strategis untuk menanggulangi tuntutan yang mendesak tersebut di atas, antara lain yaitu disusunnya kurikulum tahun 1994, yang baru lalu. Paling tidak, telah terjadi usaha pembaharuan atau pemantapan kurikulum. termasuk di sini ialah kurikulum pendidikan sejarah di sekolah, dengan pemantapan wawasan sejarah masyarakat dan bangsa.

Satu segi yang perlu dicatat bahwa dalam pendidikan sejarah, perlu dikembangkan antara pengembangan wawasan sejarah bangsa, yaitu sejarah nasional, yang diimbangi dengan pengembangan wawasan sejarah masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Wawasan pertama, lebih memusatkan pemahaman sejarah kebangsaan (National History), sedangkan yang kedua lebih memusatkan pada sejarah masyarakat Indonesia dalam segala dimensinya, yaitu sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaannya (History of Indonesian Society). Kedua segi tersebut perlu dipadukan agar wawasan pemahaman masyarakat, bangsa dan negara menjadi luas, dan kesadaran sejarah menjadi lebih kuat.

Pada segi sejarah nasional, perlu diperluas cakupan wawasan wilayah negara nasion dan proses integrasi dan kesatuan menjadi intinya. Hal ini, menuntut cakupan bagian-bagian wilayah Indonesia dalam kajian dan pemahanan. Hal ini, berarti, perkembangan sejarah wilayah Timor Timur perlu dicakup agar masyarat pada bagian lain memahaminya, demikian pula sebaliknya. Selain itu, diperlukan penyempurnaan pemahaman perkembangan sejarah daerah secara seajar dalam Sejarah Nasional. Termasuk misalnya sejarah wilayah Irian Barat.

Sejarah masyarakat Indonesia, perlu dikembangkan dalam pengembangan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, untuk menopang pemahaman sejarah nasional.

Demikian juga pendekatan dan metode kajian serta pengajaran sejarah bangsa memerlukan pembaharuan dan pemantapan sesai dengan perkembangan jaman. Pendekatan teknologi perlu dipikirkan dan dikembangkan (elektroni, internet, dsb.)

PENUTUP

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam menghadapi perubahan pada masa Pembangunan dan Era Globalisasi pada masa mendatang, diperlukan pemikiran kembali serta penyempurnaan pendidikan sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Perluasan kerangka pemikiran teoritis maupun metodologis, beserta pendekatan kajian pemahaman dan kesadaran sejarah bangsa yang sesuai dengan tuntutan kemajuan sangat diperlukan dan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Suryo, "Pengajaran Sejarah dan Globalisasi Kehidupan, Historika, Program Pasca Sarjana, KPK UNS, Nomor 5, Th. III, (1991).

Luckas, John, Historical Consciousness, New York : Schocken Books, 1985.

Naisbitt, John, Global Paradox, Nes York : Avon Books, 1994.

Ohmae, Kinichi, The End of The Nation States, The Rise of Regional Economics, London : Harper Collins Pub., 1995.

Toffler, Alfin, (ed.), Learning for Tomorrow, Nes York : Vintage Books, 1974.

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

KINI DAN ESOK

Oleh : Sardiman AM

PRAWACANA

Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock¹, memperingatkan kepada kita bagaimana harus menghadapi perubahan yang begitu cepat dewasa ini. Kaitannya dengan pendidikan, ia mengusulkan perlunya mengembangkan super-industrial education system. Salah satu konsekuensi dari sistem ini, kurikulumnya harus disusun sepenuhnya mengacu ke masa depan². Ini artinya mata pelajaran-mata pelajaran yang ada di sekolah harus memiliki perspektif ke depan. Mata pelajaran-mata pelajaran yang secara fungsional tidak memiliki peran di dalam kehidupan di masa datang akan tergusur, bahkan bisa tercoret dari kurikulum sekolah. Bagaimana dengan mata pelajaran sejarah ?

Pertanyaan ini cukup pelik untuk dijawab. Secara formal dan legal, mata pelajaran sejarah memang tidak akan dihilangkan karena sudah terpaten di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi secara material fungsional pendidikan dan pengajaran sejarah kini masih menghadapi berbagai kendala yang cukup berat. Semakin maraknya budaya materialistik, telah mendorong masyarakat untuk berpikir pada hal-hal yang praktis-teknologis dan tidak jarang selalu di kaitkan dengan persoalan untung rugi secara ekonomis. Pola pikir semacam ini ternyata juga melanda di lingkungan para siswa di sekolah. Mereka kebanyakan tidak lagi tertarik dengan pelajaran sejarah. Sudah tentu hal ini menjadi kendala yang cukup berat. Sementara kita masih sering "berteriak-teriak", pelajaran sejarah penting, karena pelajaran sejarah itu berkaitan dengan upaya pemupukan rasa patriotisme dan semangat nasionalisme serta mendidik manusia menjadi lebih arif. Tetapi kenyataannya memang masih belum banyak menanggapi maksud tersebut. Kalau demikian dapatkah mata pelajaran sejarah itu bertahan? Bagaimana cara mempertahankannya? Melalui "episode" yang berjudul : "Pendidikan dan Pengajaran Sejarah Kini dan Esok" ini ingin dicoba memaparkan beberapa contoh persoalan di dalam pengajaran Sejarah di masa kini dan bagaimana pengajaran yang perlu dikembangkan untuk masa-masa berikutnya.

SEKILAS TENTANG PENGAJARAN SEJARAH

Pengajaran sejarah adalah cara untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Penyampaian nilai ini berkait dengan upaya menjamin kelangsungan budaya masyarakat. Dalam konteks penyampaian nilai-nilai budaya ini di lingkungan masyarakat kita sejak zaman dulu, sudah ada kebiasaan orang tua menceritakan dongeng-dongeng atau ceritera dan hikayat kepada anak atau cucu. Di beberapa daerah seperti di Bali ada kegiatan membaca lontar yang disebut ngidung, di Jawa ada mocopat, dan lain-lain. Melalui kegiatan itu orang tua berusaha mengajarkan nilai-nilai budaya para leluhur kepada anak cucunya. Tujuannya tidak hanya agar anak cucunya mengetahui budaya atau kisah-kisah yang telah disampaikan, tetapi lebih jauh agar anak cucunya terbina karakter dan kepribadiannya.

Kalau kita cermati, kejadian dan kebiasaan tersebut boleh dikatakan sebagai cara pengajaran "Sejarah", tetapi secara tradisional. Para orang tua itu berusaha mengajarkan pengetahuan mengenai masa lampau untuk kehidupan anak cucunya (masa kini).

Berbeda dengan pengajaran sejarah secara formal di sekolah-sekolah. Pengajaran sejarah secara formal di sekolah-sekolah ini sudah lebih teratur dan terstruktur. Bahan ajar sejarah didasarkan pada hasil studi dan penelitian, bersifat ilmiah dan faktual.

Sejarah memang bersifat ilmiah, karena sejarah adalah suatu cabang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis dari keseluruhan perkembangan masyarakat di masa lampau. Atau dapat dikatakan sebagai suatu studi untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan pemahaman yang benar tentang masa lampau³. Hanya perlu diingat masa lampau dalam hal ini bukan sesuatu yang mandeg, final dan tertutup, tetapi bersifat terbuka dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip sebab akibat. Dalam kaitan ini maka obyek kajian sejarah adalah peristiwa atau perubahan di dalam masyarakat yang berada pada dimensi ruang dan waktu.

Selanjutnya yang berkaitan dengan tujuan kurikuler sejarah, ada beberapa pandangan⁴, yang perlu dijelaskan. Misalnya pandangan esensialismenya. Menurut pandangan ini, sejarah adalah disiplin ilmu. Para siswa yang belajar sejarah haruslah di asah kemampuan intelektualnya sesuai dengan tradisi keintelektualan sejarah sebagai disiplin ilmu. Dalam hal ini kemampuan berpikir keilmuan yang menghendaki kemampuan berpikir kritis dan analisis.

Berikut pandangan yang disebut dengan rekonstruksi sosial. Menurut pandangan ini, tujuan pendidikan dan pengajaran sejarah memberikan kemampuan kepada siswa untuk melihat problema yang ada dalam kehidupan masa sekarang dan keterkaitannya dengan apa yang terjadi di masa lampau. Pengetahuan sejarah diharapkan dapat membantu siswa untuk

mengkaji dan memecahkan masalah yang ada. Sejarah juga diharapkan dapat membina kemampuan diri siswa untuk mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana ia menjadi anggotanya dan diharapkan dapat memperbaiki keadaan masyarakat pada masa sekarang. Dalam hal ini siswa dituntut untuk secara kritis dan cermat memahami kecenderungan-kecenderungan yang telah terjadi. Selain itu, secara tradisional ada pandangan yang disebut transission of culture. Menurut pandangan ini pendidikan dan pengajaran sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik dan generasi penerus untuk menghargai hasil karya besar bangsa di masa lalu, memupuk rasa persatuan dan kesatuan nasional. Secara filosofis, sejarah dengan konsep tiga dimensi waktu, juga akan mendidik seseorang untuk memahami sangkan parannya, memahami keberadaan dirinya⁵, sehingga dapat memperkuat identitas diri, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memperkuat identitas nasional.

Mencermati beberapa pandangan dan tujuan pengajaran sejarah tersebut, menunjukkan bahwa pelajaran itu memiliki makna yang penting, baik bagi setiap individu masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa penjajahan Belanda pelajaran sejarah memiliki peranan penting, bahkan dijadikan ukuran bagi bobot dan kepandaian bagi siswa⁶. Pelajaran sejarah juga dijadikan bahan pendidikan politik untuk menyatakan bahwa kekuasaan Belanda adalah pemerintahan yang sah, sedang orang-orang Indonesia yang melawan adalah sebagai pemberontak. Materi sajiannya kebanyakan kisah-kisah peranan orang-orang Belanda. Pihak Belanda juga menginginkan agar para siswa mengakui jasa para tokoh Belanda dalam memajukan bangsa Indonesia. Memang sejak tahun 1922 di kalangan orang-orang Indonesia ada kesepakatan untuk mengusahakan pelajaran sejarah di sekolah diarahkan agar para siswa dapat menghayati dan menghargai nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Sementara di kalangan kaum pergerakan menginginkan pelajaran sejarah di sekolah-sekolah dapat menanamkan kesadaran politik dan ras kebangsaan, seperti misalnya di lingkungan Tamansiswa. kemudian pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dan pengajaran sejarah diarahkan pada pemahaman dan penghayatan terhadap kegiatan Perang Asia Timur Raya sebagai perang suci. Di bawah bimbingan Jepang, generasi muda Indonesia memiliki tanggung jawab yang suci untuk berperan dalam perang dan mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau Zaman Kemerdekaan, pengajaran sejarah menjadi semakin penting. Pelajaran sejarah berperan mempertahankan dan meningkatkan semangat kebangsaan. Kisah-kisah pahlawan pejuang kita banyak diajarkan. Begitu juga peringatan-peringatan mengenang pahlawan nasional menjadi acara tetap bagi sekolah. Paling tidak, sampai dasa warsa tahun 1960-an, pelajaran sejarah menjadi salah satu mata pelajaran yang digemari dan ditekuni oleh para siswa.

BERBAGAI PERSOALAN YANG DIHADAPI DI MASA KINI

Satu kendala yang cukup berat dalam pengajaran sejarah adalah rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah (siswa kurang tertarik). Dalam kondisi yang demikian ini secara teoritik, tidak akan berlangsung interaksi belajar mengajar secara optimal. Dengan demikian tujuan kurikulumnya pun juga sulit untuk tercapai secara optimal.

Kondisi tersebut nampaknya tidak dapat dilepaskan dari budaya materialistik yang kini sedang marak. Juga tidak dapat dipungkiri adanya pengaruh dari orde pembangunan yang terkesan sebagai sebagai orde ekonomi. Akibatnya pelajaran sejarah yang tidak berorientasi dan tidak menghasilkan produk-produk ekonomis, kurang diminati. Selain itu juga adanya kebijakan pendidikan yang menimbulkan kesan berbeda antara mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran yang lain seperti ada yang tidak di EBTANAS-kan dan ada yang di EBTANAS-kan. Begitu juga perbedaan jam pertemuan, telah menumbuhkan kesan bobot pelajaran sejarah lebih ringan dengan mata pelajaran yang lain seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau yang lain.

Kemudian melihat dari proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan juga belum banyak yang memadai. Kalau dikaitkan dengan beberapa pandangan serta arah dan tujuan pengajaran sejarah seperti telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa tujuan pengajaran sejarah itu banyak yang berdimensi afektif, di samping yang kognitif. Atau menurut versi lain dalam proses belajar mengajar itu mengenal dua jenis tujuan, yakni : instructional effects dan nurturant effects⁷. Proses belajar mengajar yang ada sekarang ini boleh dikatakan masih belum banyak yang dapat mencapai pada tujuan jenis afektif ataupun yang nurturant effects. Karena dikejar target maka pengajaran sejarah cenderung menyajikan deretan fakta dan peristiwa, nama raja dan kerajaan, angka tahun dan perang-perang, seperti yang juga dibenarkan oleh hasil penelitian S. Hamid Hasan⁸. Akibat pola pengajaran yang demikian itu, pelajaran sejarah cenderung menjadi pelajaran hafalan yang cepat membosankan.

Perlu ditambahkan, kalau tidak hati-hati, bisa jadi tujuan jenis afektif dan nurturant effects itu akan terkubur/terlupakan. Karena sekarang ini nampak banyak sekolah-sekolah yang juga dilegitimasi oleh masyarakat bahwa tujuan dari sekolah itu yang penting bagaimana nilai rapor atau NEM-nya para siswa baik dan dapat masuk sekolah lebih tinggi yang favorit (yang baik). Kalau ini diterapkan untuk pengajaran sejarah berarti tujuan yang afektif itu akan sulit tercapai, karena yang penting dapat mengerjakan soal ulangan/ujian. Ditambah model evaluasinya juga kurang menantang misalnya dengan bentuk soal tes obyektif. Persoalan lain yang masih juga memprihatinkan adalah masih adanya pengajar sejarah yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu sejarah⁹.

PENGAJARAN SEJARAH YANG PERLU DIKEMBANGKAN

Pendidikan harus mengembangkan kemampuan dan kepribadian peserta didik untuk kehidupan yang mereka alami di hari esok, bukan untuk kepentingan orang dewasa atau dirinya di hari ini. Begitu juga pendidikan dan pengajaran sejarah yang kita kembangkan mestinya yang sesuai dengan perkembangan yang akan datang.

Sudah menjadi buah pembicaraan di kalangan pemerintah dan para ilmuwan bahwa kehidupan masa depan akan ditandai dengan globalisasi, keterbukaan dan pasar bebas. Pada fase globalisasi ini dunia menjadi menyatu. Manusia dapat saling kontak dari ujung bumi yang satu ke ujung dunia yang lain dalam nano-second¹⁰. Ini artinya manusia di daerah yang satu dengan daerah yang lain dapat mengenal obyek yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan. Batas-batas daerah menjadi terbuka. Masyarakat kita sudah mendunia, sudah menyatu dalam "rumah global"¹¹. Karena itu masing-masing unsur budaya akan saling membaaur dan pengaruh-mempengaruhi. Faham atau pemikiran seseorang akan cepat berpengaruh ke tempat lain secara cepat dan meluas.

Dunia merupakan dunia yang terbuka atau yang sering disebut dengan world without border (dunia tanpa batas)¹². Dunia tanpa batas itu adalah dunia yang mengglobal yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan paradigmatis. Melalui teknologi media informasi dan telekomunikasi, seolah-olah daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain mengglobal dalam satu unit. Semua orang di planet bumi ini menjadi begitu dekat satu dengan yang lain karena kecanggihan teknologi. Masyarakat dunia mulai memasuki era baru dengan segala kecenderungan seperti masyarakat yang bergerak dari industri berkembang ke informasi, sistem perekonomian yang mendunia dan munculnya pasar bebas,¹³ keterbukaan dan demokratisasi¹⁴. Dunia tanpa batas itu akan ditandai dengan persaingan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu perlu kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan kompetitif. Untuk ini diperlukan sistem pendidikan yang relevan dengan tantangan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, di samping terus mengupayakan peningkatan mutu perangkat keras maupun perangkat lunak harus juga dikembangkan pendidikan dengan perspektif global. dalam pendidikan dengan perspektif global ini berusaha mengembangkan bagi sumber daya manusia untuk hidup secara afektif di dalam sebuah dunia tanpa batas tetapi memiliki sumber alam yang terbatas serta dicirikan oleh keanekaragaman etnik, kemajemukan budaya dan interdependensi yang semakin meningkat¹⁵. Dalam hal ini tersirat adanya kebutuhan bagi individu untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga komunitas lokal, nasional, di samping warga masyarakat dunia. Ini artinya sekalipun pendidikan

global mengakui pentingnya persamaan di antara umat manusia, tetapi tidak dapat melupakan adanya perbedaan di antara bangsa-bangsa dan rakyatnya. Orang yang memiliki perspektif global dituntut untuk memahami dan menyadari bahwa kita semua adalah anggota dari sebuah spesi tunggal yang diperkaya oleh perbedaan dan keanekaragaman.

Masyarakat yang hidup dalam perspektif global tidak ada yang memiliki monopoli, termasuk monopoli atas kebenaran dan tidak ada bangsa yang pandangannya tentang dunia diterima secara universal¹⁶. Sebaliknya harus disadari bahwa budaya-budaya lain memiliki sistem-sistem nilai yang unik, kerangka acuan yang berbeda, cara berpikir dan bertindak yang berlainan, pandangannya terhadap dunia ini mungkin juga berbeda.

Bagaimana di alam globalisasi dengan ciri dan berbagai kecenderungan seperti telah diterangkan di atas, mampukah pendidikan dan pengajaran sejarah bertahan menjadi salah satu isi kurikulum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita? Bagaimana pengembangan pengajaran sejarah agar tetap bertahan?

Alvin Toffler memang pernah melontarkan kritik bahwa pengajaran sejarah pada umumnya masih berorientasi ke masa lampau. Dalam bentang dimensionalnya seakan-akan hanya berhenti pada masa kini, sehingga subyek didik seperti kehilangan kesadaran atau rasa tentang waktu sesudah masa kini¹⁷. Berkait dengan kritik ini memang harus dikembangkan pola pengajaran sejarah yang berperspektif masa depan, atau dengan wawasan kontinuitas dan prinsip sebab akibat. Setiap guru harus dapat menarik benang merah dari peristiwa masa lampau dengan realitas masa kini disertai diskripsi dan pemaknaan, kemudian siswa diminta untuk "merasakan" dan "mencatat sebagai peringatan atau pengalaman untuk masa berikutnya".

Pengajaran sejarah sebagai kisah harus juga dikembangkan secara optimal sesuai dengan jenjang pendidikannya¹⁸. Karena pengajaran sejarah mestinya tidak semata-mata terfokus pada buku teks. Buku teks bukan sesuatu yang final. Guru perlu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya dengan membaca hasil-hasil penelitian, sumber-sumber lain seperti dokumen, koran, dan lain-lain. Kemudian pengajaran konsep dalam sejarah perlu dilakukan lebih dinamis dan terbuka, bukan semata-mata bahan jadi. Di samping semua itu, perlu digunakan metoda dan media yang bervariasi.

Sementara yang menyangkut isi materi, perlu disesuaikan dengan orientasi ke arah sejarah global. Menurut Von Saue sejarah global adalah satu unit studi sejarah yang paling masuk akal dalam arti keterkaitannya dengan perkembangan masa depan. Sejarah global tidak semata-mata difokuskan pada Sejarah nasional¹⁹. Dalam sejarah global ini kedudukan Indonesia yang strategis itu memiliki keterkaitan dengan perkembangan negara-negara lain, dan saling terjadi pengaruh mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Berkaitan dengan ini maka di dalam mengkaji dan mengajarkan Sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan keberadaan negara-negara lain. Bagaimana perkembangan bentuk-bentuk hubungan

antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam batas-batas tidak meluluhkan eksistensi semangat nasionalisme tetapi juga terhindar dari sifat picik dan chauvinis. Untuk ini Von Laue mengajukan alternatif bentuk studi dan pengajaran sejarah di zaman globalisasi yang terus berkembang di masa-masa mendatang. Alternatif yang dimaksud berintikan : (1) sejarah global, sebagai unit studi sejarah, bukan semata-mata sejarah yang ditekankan pada sejarah nasional, apalagi lokal, (2) sejarah yang berintikan hubungan selaras sesama umat manusia dengan landasan kepekaan moral untuk memperluas kesadaran spiritual, meningkatkan rasa saling mengasihi serta memperkokoh kesetiakawanan umat manusia, (3) sejarah yang berperspektif ke masa depan dengan berdasar pada "ruh" masa lampau²⁰. Kajian sejarah atas semangat moral dan skala global ini juga pernah dikemukakan oleh Toynbee²¹.

Dari beberapa pandangan tersebut dalam menghadapi perkembangan-perkembangan global, maka di samping studi Sejarah Indonesia, pengembangan studi sejarah bangsa-bangsa lain menjadi penting artinya. Tema dan obyek kajiannya di samping kajian sosial ekonomi, juga perlu dikembangkan kajian budaya dan politik, tetapi tidak menyempit, namun secara mendalam dengan melihat keunikan dan saling keterkaitannya. Metode sejarah kritis harus diangkat untuk membelah kehidupan umat manusia yang semakin mengglobal. Studi sejarah sosial ekonomi tingkat regional maupun global perlu dikembangkan. Studi sejarah kebudayaan (antar bangsa), interaksi dan saling pengaruh tentang paham-paham baru atau ide dan pemikiran serta perkembangan IPTEK, perlu juga mendapat porsi yang penting dalam mengkaji khasanah Sejarah Indonesia dan sejarah bangsa-bangsa lain. Pengajaran sejarah yang demikian itu relevan dengan upaya pendidikan yang berspektif global. Untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan ketrampilan masyarakat agar dapat membina hidup secara efektif, tidak cukup hanya paham dengan sejarah bangsa sendiri (dirinya), tetapi perlu pula memahami keberadaan bangsa lain dengan segala aspek baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya, termasuk adat dan bahasanya, sehingga dapat memahami kekurangan dan kelebihan kita maupun bangsa-bangsa lain. Karena itu dilihat dari isi materinya, pengajaran sejarah tidak terlepas dari pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum dengan tetap mendasarkan metoda sejarah kritis dalam pengembangannya. Pendekatannya multi dimensional dan global. Pemanfaatan hasil teknologi sebagai media pengajaran sejarah juga semakin penting artinya.

PENYUDAH

Pendidikan dan pengajaran sejarah di Indonesia, dalam arti untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dewasa ini belum semuanya optimal. Kendala yang cukup berat adalah rendahnya minat dan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran sejarah, disamping soal proses belajar mengajarnya. Bahkan kalau tidak hati-hati, upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran sejarah (bisa jadi termasuk mata pelajaran yang lain) itu akan semakin jauh. Karena kini berkembang trend, dan nampak menjadi kesan masyarakat bahwa keberhasilan pendidikan dan pengajaran itu digambarkan dengan angka-angka yang baik pada rapor atau NEM.

Memasuki fase globalisasi, pengajaran sejarah yang sangat berkepentingan dalam membina rasa waktu (kesadaran tentang waktu), pengajaran yang berorientasi masa depan, harus semakin ditingkatkan. Di samping meningkatkan pengelolaan proses belajar mengajar, materi ajarnya juga perlu pengembangan. Di samping memperdalam materi dan kajian Sejarah Indonesia, orientasi sejarah global tidak boleh ditinggalkan. Mempelajari sejarah bangsa lain adalah penting sebagai alat komparasi, sehingga kita akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berkompetisi dengan yang lain, setelah kita memahami kelebihan dan kekurangan kita dan juga karakteristik bangsa lain.

CATATAN

¹ Alvin Toffler, *Future Shock*, London:Pan Book Ltd. hlm 370

² I Gde Widja, "Pendidikan Sejarah dan Tantangan Masa Depan," *Orasi Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Pendidikan Sejarah FKIP-Univ. Udayana*. Singaraja, 19-1-1991, hlm. 4

³ David S. Landes; Charles Tilly (ed), *History as Social Science*, New Jersey-Printice Hall, 1971, hlm. 5

⁴ Selengkapnya dapat dilihat pada S. Hamid Hasan, "Tujuan Pendidikan Sejarah di SMA", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Sejarah di Yogyakarta, 1985; "Kurikulum Sejarah untuk Tingkat Sekolah", *Makalah* disajikan pada Seminar di Pusbangkurandik Balitbangdikbud, Jakarta, 1989, juga "Kajian materi Pengajaran Sejarah dalam rangka Memantapkan Nasionalisme untuk Menyongsong Abad 21, *Makalah* disajikan pada Seminar di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS-IKIP Yogyakarta 27 Mei 1996

⁵ Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 67

⁶ S. Hamid Hasan^a, "Kajian Materi Pengajaran Sejarah dalam Rangka Memantapkan Nasionalisme untuk Menyongsong Abad 21, *Makalah* disajikan pada Seminar di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS-IKIP Yogyakarta 27 Mei 1996, hlm. 7

- ⁷ Selengkapnya dapat dilihat pada, Sardiman AM. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rajawali Pres, 1994, hlm. 28
- ⁸ S. Hamid Hasan^b, Evaluasi, Implementasi Kurikulum Sejarah di SMA", *Laporan Penelitian*, 1990
- ⁹ Paling Tidak di Yogyakarta dan Jawa Tengah, boleh juga makalah dari Amal Hazah, "Pendidikan Global dalam Pengajaran Sejarah" *Makalah*, disajikan pada Seminar di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS-IKIP Yogyakarta, 27 Mei 1996, hlm. 1
- ¹⁰ Marwah Daud Ibrahim *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi-Wacana Peradaban dengan Visi Islam*, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 15
- ¹¹ *Ibid*
- ¹² Dikutip dari H.A.T. Tilaar, "Inovasi Pendidikan dalam Menghadapi Globalisasi", *Makalah* disampaikan pada Simposium Nasional di IKIP Yogyakarta, 13-14 Mei 1996, hlm. 1
- ¹³ John Naisbitt dan Patricia Abdudene "Megatrens 2000" disadur oleh Edy Kuscahyanto, *Warta Ekonomi*, No. 01, 1990
- ¹⁴ S. Hamid Hasan^a, *op.cit.*, hlm. 2-4
- ¹⁵ Johannes Esomar, "Pendidikan ke Arah Prespektif Global dan Implikasinya terhadap Pendidikan IPS", *Makalah* disampaikan pada Forum Komunikasi dan Saresehan VII Pimpinan FPIPS-IKIP dan JPIPS FKIP/STKIP se Indonesia di Manado 26-27 Februari 1996, hlm. 3
- ¹⁶ *Ibid*
- ¹⁷ I Gde Widja, *loc. cit.*
- ¹⁸ Lihat tulisan Djoko Suryo, tentang penyajian materi dikaitkan dengan jenjang pendidikan, "Pengembangan Kajian Sejarah Dalam Kurikulum SLTA", *Makalah* disajikan pada Seminar Regional Jawa-Bali, di IKIP Malang, 1991, hlm. 5-6.
- ¹⁹ Istilah Sejarah Global ini pernah digunakan oleh Von Laue dalam tulisannya yang berjudul : *What History for the Year 2000*, sebagai alternatif pengajaran Sejarah di masa depan. Dikutip dari I Gde Widja, *op.cit.*, hlm. 6-7
- ²⁰ *Ibid*, hlm. 8
- ²¹ A.J. Toynbee, *Surviving the Future*, New York, London: Oxford University Press, *Arnold Toynbee dan the Crisis of the West*, Washington DC., University Press of America Inc., 1982, hlm. x

BAB VIII

PENUTUP

Sejarah masa yang akan datang ditentukan oleh generasi sekarang. Karena proses sejarah yang terjadi pada masa sekarang ini merupakan pondasi untuk menentukan sejarah masa yang akan datang. Oleh karena itu agar kita tidak kehilangan identitas dan jati diri di masa depan diperlukan adanya pemahaman dan pelestarian nilai-nilai luhur sejarah bangsa yang sudah terbentuk dan mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terpaan arus globalisasi yang semakin kuat dan tidak bisa dibendung.

Untuk itu diperlukan adanya penanaman nilai-nilai luhur budaya kepada generasi muda. Melalui sejarah kita dapat mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Pendidikan sejarah sangat diperlukan bagi generasi muda untuk membentengi pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Pendidikan sejarah yang tepat dapat mengarahkan wawasan kebangsaan dan mempertebal jati diri dan identitas bangsa sehingga kelangsungan pembangunan memiliki arah yang jelas sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Kiranya buku ini bermanfaat bagi generasi muda untuk mengetahui makna sejarah dan hubungannya dengan pembangunan bangsa. Kami juga mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



Gebyar busana perjuangan sebagai kegiatan penunjang pameran temporer di Museum Benteng Yogyakarta



Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan mengunjungi FKY 1997 yang dilaksanakan di Museum Benteng Yogyakarta



Tema ceramah terlihat jelas pada kain Background



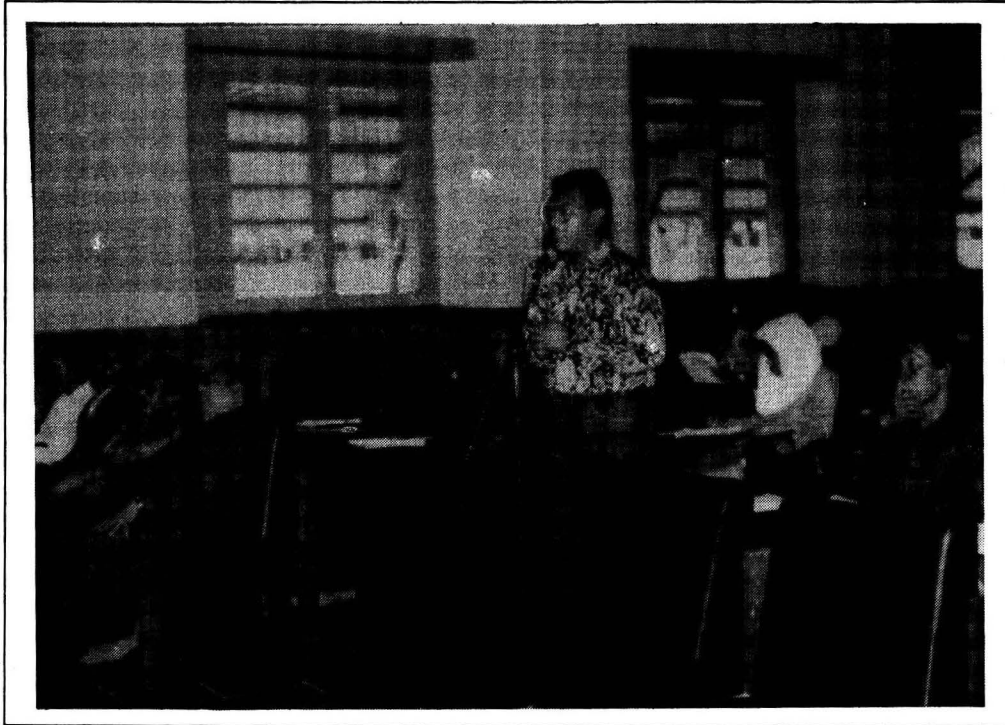
Nampak para penceramah sedang menyimak acara pembukaan



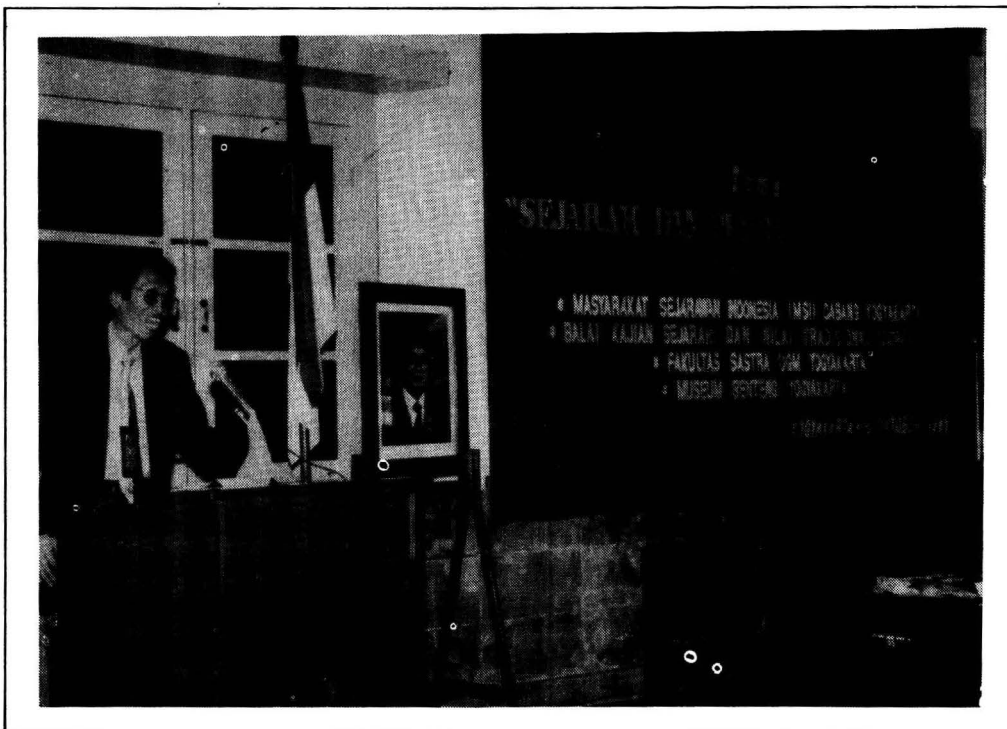
Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian sedang membacakan makalahnya



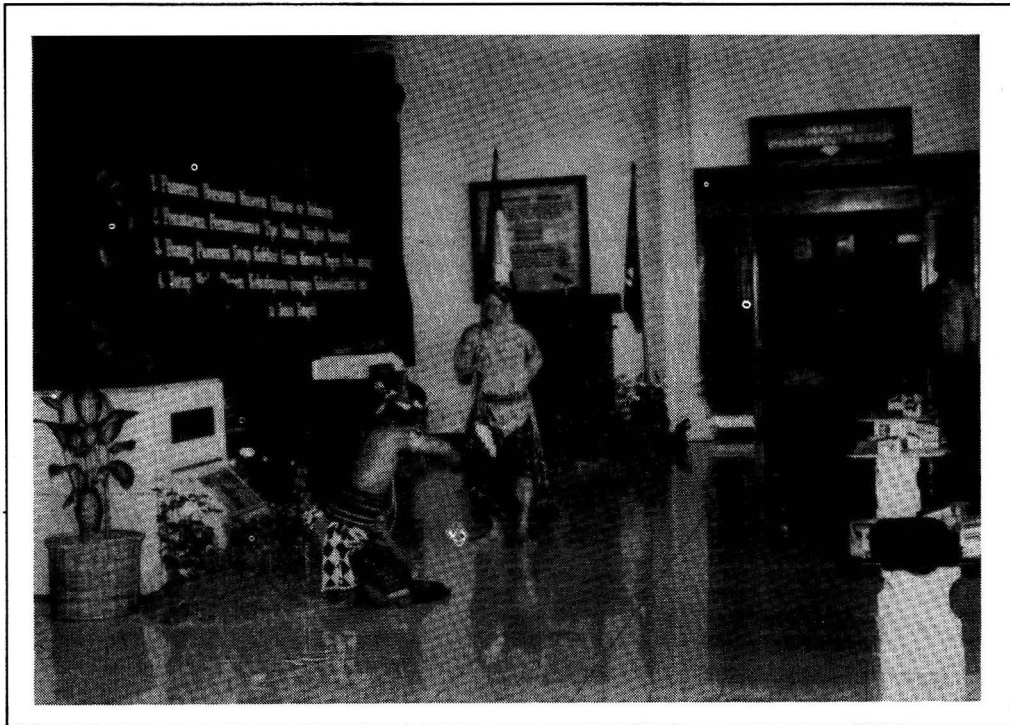
Dr. Adaby Darban sedang memandu jalannya diskusi



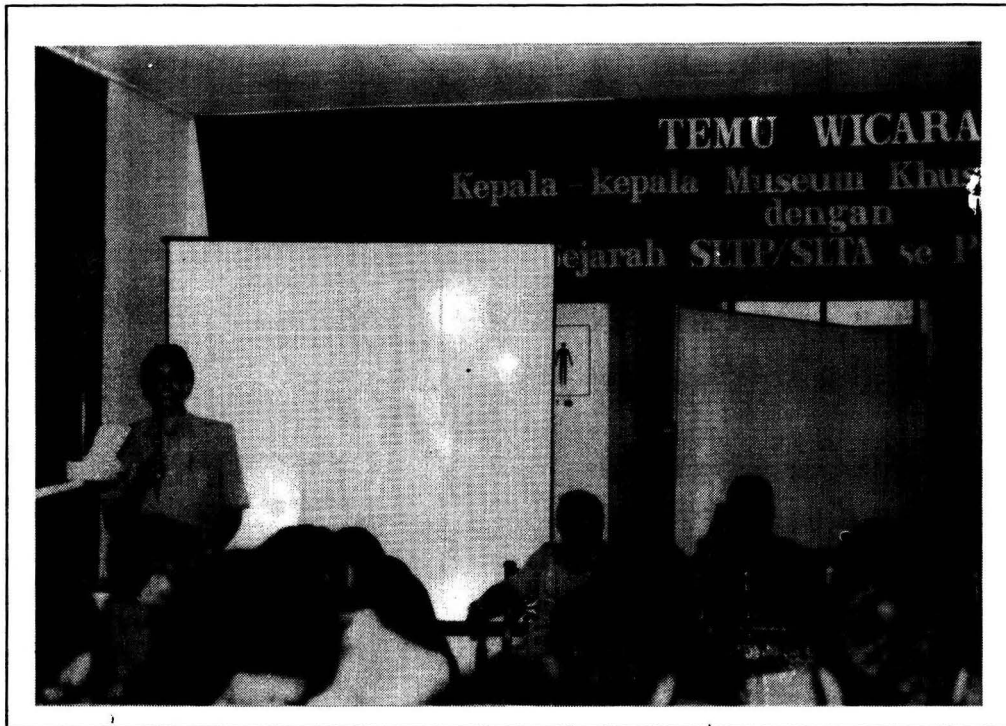
Wakil dari generasi muda sedang memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada pembicara



Dr. Anhar Gonggong, Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional berkenan menutup acara diskusi



Pembukaan Pameran Bersama Museum Khusus se Indonesia di Semarang tanggal 14 Oktober 1996, salah satu pesertanya adalah Museum Benteng Yogyakarta



Kepala Museum Benteng Yogyakarta sedang memberikan ceramah pada kegiatan temu wicara Kepala-kepala Museum Khusus se Indonesia dengan guru sejarah SLTP/SLTA se Propinsi Jawa Tengah



Perpustakaan
Jenderal K

370.
PE